

338.479 1

MFH 5772

400-2003

Kua

KUALITAS SDM PARIWISATA ERA OTDA DAN GLOBALISASI

Kasus di Industri Perhotelan dan
Kerajinan Batik di DIY



DOKINFO
PUSAT PENELITIAN EKONOMI
(PTE) - LIPI

Tgl. Terima : 13 OCT 2003
BIMBINGAN : PRK - W/1
No. Indek : 400-2003
No. Klas : _____

400-2003

KUALITAS SDM PARIWISATA ERA OTDA DAN GLOBALISASI

Kasus di Industri Perhotelan dan
Kerajinan Batik di DIY

Editor :

Daliyo

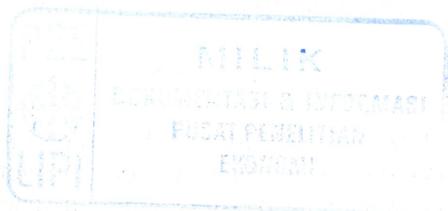
Penulis :

Laila Nagib

YB Widodo

Daliyo

Sri Rahayu



Diterbitkan oleh Pustaka Sinar Harapan
bekerjasama dengan
Pusat Penelitian Kependudukan,
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
JAKARTA, 2003

Nagib, Laila. et al.
Kualitas SDM Pariwisata Era OTDA dan Globalisasi/
Laila Nagib, YB. Widodo, Daliyo, Sri Rahayu. -- Jakarta:
Pustaka Sinar Harapan, 2003

132 hlm, 21 cm
ISBN : 979-416-785-1

1. Perhotelan 2. Kerajinan Batik 3. DI Yogyakarta
I. Judul II. Pusat Penelitian Kependudukan-LIPI

**KUALITAS SDM PARIWISATA
ERA OTDA DAN GLOBALISASI**

Penulis :

Laila Nagib, YB. Widodo, Daliyo, Sri Rahayu

Desain sampul dan isi : Puji Hartana

© 2003, PPK-LIPI

Hak Cipta dilindungi oleh Undang-Undang
Diterbitkan oleh Pustaka Sinar Harapan, anggota IKAPI Jakarta
bekerjasama dengan Pusat Penelitian Kependudukan-
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

Jakarta, Agustus 2003

Dicetak oleh: PT Surya Multi Grafika

PENGANTAR PENULIS

Daerah Istimewa Yogyakarta telah lama menjadi Daerah Tujuan Wisata (DTW), karena memiliki berbagai potensi wisata budaya yang cukup kaya dan menjadi DTW urutan kedua setelah Propinsi Bali. Dengan mulai diimplementasikannya Undang-Undang No.22 dan 25 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah (OTDA), propinsi ini telah memiliki tanggung jawab yang penuh terhadap pembangunan di wilayahnya. Oleh karena itu, pemerintah daerah tersebut telah berusaha keras untuk mampu memanfaatkan potensi daerahnya. Mengingat daerah ini termasuk wilayah yang relatif kurang kaya akan sumber daya alam, maka pemerintah daerah telah memilih industri pariwisata sebagai salah satu andalannya.

Daerah Istimewa Yogyakarta selama ini telah memanfaatkan industri pariwisata menjadi andalan daerah. Pengembangan industri pariwisata daerah ini telah berperan atau mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Dengan anggapan bahwa pertumbuhan ekonomi yang cukup berarti akan memperluas kesempatan kerja, dan mengingat sebagian besar kegiatan industri pariwisata di Yogyakarta merupakan usaha yang bersifat padat karya (*labour intensive*). Industri pariwisata merupakan industri yang bersifat lintas sektoral dan diharapkan memiliki efek ganda terhadap perkembangan sektor-sektor ekonomi yang lain. Hal tersebut juga akan menggerakkan kegiatan perekonomian yang lebih luas dan membuka kesempatan kerja yang lebih luas pula.

Industri pariwisata di Yogyakarta cukup menjanjikan dan mempunyai peran yang strategis bagi perekonomian Yogyakarta. Ada lembaga-lembaga sosial dan ekonomi di Yogyakarta yang penting kiprahnya dalam pengembangan industri pariwisata dan pengembangan sumber daya manusianya. Lembaga seperti PHRI (Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia), PUSPAR-UGM (Pusat Penelitian dan Pengembangan Pariwisata), STUPPA (Studio Perencanaan Pariwisata), HPI (Himpunan Pramuwisata Indonesia) dan ASITA (Association of the Indonesian Tours and Travel Agencies) adalah lembaga-lembaga yang dalam program kegiatannya ikut meningkatkan kualitas tenaga kerja industri pariwisata di Yogyakarta, utamanya dalam industri perhotelan. Lembaga-lembaga tersebut saling bekerja sama, mereka juga bekerja sama dengan instansi-instansi pemerintah, seperti Dinas Pariwisata, Dinas Tenaga Kerja dan Pemerintah Daerah. Usaha perhotelan dalam beberapa dasawarsa terakhir terus berkembang, terutama untuk hotel-

hotel yang non-bintang seiring dengan makin banyaknya wisatawan yang berkunjung ke Yogyakarta sampai pertengahan 90-an. Hanya selama krisis ekonomi telah terjadi penurunan kunjungan wisatawan secara drastis, karena adanya ketidakstabilan keamanan nasional dan penurunan pendapatan masyarakat.

Dalam industri kerajinan batik lembaga-lembaga ekonomi yang pernah berperan dalam peningkatan usaha batik adalah koperasi. Pada awal tahun 60-an di Yogyakarta ada sebuah koperasi batik, yang terkenal dengan nama 'Koperasi Batik PPBI'. Dengan makin bertambahnya anggota koperasi ini telah berkembang menjadi 5 koperasi batik, sehingga masing-masing kecamatan yang memiliki banyak anggota ada sebuah koperasi batik. Peran koperasi memberikan pelayanan bahan baku, peralatan, pemasaran dan pelatihan usaha batik bagi para anggotanya. Hanya sayang peran pelayanan dalam usaha batik tersebut setelah tahun 80-an makin berkurang, seiring dengan makin banyaknya anggota yang beralih usaha meninggalkan usaha batik. Pengusaha batik yang masih bertahan sampai saat ini tinggal di bawah 20 persen. Berkurangnya pengusaha batik tulis dan batik cap Yogyakarta antara lain kalah bersaing dengan pengusaha batik *printing* yang lebih berskala besar, produksinya lebih masal dan prosesnya cepat serta harga jualnya yang jauh lebih murah. Di samping penurunan jumlah pengusaha juga makin langka tenaga kerja trampil dalam pematikan.

Bagaimana pendapatan para tenaga kerja di dua industri tersebut? Para tenaga kerja/ karyawan di perhotelan pada umumnya telah mencapai di atas UMP (Upah Minimum Propinsi) Yogyakarta. Apalagi untuk pendapatan tenaga kerja di hotel-hotel berbintang sebagian telah di atas satu juta rupiah. Sebaliknya di industri kerajinan batik, kebanyakan upah para tenaga kerja/ buruhnya masih di bawah UMP. Pendapatan yang rendah ini yang antara lain membuat kurang menarik minat generasi muda untuk mengikuti pendahulu-pendahulu mereka.

Dalam perspektif sosial-kependudukan, kualitas tenaga kerja dalam industri perhotelan memang berbeda dengan di industri batik. Dalam industri perhotelan tenaga kerja yang digunakan umumnya tenaga kerja usia produktif, sebagian besar perempuan. Umumnya tenaga kerja yang digunakan berpendidikan, meskipun hanya sekolah umum SLTP dan SLTA. Hanya untuk hotel berbintang telah mampu memanfaatkan tenaga kerja yang berasal dari pendidikan perhotelan. Sedangkan untuk hotel non-bintang (melati) umumnya masih menggunakan tenaga kerja dari sekolah umum dan hanya tingkat SLTP dan SLTA. Hal tersebut

disebabkan antara lain masih adanya anggapan bahwa pekerjaan di perhotelan hanya seperti pekerjaan rumah tangga tidak perlu memiliki latar belakang pendidikan perhotelan yang lebih profesional. Sehingga akibatnya pelayanan yang diberikan belum memenuhi standar yang baik dan kurang memuaskan tamu.

Dalam industri kerajinan batik tenaga kerja yang digunakan kebanyakan tenaga kerja yang sudah kurang produktif, yaitu pada usia di atas 50 tahun, kebanyakan tenaga kerja perempuan khusus untuk pematikan dan laki-laki untuk pengecapan dan pewarnaan. Hal ini disebabkan karena regenerasi dalam tenaga batik ini sangat lambat atau bahkan semakin terputus. Umumnya pendidikan mereka sangat rendah hanya SD ke bawah, karena memang pekerjaan tidak menuntut pendidikan yang tinggi. Sedangkan teknologi yang digunakan tetap menggunakan teknologi tradisional (*canting*) dan teknologi sederhana (*cap-capan*) yang hanya memanfaatkan ketrampilan tangan. Oleh karena itu, bagi generasi mudanya yang berpendidikan tinggi serta menginginkan pendapatan yang lebih baik tidak tertarik lagi bekerja di industri batik. Makin tuanya tenaga kerja menyebabkan produktivitasnya makin menurun. Dengan demikian kualitas tenaga kerja di pematikan ini cenderung makin menurun, sehubungan dengan pendidikannya yang rendah, produktivitas yang makin menurun karena usia serta teknologi yang digunakan tetap hanya menggunakan teknologi tradisional.

Dalam perspektif sosial, dalam pengembangan usaha dan peningkatan kualitas tenaga kerja industri pariwisata terutama perhotelan, telah lama terjalin jaringan sosial antar lembaga-lembaga yang ada di Yogyakarta. Jaringan kerjasama tersebut baik antar lembaga swasta maupun antara lembaga swasta dan lembaga pemerintah (dinas-dinas pemerintah daerah). Jaringan kerjasama tersebut yang menyebabkan pengembangan usaha dan tenaga kerja di industri perhotelan lebih baik daripada di industri kerajinan batik. Lembaga-lembaga swasta (koperasi batik) dan lembaga pemerintah yang mestinya membina usaha dan meningkatkan kualitas tenaga kerja batik, termasuk teknologi dan desainnya justru akhir-akhir ini makin menurun peranannya.

Selanjutnya dalam perspektif budaya, sebetulnya masyarakat Yogyakarta kaya nilai-nilai budaya yang dapat dikembangkan untuk menunjang peningkatan kualitas tenaga kerja baik di industri perhotelan maupun kerajinan batik. Namun banyak nilai-nilai budaya tersebut yang telah ditinggalkan oleh para generasi mudanya termasuk oleh mereka

yang berkecimpung di bidang pelayanan seperti di perhotelan. Hal ini terutama sangat nampak di hotel-hotel non-bintang, banyak perilaku pelayanan yang dilakukan oleh tenaga kerja/karyawannya yang kurang memuaskan para wisatawan. Kemudian di industri kerajinan batik menurunnya peminat tenaga kerja yang mau bekerja di pematikan, di samping pendapatan yang sudah tidak menjanjikan, juga hilangnya nilai-nilai pengabdian dalam pematikan dan hilangnya pemahaman tentang makna nilai-nilai luhur dari hasil karya batik yang *adiluhung*, di mana selama ini menjadi kebanggaan orang-orang tua pendahulu mereka.

Dalam penyiapan tenaga kerja di industri pariwisata, terutama di industri perhotelan di Yogyakarta telah banyak lembaga-lembaga pendidikan dari tingkat SMK, BLK sampai perguruan tinggi yang ikut menyiapkan calon-calon tenaga profesional di perhotelan. Namun kelemahannya ada beberapa lembaga pendidikan yang mengalami kesulitan dalam melakukan kegiatan praktik bagi para anak didiknya, karena masih kurangnya kerjasama dengan pihak calon pengguna. Di samping itu, masih banyak hotel-hotel non-bintang yang belum berani menerima lulusan lembaga pendidikan perhotelan, karena takut mereka akan menuntut jabatan dan upah yang tinggi. Sedangkan di kerajinan batik, tenaga kerja yang selama ini masih menggunakan teknologi tradisional disiapkan secara turun-menurun dari generasi ke generasi berikutnya dan pelatihan di perusahaan. Sayang regenerasi dan pelatihan ini akhir-akhir ini sudah tidak berlangsung karena rendahnya animo generasi muda untuk menjadi tenaga kerja di pematikan. Sebagai akibat pekerjaan di kerajinan batik kurang menjanjikan dalam hal pendapatan dan status pekerjaannya. Oleh karena itu, prospek selanjutnya usaha batik ini perlu dipertanyakan, mengingat lembaga-lembaga yang berkecimpung dalam pengembangan usaha batik di Yogyakarta, seperti Balai Penelitian Batik, Koperasi Batik dll makin kurang nampak perannya.

Dalam konteks apa yang telah dikemukakan di atas, buku ini merupakan sebuah upaya menggambarkan kompleksitas permasalahan ketenagakerjaan di industri pariwisata di Daerah Istimewa Yogyakarta, khususnya tentang kualitas tenaga kerja di industri perhotelan dan industri kerajinan batik. Dalam pembahasan disajikan dalam perspektif ekonomi, sosial penduduk dan sosial budaya.

Jakarta, Agustus 2003

◡ BAGIAN KEDUA :

KUALITAS TENAGA KERJA INDUSTRI PARIWISATA DI YOGYAKARTA : Dalam Perspektif Ekonomi Oleh : YB. Widodo

Pendahuluan	37
Peranan Industri Pariwisata dalam Perekonomian Daerah	39
Kelembagaan dalam Industri Pariwisata	44
<i>Interaksi antar lembaga</i>	46
<i>Peran koperasi batik</i>	48
Profesionalisme Tenaga Kerja Pariwisata	50
<i>Perkembangan usaha batik</i>	51
<i>Usaha perhotelan/penginapan</i>	53
<i>Peluang dan tantangan pasar industri pariwisata</i>	56
<i>Menumbuhkan citra daerah pariwisata</i>	57
Penutup	59
Daftar Pustaka	60

◡ BAGIAN KETIGA :

KUALITAS TENAGA KERJA DI INDUSTRI PERHOTELAN DAN KERAJINAN BATIK DI YOGYAKARTA : Dalam Perspektif Kependudukan Oleh : Daliyo

Pendahuluan	61
Karakteristik Sosial-Demografi Tenaga Kerja	66
<i>Umur dan jenis kelamin tenaga kerja</i>	66
<i>Daerah asal dan mobilitas tenaga kerja</i>	68
<i>Lapangan dan jenis pekerjaan</i>	69
<i>Lama kerja tenaga kerja</i>	70
<i>Alasan memilih pekerjaan</i>	71
<i>Pendapatan tenaga kerja dan pengaruhnya terhadap kualitas tenaga kerja</i>	72
Mobilitas Pekerjaan Tenaga Kerja	73
<i>Alasan pindah pekerjaan</i>	74
<i>Rekrutmen tenaga kerja</i>	74
<i>Pekerjaan sebelumnya terkait dengan pariwisata</i>	75
Kualitas Tenaga Kerja dan Penyiapan Tenaga Kerja	75
<i>Fasilitas pendidikan pariwisata dan penyiapan tenaga kerja</i>	76

DAFTAR TABEL

TABEL 1.1.	Persentase Penduduk 10 Tahu Ke atas Menurut Lapangan Usaha Utama, Tahun 2000	12
TABEL 2.1.	Peranan Sektor Ekonomi Terhadap PDRB Provinsi DIY: Atas Dasar Harga Konstan 1993, Tahun 1996-2000 (Persen)	42
TABEL 2.2.	Tenaga Kerja dan PDRB Provinsi DIY Menurut Lapangan Usaha, Tahun 2000 (Persen)	43

BAGIAN PERTAMA

KETENAGAKERJAAN DAN INDUSTRI PARIWISATA DI YOGYAKARTA:

Peluang dan Tantangan Otonomi Daerah dan Globalisasi

Laila Nagib

Pendahuluan

Dalam GBHN 1999-2004, salah satu arah kebijakan pembangunan ekonomi, menekankan pada pengembangan perekonomian yang berorientasi global dengan memperhatikan keunggulan komparatif sesuai dengan kompetensi dari produk unggulan di setiap wilayah (RI, PROPENAS, 2000). Industri pariwisata merupakan salah satu produk andalan yang diharapkan dapat memberikan sumbangan devisa besar setelah sektor non-migas, sehingga diharapkan dapat membantu pemulihan ekonomi pasca krisis. Dilihat dari perannya dalam menyumbang devisa bagi perekonomian Indonesia, sampai tahun 1993 industri pariwisata berhasil menempati posisi ketiga dari sektor non-migas (setelah tekstil dan kayu). Di beberapa daerah (termasuk di Yogyakarta), kegiatan industri pariwisata merupakan sektor unggulan

bagi perkembangan ekonomi daerah, baik dalam menyumbang PAD maupun menyediakan lapangan pekerjaan melalui sektor terkait.

Industri pariwisata merupakan sektor andalan dalam pertumbuhan ekonomi, karenanya berperan strategis dalam menangani permasalahan ekonomi maupun sosial. Kegiatan pariwisata di suatu wilayah biasanya bergerak cepat dan dinamis dan memiliki *multiplier effect* yang cukup besar terhadap perkembangan sektor lainnya, terutama sector perindustrian, perdagangan, tenaga kerja dan pendidikan. Hal ini berarti dapat mendorong penciptaan lapangan kerja di berbagai sektor perekonomian. Di sisi lain kegiatan pariwisata juga sangat rentan dan rapuh terhadap berbagai isu dan kejadian baik bidang keamanan, kesehatan maupun lingkungan hidup. Demikian pula dampak terhadap perkembangan ekonomi masih sering diperdebatkan, karena berdampak positif apabila dilihat dalam batas pertumbuhan ekonomi, namun potensial menimbulkan dominasi elit dan marginalisasi masyarakat lokal, sebagai akibat adanya ketimpangan dalam distribusi kekayaan (Abdullah dkk., 2002). Demikian pula dari berbagai kajian tentang pariwisata di negeri berkembang, banyak devisa yang justru kembali ke negara maju melalui berbagai pemilikan jaringan perusahaan seperti hotel, transport dan sebagainya. Dari perspektif sosial, kegiatan pariwisata juga potensial menimbulkan berbagai penyimpangan sosial seperti penggusuran, eksploitasi sex dan penyimpangan lain yang bertentangan dengan nilai budaya setempat (Sugiantoro, 2000).

Dalam era globalisasi, di mana batas daerah/negara makin tidak relevan, maka industri pariwisata berpeluang memperluas pasar baik domestik maupun global, yang berarti potensial memperluas kesempatan kerja di lokasi tujuan wisata. Namun demikian globalisasi yang sarat dengan persaingan yang tidak seimbang, menjadi tantangan bagi dunia pariwisata Indonesia untuk serius meningkatkan kualitas produk, agar berdaya saing tinggi di pasar domestik maupun global. Apabila pariwisata menjadi sektor unggulan di suatu wilayah, maka wilayah tersebut harus memiliki potensi yang dominan dan keunikan karakteristik dalam perekonomian, sehingga mampu meningkatkan daya saing produk baik di tingkat regional maupun internasional.

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sebagai salah satu tujuan penting wisata sesudah Bali dan Jakarta, memiliki potensi budaya dan nilai historis yang layak dikemas untuk menopang perkembangan industri pariwisata. Namun wilayah DIY di mana selama ini dikenal miskin SDA, namun kaya SDM, juga menghadapi tantangan dan peluang, sehingga

perlu upaya serius dalam pengembangan industri pariwisata secara terencana dan kreatif, agar dapat memenuhi tuntutan pasar pariwisata. Dengan diefektifkannya otonomi daerah (OTDA) melalui UU No 22 dan 25 tahun 1999, pemerintah daerah memiliki wewenang dan tanggung jawab yang lebih besar, baik dalam memanfaatkan potensi daerah maupun mengatasi tantangan yang dihadapi dalam pembangunan wilayahnya. Sebagai potensi andalan dalam pembangunan daerah, industri pariwisata di Yogyakarta, mempunyai peluang besar untuk memperluas kesempatan kerja, namun sekaligus menghadapi tantangan dalam memanfaatkan dan meningkatkan kualitas tenaga kerja, menuju profesionalisme yang berdaya saing tinggi, baik di pasar domestik maupun global.

Sesudah Bali, citra Yogyakarta sebagai kota tujuan wisata cukup tinggi. Akibat krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1997, jumlah kunjungan wisatawan ke DIY pada tahun 1998 menurun drastis, yaitu sekitar 44 persen, kemudian meningkat kembali sejak tahun 1999 (Bappeda, DIY, draft). Untuk mempercepat pulihnya kegiatan wisata di DIY, sejak tahun 2000 Yogyakarta kembali bangkit dengan tema: *Jogja: Never Ending Asia*. Namun demikian kegiatan pariwisata Yogyakarta terutama berkaitan dengan wisatawan mancanegara (wisman), tergantung dengan pariwisata daerah lain, terutama Bali dan Jakarta. Keterkaitan tersebut berpengaruh positif dan negatif terhadap perkembangan pariwisata Yogyakarta. Positif, karena adanya paket wisata (wisman) ke Yogyakarta yang tercakup dalam rangkaian paket nasional khususnya Bali dan Jakarta yang relatif lebih maju dari Yogyakarta. Sebaliknya keterkaitan ini akan berdampak negatif apabila salah satu daerah mengalami permasalahan keamanan, yang merupakan faktor terpenting dalam perkembangan kegiatan pariwisata. Sebagai contoh kasus tragedi Mei 1998 dan kasus bom yang terjadi di Legian-Bali akhir-akhir ini, sangat berpengaruh terhadap dunia pariwisata Indonesia, termasuk DI. Yogyakarta, yang selama ini dikenal sebagai daerah yang relatif aman dan nyaman.

Bagian ini menyajikan gambaran umum tentang industri pariwisata di Daerah Istimewa Yogyakarta, terutama yang berkaitan dengan bidang ketenagakerjaan. Penekanan tulisan pada arah dan kebijakan pengembangan industri pariwisata, terutama dalam kaitan dengan penyediaan kesempatan kerja dan peningkatan kualitas tenaga kerja. Bagian ini juga dilengkapi dengan isu-isu yang berkaitan dengan peluang dan tantangan dalam perspektif OTDA dan globalisasi. Bahan untuk analisis deskripsi pada bagian ini diperoleh dari hasil penelitian

lapangan, terutama data kualitatif dan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber, seperti BPS, Bappeda dan instansi terkait serta *review* tulisan sejenis.

Gambaran Umum Industri Pariwisata

Wilayah DIY yang luasnya sekitar 3.185.80 km² mempunyai potensi yang sangat besar dalam pengembangan pariwisata. Dengan modal budaya Jawa yang masih kuat, kondisi alam yang beragam dan sebagai pusat pendidikan di Indonesia, Yogyakarta berpotensi mengembangkan berbagai jenis pariwisata, seperti wisata budaya, wisata alam dan wisata minat khusus. Meskipun potensi pariwisata DIY tersebar di semua wilayah Daerah Tingkat II, namun perkembangan pariwisata berbeda untuk masing-masing daerah. Kota Yogyakarta sebagai ibukota propinsi merupakan pusat kegiatan pariwisata DIY, karena didukung oleh berbagai fasilitas dan kemudahan untuk kegiatan pariwisata.

Sejarah pariwisata

Sejarah pariwisata DIY, tidak terlepas dari sejarah kepariwisataan nasional yang mulai serius dikelola setelah kemerdekaan RI. Terbatasnya sumber-sumber tertulis tentang sejarah pariwisata DIY, maka sulit memperkirakan kapan sebenarnya pariwisata di DIY dimulai. Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan beberapa narasumber di lapangan, kegiatan pariwisata di DI Yogyakarta sudah berlangsung lama, bersamaan dengan makin strategisnya peran wilayah ini dalam kancah perjuangan menuju kemerdekaan RI. Pada era penjajahan Belanda, yaitu sekitar tahun 1935, orang-orang Belanda sudah mengenal obyek wisata Candi Borobudur dan Prambanan. Sedangkan Keraton baru dibenahi pada waktu Sultan Hamengku Buwono (HB) VIII pulang dari pendidikan di negeri Belanda, yaitu sekitar tahun 1917. Namun sebagai obyek turis, keraton baru dibuka secara bertahap pada era raja-raja berikutnya (HB IX dan HB X). Dari keraton inilah budaya Jawa banyak dikenal, juga melalui buku-buku dalam Bahasa Belanda yang belum banyak diterjemahkan. Yogyakarta selama ini juga dianggap sebagai pusat kebudayaan Jawa (*Center of Javanese Culture*), karena raja masih aktif dan tradisi Jawa masih kuat dijalankan baik di lingkungan keraton maupun di kalangan masyarakat lokal, sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari.

kepariwisataan milik swasta cenderung mengalami kelesuan, kecuali di Jakarta karena mendapat dukungan dari Gubernur Ali Sadikin.

Pada awal pemerintahan Orde Baru tahun 1966, dibentuk Lembaga Pariwisata Nasional (LPN), kemudian tahun 1969 fungsi LPN dilebur di bawah Departemen Perhubungan, dengan status Direktorat Jenderal. Bersamaan dengan perubahan status tersebut, pemerintah mendirikan Badan Pembimbing Kepariwisata Nasional di bawah koordinasi Sri Sultan Hamengku Buwono IX dengan anggotanya adalah para menteri dari sektor terkait. Perhatian yang besar dari Sultan Hamengku Buwono IX pada perkembangan pariwisata nasional, juga telah mengantarkan DIY menjadi daerah pariwisata yang makin dikenal baik nasional maupun internasional. Hal ini juga telah mendorong banyak pengusaha batik yang pada tahun 1970an mengalami kesulitan berusaha di DIY, ramai-ramai beralih usaha ke sektor perhotelan atau sektor lain yang terkait dengan kepariwisataan. Akibatnya kawasan seperti Pawirotaman kini menjadi konsentrasi turis mancanegara, dengan fasilitas pendukung yang lengkap sesuai dengan kebutuhan wisman (hotel, restoran, travel biro, toko *souvenir*, *money changer* dan fasilitas lainnya). Di sepanjang jalan di Kawasan Pawirotaman kini tercatat terdapat sekitar 35 hotel atau losmen atau rumah inap, dan sekitar 75 persennya berasal dari rumah pengusaha batik yang disulap jadi akomodasi untuk turis. Kebanyakan tamu di kawasan ini adalah wisatawan asing, yang kemudian berdampak pada tumbuhnya berbagai lapangan usaha bagi penduduk di sekitarnya (termasuk pemandu, becak, ojek, wartel/warnet dan penterjemah).

Perkembangan pariwisata selanjutnya di DIY tidak lepas dari kepedulian dan dukungan Sultan HB X, dengan menjadikan industri pariwisata sebagai salah satu andalan pembangunan daerah. Komitmennya dalam pelestarian dan pengembangan budaya Jawa menjadi kekuatan atau kekhasan kepariwisataan Yogyakarta. Hal ini terlihat dari upaya kerasnya mengembalikan kegiatan pariwisata DIY dari keterpurukan akibat krisis ekonomi tahun 1997 antara lain dengan mencetuskan *brand image: Jogja Never Ending Asia* pada tahun 2000. Pembangunan *brand image* ini dengan tujuan: “untuk menarik, memberikan kepuasan dan mempertahankan pedagang, wisatawan, investor, pembangun, organisir dari seluruh dunia untuk tetap berada di Yogyakarta” (tanpa judul, 2001: 25).

Pemulihan kegiatan pariwisata DIY sejak tahun 1999 (lihat BPS, 2001), terganggu lagi dengan beberapa isu negatif dan peristiwa tragedi Bom Bali pada 12 Oktober 2002, yang banyak menewaskan wisman dari

Australia. Dunia pariwisata Indonesia kembali terpuruk, tidak hanya Bali, namun juga daerah lainnya termasuk DIY. Pasca bom Bali, diperkirakan pengunjung wisman di DIY menurun sekitar 75 persen, termasuk pembatalan berbagai pertemuan internasional yang sedianya diadakan di Kota Yogyakarta (MI, Nopember, 2002). Rentannya dunia pariwisata menuntut upaya keras pemerintah untuk mengembalikan citra keamanan Indonesia di mata dunia internasional, baik melalui KBRI maupun media lainnya. Tragedi Bali bukan saja telah menghancurkan dunia pariwisata, tetapi juga dunia usaha Indonesia, karena berkaitan dengan citra Indonesia di pasar global. Diperkirakan beberapa target kegiatan pariwisata DIY, seperti tahun *recovery* (2002) dan tahun kebangkitan pariwisata DIY (2003), akan terganggu dengan peristiwa tersebut. Hal ini akan berpengaruh juga terhadap berbagai usaha kecil terkait dengan kepariwisataan yang banyak tersebar di wilayah DIY, yang banyak menghasilkan barang-barang seperti batik, kerajinan dari kulit, perak, keramik dari Kasongan dan mainan gamelan. Namun secara keseluruhan, dunia pariwisata Yogyakarta masih tertolong dengan adanya turis domestik yang merupakan mayoritas pendatang ke DIY. Dari sekitar 34 obyek wisata di DIY, sekitar 94 persen pengunjung adalah wisnus (BPS, 2002). Hal ini berbeda dengan Bali di mana kegiatan pariwisata sebagai andalan hidup masyarakat Bali, terutama dari banyaknya kunjungan wisman. ke Pulau Dewata tersebut.

Potensi dan persebaran wisata

Berdasarkan analisis potensi wilayah, pariwisata budaya merupakan salah satu komoditas unggulan daerah yang mendukung pembangunan DIY (Bappeda DIY, draft 2002). Pariwisata DIY masih bertumpu pada pariwisata budaya, sejarah dan pendidikan, dengan obyek wisata utama adalah keraton, candi, museum dan perguruan tinggi. Padahal dilihat potensi wilayah DIY, obyek wisata lainnya adalah wisata alam dan minat khusus, yang tersebar di semua wilayah Propinsi DIY. Demikian pula melihat animo belanja wisatawan yang berkunjung ke Yogyakarta terutama barang-barang souvenir seperti batik, perak dan barang kerajinan lain, maka tampaknya wisata belanja juga merupakan alternatif wisata, dengan sentral belanja di Kota Yogyakarta khususnya Jalan Malioboro (Artha, 2000).

Pada saat ini di seluruh DIY terdapat sekitar 80 obyek wisata, diantaranya sekitar 46 buah merupakan wisata budaya, 4 buah obyek wisata agro, selebihnya merupakan wisata alam dan minat khusus. Hampir semua wilayah di DIY memiliki potensi untuk perkembangan

pariwisata, namun berbeda ragam dan fasilitas serta akses pendukungnya. Adapun persebaran potensi wisata di masing-masing daerah sebagai berikut:

1. Kota Yogyakarta, memiliki berbagai obyek wisata seperti keraton, museum, kebun binatang dan hasil kerajinan (terutama batik dan perak). Demikian pula faktor pendukung wisata seperti hotel (berbintang dan melati), restoran, transportasi, komunikasi, lembaga perbankan dan sarana pendidikan pada umumnya lebih terkonsentrasi di Kota Yogya dan Kabupaten Sleman, dibandingkan wilayah lainnya.
2. Kabupaten Sleman (sekitar 9 km dari kota), memiliki potensi obyek wisata terbanyak terutama untuk wisata budaya dan alam seperti Candi Prambanan, wisata gunung, dengan fasilitas pendukung seperti hotel berbintang (Ambarukmo, Sahid dan Puri Arta), hotel Melati, transportasi dan komunikasi serta fasilitas lainnya.
3. Kabupaten Bantul (sekitar 12 km dari kota), memiliki potensi obyek wisata pantai (Parangtritis dan Samas), makam Raja Imogiri dan kerajinan (keramik, kulit), namun dukungan fasilitas terutama perhotelan relatif kurang. Karena lokasi ke kota dekat dan lancar, pada umumnya wisatawan datang ke Bantul dan bermalam di hotel-hotel Yogyakarta.
4. Kabupaten Gunung Kidul (sekitar 30 km dari kota), memiliki potensi wisata pantai (Pantai Baron dan Kekep). Namun demikian untuk mencapai obyek wisata dengan lokasi terjauh dari kota, kurang didukung fasilitas yang memadai (transport, akomodasi dan sebagainya).
5. Kabupaten Kulon Progo (sekitar 25 km dari kota), juga memiliki potensi wisata seperti Pantai Glagah, Sedang Sono, Gua Keskendo, Waduk Sermo dan kerajinan anyaman agel. Namun selain lokasinya relatif jauh dari Kota Yogyakarta, obyek wisata ini belum digarap secara baik dan kurang mendapat dukungan fasilitas yang memadai, sehingga belum dikenal luas.

Menurut RIPPD DIY jumlah semua obyek dan daya tarik wisata (ODTW) yang sudah diidentifikasi sebanyak 139 buah yaitu 62 sudah berkembang, 46 sedang berkembang dan sisanya 31 belum berkembang (Dinas Pariwisata, DIY dan PUSPAR UGM, 1999: 17). Wilayah yang paling banyak memiliki ODTW yang sudah dan sedang berkembang adalah Kota Yogyakarta, sedangkan yang paling sedikit adalah Kulon Progo dan Gunung Kidul. Meskipun demikian wilayah Gunung Kidul sangat potensial untuk perkembangan ke depan, karena paling banyak memiliki ODTW

yang sedang dan belum berkembang yaitu 31 ODTW, sementara Kulon Progo hanya memiliki 10 ODTW.

Berdasarkan laporan tahun 1999-2000 (BPS, DIY.,2001:264), jumlah pengunjung ke DIY mengalami kenaikan selama 1999-2000, dan kenaikan jumlah yang cukup mencolok adalah wisman. Dari segi jumlah obyek wisata, Kabupaten Sleman tercatat memiliki obyek wisata terbanyak (15 buah) dan Kota Yogyakarta paling sedikit (3 buah). Sedangkan jumlah pengunjung terbanyak pada tahun 2000, untuk wisatawan nusantara (wisnus) adalah ke Kabupaten Sleman, sedangkan wisman terbanyak berkunjung ke Kabupaten Bantul. Dibandingkan tahun sebelumnya (1999) terdapat pergeseran daerah yang dikunjungi wisman, yaitu dari Kota Yogyakarta ke Bantul (meningkat hampir 13 kali lipat). Sedangkan wisnus yang sebelumnya banyak berkunjung ke Bantul, pada tahun 2000 bergeser ke Sleman (lihat Lampiran 1).

Pemasaran obyek wisata di DIY banyak dilakukan oleh agen wisata dan hotel yang banyak terkonsentrasi di Kota Yogyakarta. Akibatnya meskipun kunjungan wisatawan tersebar ke semua wilayah, Kota Yogyakarta banyak mengambil keuntungan dari kegiatan pariwisata di daerah-daerah lainnya (akomodasi, transpor, restoran dan sebagainya). Sedangkan daerah-daerah tujuan wisatawan memperoleh keuntungan dari hasil belanja berbagai barang/jasa di daerah tersebut khususnya hasil kerajinan.

Obyek wisata budaya di DIY yang telah dikenal luas oleh wisatawan terutama dari mancanegara (wisman) adalah Candi Borobudur, Candi Prambanan dan Keraton. Obyek wisata budaya lainnya adalah Makam Raja-raja, Tamansari, Patilasan, Kelompok Seni, Cagar Budaya dan Museum. Dengan mengunjungi keraton, banyak kegiatan yang berkaitan dengan budaya Jawa seperti upacara terkait dengan adat istiadat, tari-tarian, seni batik dan museum. Masih banyak disimpan di perpustakaan keraton, berbagai buku tentang adat istiadat Jawa dalam Bahasa Belanda dan Jawa. Budaya Jawa juga dapat dikenal melalui kelompok masyarakat di Yogyakarta seperti kelompok pengusaha batik, penari, petani, sanggar dan puri. Selain obyek wisata tersebut, pariwisata DI Yogyakarta juga sedang mengembangkan *Desa Wisata* sebagai obyek wisata baru, dengan mengutamakan penyajian keaslian desa seperti makanan, perumahan, kehidupan masyarakat, dan tata pemerintahannya. Pada saat ini terdapat tiga desa wisata yang sedang dikembangkan, yaitu Desa Banyur di Kecamatan Tanjung (Kabupaten Sleman) dan Desa Tembi di Kecamatan Sewon (Kabupaten Bantul). Dusun Krebet yang lokasinya berdekatan dengan Kasongan di Kabupaten Bantul,

sedang dikembangkan menjadi obyek wisata untuk minat khusus yaitu pengembangan topeng yang dihias dengan lukisan batik. Pengembangan desa wisata yang berbasis masyarakat ini dimaksudkan untuk meningkatkan kepedulian dan partisipasi masyarakat dalam bidang pariwisata. Pengunjung desa wisata umumnya wisman dari Eropa, yang jarang menikmati keaslian pedesaan daerah tropis. Bahkan salah satu obyek wisata desa yang sudah berjalan 4 tahun yaitu Desa Tambi dirintis oleh seorang WNA dari PT Out of Asia yang bekerja sama dengan LKMD setempat dalam mengelola kerajinan dari anyaman pandan. Di samping itu PT tersebut juga menjadi pengumpul barang-barang kerajinan yang dikemas sesuai dengan permintaan pasar global.

Sarana dan prasarana pendukung

Kegiatan pariwisata merupakan kegiatan lintas sektoral yang memerlukan sarana dan prasarana pendukung untuk pengembangannya. Secara umum DIY memiliki berbagai fasilitas pendukung pariwisata yang cukup memadai, yaitu sekitar 400 hotel (362 hotel non-bintang), berbagai fasilitas rumah makan, toko-toko cinderamata/ souvenir, sekitar 80 biro perjalanan, bank, wartel dan puluhan *money changer*. Biro perjalanan tertua adalah PT Nitour yang berlokasi di Jalan Malioboro dan PT Ramatour yang terutama melayani turis Jepang. Biro-biro perjalanan yang umumnya berada di Kota Yogyakarta kebanyakan masih merupakan cabang dari biro perjalanan di Bali dan Jakarta, sehingga sulit untuk berhubungan langsung dengan pihak konsumen di luar negeri. Meskipun potensi obyek wisata tersebar di semua wilayah Dati II di DIY, namun terdapat ketimpangan fasilitas dan akses yang dimiliki daerah untuk melayani wisatawan. Sarana dan prasarana pendukung kegiatan pariwisata di DIY seperti hotel, restoran, transportasi dan komunikasi masih terpusat di Kota Yogyakarta, Bantul dan Sleman. Sedangkan di daerah lainnya seperti Kabupaten Gunung Kidul dan Kulon Progo masih sangat terbatas. Data tentang perbandingan fasilitas akomodasi di wilayah DIY menunjukkan daerah Kulon Progo paling minim fasilitasnya. Sedangkan Kota Yogyakarta memiliki fasilitas akomodasi yang paling banyak dan lengkap baik hotel berbintang maupun hotel melati di bandingkan daerah Dati II lainnya (BPS, DIY, 2001) Akibatnya terjadi ketimpangan dalam pelayanan turis antara Kota Yogyakarta, Bantul dan Sleman di satu sisi dengan wilayah-wilayah lainnya, yaitu Gunung Kidul dan Kulonprogo.

Untuk wilayah Bantul yang lokasinya berdekatan dengan Kota Yogyakarta dan transportasi relatif lancar, kekurangan fasilitas

akomodasi tidak terlalu menjadi masalah, karena para turis dengan mudah dapat kembali dan menginap di Kota Yogyakarta. Namun untuk daerah Gunung Kidul dan Kulon Progo yang relatif jauh, tanpa fasilitas pendukung yang memadai, akan menghambat perkembangan potensi yang ada karena relatif jarang dikunjungi turis. Fasilitas pendukung yang diperlukan turis dan disesuaikan dengan kemampuan daerah, dapat meningkatkan daya tarik daerah sehingga dapat menahan turis lebih lama di daerah tersebut. Secara keseluruhan rata-rata menginap turis masih relatif rendah, yaitu wisman 3, 53 hari dan wisnus 2,32. Demikian pula tingkat hunian hotel yang baru mencapai sekitar 34 persen dan 33 persen masing-masing untuk hotel berbintang dan non-bintang (BPS, DIY, 2001).

Meskipun DIY merupakan kota tujuan turis kedua sesudah Bali dan Jakarta, namun sampai sekarang DIY belum memiliki bandar udara internasional, sehingga kunjungan wisman ke DIY umumnya hanya untuk transit sebagai limpahan turis dari Bali dan Jakarta. Sedangkan airport internasional yang dibangun di Surakarta, belum optimal pemanfaatannya, karena tidak dapat dipergunakan sebagai landasan pesawat besar. Upaya untuk menjadikan Bandara Adisucipto sebagai bandar udara internasional sampai sekarang sulit dicapai, baik karena masalah internal (keterbatasan lahan) maupun alasan politis.

Kondisi penduduk dan ketenagakerjaan

Berdasarkan hasil registrasi penduduk tahun 2000, jumlah penduduk Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sekitar 3,3 juta orang, di antaranya sekitar 51 persen adalah perempuan. Kepadatan penduduk sekitar 1.034 orang per km², dan sangat bervariasi antar daerah. Wilayah terpadat adalah Kota Yogyakarta (sekitar 15.000 orang per km²) dan kepadatan terendah adalah Kabupaten Gunung Kidul (sekitar 500 orang per km²). Dibandingkan penduduk daerah Pulau Jawa lainnya, pertumbuhan penduduk di DIY relatif rendah (sekitar 0,72 persen pada tahun 2000, dengan pertumbuhan tertinggi di Sleman (sekitar 1,5 persen) dan terendah Kota Yogyakarta (sekitar - 0,4 persen). Pertambahan penduduk yang relatif tinggi di Sleman, lebih disebabkan oleh migrasi masuk, terutama untuk melanjutkan sekolah. Sebagai kota yang dikenal sebagai kota pendidikan, setiap tahun banyak pendatang dari berbagai daerah untuk melanjutkan ke Perguruan Tinggi (PT).. Sampai tahun 1994/1995 Yogyakarta memiliki 4 buah PT negeri, 55 PT swasta dan 3 PT kedinasan, dengan proporsi terbesar mahasiswa ditampung di UGM (Dinas Pariwisata Kodya Yogyakarta, 1999: II-7).

Lapangan pekerjaan utama di DIY yang banyak menyerap tenaga kerja pada tahun 1999 masih tetap sama dengan keadaan sebelumnya (1990) yaitu pertanian, jasa, perdagangan dan industri. Namun demikian selama kurun waktu tersebut (1990-1999) terjadi pergeseran lapangan pekerjaan utama dari sektor primer (pertanian) yang mengalami penurunan sekitar 14 persen ke sektor tersier (perdagangan, keuangan dan jasa) dan sektor sekunder (industri pengolahan) yang mengalami kenaikan masing-masing sekitar 15 persen dan kurang dari 1 persen (BPS, DIY, draft). Berdasarkan data terakhir (tahun 2000), tingkat pengangguran terbuka sekitar 2,3 persen, sekitar 2 di antara 3 orang penganggur berpendidikan SLTA. Seperti daerah lainnya, lowongan kerja yang tercatat jauh lebih rendah daripada pencari kerja (sekitar 8 persen). Biasanya lowongan pekerjaan merupakan permintaan tenaga kerja yang terdaftar di Disnaker DIY (tidak termasuk pekerjaan informal). Berdasarkan data statistik tahun 2000, kegiatan penduduk DIY terbanyak di sektor pertanian (sekitar 40 persen), perdagangan (sekitar 19 persen), Jasa (sekitar 13 persen) dan industri pengolahan (13 persen) (Tabel 1.1).

Tabel 1.1.
Persentase Penduduk 10 Tahun Ke atas
Menurut Lapangan Usaha, Tahun 2000

No	Lapangan Usaha	Persen
1	Pertanian	43,31
2	Pertambangan dan Pengegalian	0,29
3	Industri pengolahan	12,95
4	Listrik, gas dan air	0,07
5	Bangunan	6,18
6	Perdagangan	18,78
7	Angkutan	3,64
8	Keuangan	1,67
9	Jasa	13,12
	Jumlah	100,00

Sumber: BPS, DIY, 2000.

Untuk mengetahui jumlah angkatan kerja yang terlibat di sektor kepariwisataan, tidak tersedia data yang pasti. Hal ini disebabkan kegiatan kepariwisataan merupakan kegiatan lintas sektoral, sehingga

beberapa lapangan usaha antara lain sektor jasa, perdagangan, industri pengolahan, dan angkutan, merupakan sektor yang erat terkait dengan kegiatan kepariwisataan. Berdasarkan asumsi tersebut, sekitar separuh angkatan kerja juga terlibat pada lapangan usaha yang berkaitan dengan kegiatan pariwisata di DIY (Tabel 1.1). Proporsi ini mungkin bertambah, karena banyak mahasiswa yang di samping kuliah juga terlibat bekerja di berbagai sektor yang terkait dengan kepariwisataan seperti pemandu wisata, penterjemah, pendidikan dan organisasi masyarakat (dalam statistik termasuk bukan angkatan kerja). Demikian pula banyak anggota masyarakat yang terlibat dalam pekerjaan informal yang berkaitan langsung dengan pariwisata seperti tukang ojek, becak, dan pedagang-pedagang kaki lima.

Kondisi ekonomi dan industri jasa pariwisata

Perkembangan ekonomi suatu wilayah biasanya dinilai dari pertumbuhan PDRB yang bersumber dari berbagai sektor. Industri jasa pariwisata DIY merupakan salah satu sektor unggulan, karena memberi sumbangan yang berarti bagi pembangunan wilayah, baik dari segi penyerapan tenaga kerja maupun sumbangan terhadap PDRB. Namun demikian seperti pada penyerapan tenaga kerja, tidak mudah untuk memisahkan kontribusi pariwisata terhadap PDRB dari sektor-sektor terkait lainnya. Hal ini berarti data yang pasti tentang sumbangan sektor jasa pariwisata terhadap PDRB DIY, juga tidak tersedia. Namun karena kegiatan pariwisata bersifat multisektoral, maka secara makro semua sektor ekonomi yang menyumbang PDRB, juga berkaitan dengan pariwisata. Beberapa sektor ekonomi yang dianggap terkait dengan kegiatan pariwisata antara lain sektor pertanian, perdagangan, jasa, industri pengolahan. Secara langsung kegiatan pariwisata sangat terkait dengan jasa dan perdagangan seperti hotel dan restoran, hiburan dan rekreasi, angkutan, industri berbagai souvenir, keuangan dan jasa lainnya di sector informal. Usaha menengah ke bawah termasuk pedagang kaki lima berperan besar dalam memberi kontribusi terhadap PAD (Pendapatan Asli Daerah) Kota Yogyakarta.

Akibat krisis ekonomi, semua sektor usaha mengalami penurunan, sehingga tahun 1997-1998 pertumbuhan sektor lapangan usaha sekitar minus 11 persen, termasuk sektor yang berkaitan dengan kegiatan kepariwisataan, yaitu jasa dan perdagangan, namun sejak tahun 1999 kembali meningkat meskipun kecil (sekitar 1 persen) (PDRB Propinsi DIY, 2000). Data tahun 2000 menunjukkan bahwa berdasarkan harga konstan 1993, pertumbuhan PDRB per kapita pada tahun 2000

mengalami peningkatan sekitar 3 persen. Kontribusi tertinggi dari peningkatan ini terjadi pada sektor jasa (sekitar 20 persen), perdagangan (sekitar 16 persen), sektor industri (sekitar 13 persen) dan sektor transportasi (di atas 10 persen). Oleh karena sektor-sektor ini terkait erat dengan kegiatan pariwisata, dan kunjungan wisatawan juga mengalami kenaikan pesat pada tahun tersebut (khususnya wisman), maka dapat dipastikan adanya peran penting sektor jasa pariwisata dalam sumbangan terhadap PDRB daerah. Berdasarkan data perbandingan PDRB menurut daerah, menunjukkan perkembangan PDRB tertinggi tetap pada Yogyakarta dan Sleman, sedangkan terendah adalah Kulon Progo (BPS, DIY, 2001: 551). Sumbangan PAD dari sector perdagangan relatif besar terutama di Kodya Yogya dan Sleman. Malioboro sebagai 'mitos' tetap dipertahankan bagi kegiatan pariwisata, baik domestik maupun global. Malioboro masih mempunyai daya tarik tinggi bagi wisatawan, khususnya untuk wisata belanja, sehingga menguntungkan masyarakat Yogyakarta terutama yang berdagang di sepanjang Jalan Malioboro (seperti warung makanan lesehan dan berbagai toko *souvenir*). Masa puncak wisatawan adalah bulan Juni - Juli untuk wisnus (masa libur dan ajaran baru/UMPTN) dan untuk wisman dua kali setahun yaitu Juli/Agustus dan Desember/ Januari. Demikian pula munculnya banyak *home-stay* di Jalan Kaliurang, karena permintaan yang meningkat dari wisman dari berbagai negara terutama Asia. *Souvenir* yang banyak diminati oleh wisman adalah batik, barang seni dan kerajinan perak dari Kotagede. Sumbangan pariwisata terhadap sektor pertanian belum banyak digarap, kecuali yang sudah dikenal luas adalah salak pondoh dari Sleman. Tetapi secara keseluruhan Yogyakarta yang sumber ekonominya relatif terbatas, kegiatan pariwisata dapat diandalkan sebagai 'jantung ekonomi' dari wilayah tersebut.

Sumbangan PDRB dari sektor industri relatif kecil, karena sekitar 90 persen merupakan industri kecil menengah (UKM), dan banyak diantara pengelola UKM adalah pendatang dari luar Yogya. Sektor angkutan terkait erat dengan kegiatan pariwisata, baik yang langsung berkaitan dengan angkutan untuk wisatawan maupun angkutan yang melancarkan kegiatan pasar. Apabila kegiatan pariwisata menurun, maka PAD yang bersumber dari kegiatan masyarakat di kota (Yogyakarta dan Sleman) sangat terpengaruh. Hal ini terlihat dari meningkatnya PAD pada bulan-bulan puncak kunjungan wisatawan yaitu liburan sekolah (wisnus) dan wisman antara bulan Juli dan Januari, terutama dari Jepang, Korea, Singapore, Belanda, Jerman dan Australia. Sebagai

kota pelajar dengan fasilitas pendidikan yang lengkap, Yogyakarta dan Sleman selalu ramai dikunjungi pelajar dan mahasiswa dari berbagai penjuru tanah air, terutama pada masa libur sekolah dan permulaan tahun ajaran baru. Hal ini bahkan mendorong beberapa pengusaha hotel untuk menyediakan hotel /kamar khusus untuk wisnus pada masa liburan sekolah. Kunjungan wisnus secara periodik ini juga berdampak pada daerah-daerah lainnya, terutama yang potensial sebagai daerah penghasil kerajinan seperti Bantul. Sumbangan PAD juga berasal dari ekspor barang jadi terutama pakaian jadi, mebel kayu, dan kulit yang mencapai sekitar 75 persen dari nilai ekspor ke berbagai negara. Kegiatan ekspor akan makin berkembang dengan kegiatan pariwisata, khususnya apabila kunjungan wisman dapat ditingkatkan.

Kondisi sosial budaya dan industri jasa pariwisata

Kondisi sosial budaya masyarakat di suatu wilayah merupakan faktor penting dalam menunjang perkembangan pariwisata di wilayah tersebut. Salah satu daya penarik pariwisata di DIY adalah wisata budaya, yang berarti diperlukan kemampuan untuk mengemas berbagai aset budaya yang dimiliki, sehingga dapat memenuhi permintaan pasar baik lokal maupun global. Namun tidak kalah pentingnya adalah sikap kepedulian masyarakat setempat terhadap perkembangan pariwisata di daerahnya, sehingga dapat menerima pariwisata sebagai bagian dari kehidupan masyarakat di daerahnya. Kondisi sosial budaya masyarakat dapat dilihat dari struktur masyarakat dan keterlibatan masyarakat dalam berbagai kegiatan kepariwisataan, baik di tingkat penyusunan paket-paket pariwisata dan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan yang terkait dengan pariwisata. Sebaliknya dari sisi perkembangan sosial budaya, kegiatan pariwisata juga merupakan tantangan bagi masyarakat untuk mengadakan inovasi atau penyesuaian sehingga paket-paket budaya dapat memenuhi tuntutan pasar pariwisata.

Struktur masyarakat DI Yogyakarta tergolong heterogen, karena sebagian penduduknya adalah para pelajar dan mahasiswa yang berasal berbagai etnis dan daerah asal. Hal ini memungkinkan timbulnya sikap kurang peduli terhadap *image* kota tempat tinggal 'sementara' mereka. Pada masyarakat yang relatif heterogen ini, juga memungkinkan dukungan terhadap kegiatan pariwisata lebih beragam atau sulit untuk menciptakan sikap '*tourism minded*', seperti di Bali yang struktur masyarakatnya relatif homogen. Bagi sebagian besar masyarakat Bali, peran pariwisata dalam kehidupan mereka merupakan 'hidup dan mati', sehingga kehidupan ritual sehari-hari masyarakat Bali dapat dikemas

dengan baik dan siap 'dijual' untuk kemajuan industri pariwisata. Secara singkat dapat dikatakan Bali memiliki 3 syarat utama untuk perkembangan pariwisata yaitu produk, pasar dan SDM. Sedangkan Yogyakarta baru memiliki produk dan pasar, namun SDM masih terbatas pada pelaku langsung kegiatan pariwisata. Bagi masyarakat yang umumnya lebih plural dari segi etnis, agama dan daerah asal, kegiatan pariwisata sebagai bagian dari kehidupan saja. Bahkan sebagian kecil seniman di Yogyakarta masih mempunyai hambatan budaya dan menganggap pengembangan pariwisata sebagai pelacuran budaya (*cultural prostitution*). Hal tersebut dapat mempengaruhi animo masyarakat dalam mendukung kegiatan pariwisata.

Meskipun masyarakat Kota Yogya tergolong heterogen karena banyak pendatang, namun kebudayaan Jawa masih kuat dilaksanakan oleh masyarakat lokal dengan keraton sebagai setral kebudayaan Jawa dan Sri Sultan sebagai tokoh sentral dalam menjaga kelestariannya. Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat masih sarat dengan nuansa tradisional, termasuk penerapan berbagai upacara yang menandai perjalanan hidup seseorang. Demikian pula pola perilaku sebagian besar masyarakat Yogyakarta tidak lepas dari pemahaman falsafah Jawa, yang dalam pergaulan tampak sebagai perilaku sopan-santun, menjaga perasaan orang lain, sampai dengan penggunaan Bahasa Jawa sesuai dengan tingkat status sosialnya. Budaya Jawa di lingkungan keraton lebih menonjol penerapannya dan sangat dijaga kelestariannya, sehingga tidaklah berlebihan apabila Yogyakarta dikenal sebagai pusat dari kebudayaan Jawa.

Dalam perkembangan pariwisata di Yogyakarta, sejalan dengan tuntutan pasar, diperlukan ekspose kebudayaan Jawa yang lebih terbuka, terutama di lingkungan keraton, namun dengan tetap menjaga kesakralan dan kelestariannya. Sedangkan bagi wisatawan peminat khusus dapat mendalami budaya Jawa melalui berbagai cara seperti perpustakaan keraton, museum, mengikuti upacara-upacara agung dengan pemandu khusus keraton dan mempelajari berbagai tarian Jawa, termasuk tarian khusus yang selama ini dilakukan bersamaan dengan upacara-upacara agung di keraton.

Sebagian dari masyarakat Yogyakarta adalah pendatang yang diterima secara baik oleh masyarakat lokal yang umumnya sebagai petani dan priyayi. Bagi masyarakat lokal setiap pendatang yang tinggal di Yogyakarta dianggap rakyat Yogya yang berhak mendapat pengayoman yang sama dari Sultan Yogyakarta (tidak ada diskriminasi antara pendatang dan asli). Sebelum tahun 1990 an, masyarakat

Yogyakarta bersikap masa bodoh terhadap pendatang, yang penting 'Yogya maju'. Namun sesudah tahun 1990-an, masyarakat asli makin terdesak dan menyadari bahwa makin banyak aset ekonomi yang terjual pada pendatang yang umumnya lebih sukses. Dalam memenuhi tuntutan pasar pariwisata, para pendatang yang umumnya pengusaha lebih siap melakukan berbagai inovasi dalam hasil kerajinan mereka, sehingga lebih mampu memenuhi tuntutan pasar. Sebagai contoh seni batik sekarang berkembang lebih modern baik bahan, motif maupun warnanya. Inovasi yang mencolok adalah berkembangnya teknologi *batik cap* dan *printing* sesuai dengan tuntutan pasar. Akibatnya batik tradisional (*batik tulis*) Yogya makin berkurang, karena pasarnya makin terbatas. Wisman cenderung lebih menyukai batik printing atau batik cap yang dipasarkan sebagai barang-barang souvenir daripada batik sebagai kain tradisional. Namun demikian sebagai pusat budaya Jawa, Yogyakarta masih memiliki tradisi-tradisi yang tetap dipertahankan dan dilestarikan, dengan keraton sebagai simbol pertahanan budaya. Meskipun kini keraton dalam batas tertentu dibuka untuk keperluan pariwisata, namun kesakralan dalam berbagai upacara tradisi tetap dilestarikan.

Otonomi Daerah, Kebijakan Pariwisata dan Ketenagakerjaan

Seperti dijelaskan di muka, secara nasional Indonesia berpotensi untuk menempatkan industri pariwisata sebagai salah satu produk unggulan di sektor non-migas. Bidang pariwisata yang terkait dengan berbagai sektor (*cross sectoral*), cenderung dapat diandalkan sebagai sumber devisa, sekaligus dapat memperluas kesempatan kerja di berbagai sektor, yang diharapkan dapat membantu pemulihan ekonomi pasca krisis. Dilihat dari kegiatan pariwisata nasional selama ini, Yogyakarta termasuk salah satu tujuan wisata penting, sesudah Bali dan Jakarta. Selama ini, kegiatan pariwisata merupakan kegiatan sektoral yang sentralistik, sehingga kurang efisien dalam pelaksanaannya, karena banyak perencanaan pembangunan sektoral yang kurang sesuai dengan prioritas unggulan masing-masing wilayah. Meskipun dengan OTDA kewenangan pengaturan kebijaksanaan pariwisata lebih pada daerah masing-masing, namun harus tetap mengacu pada program nasional pariwisata, antara lain Program Nasional Peduli Rakyat. Program ini juga menjadi tantangan utama pariwisata DIY untuk melibatkan seluruh komponen masyarakat dalam pengembangan kepariwisataan di seluruh wilayah DIY.

Meskipun DIY menempati posisi ketiga sebagai daerah tujuan pariwisata nasional, namun dalam berbagai kebijaksanaan penyusunan paket wisata (terutama untuk wisman) masih tergantung pada daerah lain terutama Bali dan Jakarta. Keadaan ini berdampak kurangnya kemandirian DIY dalam pengembangan bidang pariwisata, karena banyak paket wisata ke DIY yang dikuasai pelaku wisata di Bali dan Jakarta. Keadaan ini dapat berdampak positif dan negatif terhadap perkembangan industri pariwisata di DIY. Dunia pariwisata yang rentan terhadap gejolak sosial politik, juga menempatkan DIY pada situasi yang dilematis, meskipun selama ini DIY relatif aman dari gangguan sosial politik. Beberapa kejadian nasional yang berdampak negatif terhadap kegiatan pariwisata di DIY antara lain :

- Peristiwa Mei 1997, yang diikuti dengan krisis multidimensional sangat berpengaruh terhadap merosotnya kunjungan wisatawan baik domestik maupun wisman.
- Kerusuhan-kerusuhan dan konflik sosial-politik yang terjadi di berbagai daerah dan diekspos secara nasional dan internasional, meskipun tidak pernah terjadi di Yogyakarta.
- Pernyataan Mantan PM Singapore (Lee Kuan Yu), bahwa Indonesia sebagai sarang teroris yang dimuat di majalah internasional Time, sehingga masyarakat internasional terprovokasi untuk menghindari Indonesia sebagai tujuan wisata. Hal ini berdampak pada tersendatnya pemulihan kegiatan pariwisata baik nasional maupun untuk DIY.
- Dimanfaatkannya isu Yogyakarta sebagai pusat markas Laskar Jihad beberapa waktu yang lalu oleh pelaku pariwisata nasional dan internasional, sehingga mengurangi animo kunjungan wisatawan ke DIY.
- Tragedi Bali pada bulan Oktober 2002, yang secara langsung berdampak pada makin terpuruknya dunia pariwisata nasional dan lokal. Dampak yang langsung dirasakan DIY adalah dibatalkannya beberapa konferensi internasional yang diperkirakan telah menurunkan kunjungan wisman sekitar 75 persen.

Akibat tragedi bom Bali, dampak yang dirasakan dunia pariwisata DIY memang tidak sehebat Bali, karena wisatawan di DIY masih didominasi wisnus. Namun karena selama ini paket wisata untuk wisman di DIY banyak terkait dengan paket wisata ke Bali dan Jakarta, maka gangguan di suatu daerah wisata, akan dirasakan dampaknya oleh daerah lainnya, terutama dalam hal pemasukan devisa. Keterkaitan DIY dengan daerah lain juga ditunjang dengan terbatasnya prasarana

dan sarana yang dimiliki DIY, seperti Bandara Udara Adisucipto yang belum bertaraf internasional. Hal ini berdampak pada kunjungan wisman ke DIY yang umumnya hanya transit, karena merupakan limpahan turis dari Bali dan/atau Jakarta. Akibatnya kunjungan wisman ke DIY yang diatur oleh agen perjalanan di Bali/Jakarta, umumnya hanya mengikuti paket tour sehari dengan tujuan obyek wisata budaya yang sudah baku yaitu Candi Borobudur, Prambanan dan Keraton. Meskipun inspirator dari kegiatan pariwisata DIY adalah agen perjalanan, namun hampir semua agen perjalanan di DIY terkait dengan agen perjalanan di daerah wisata Bali dan Jakarta. Hal ini sejalan dengan sejarah pariwisata nasional, yang diawali dengan penunjukan agen perjalanan tertentu sehingga memiliki hak monopoli pengaturan wisatawan ke berbagai tujuan wisata. Posisi yang kurang menguntungkan ini, diharapkan dapat dieliminir pada era OTDA, karena banyak fungsi sektoral yang kini menjadi wewenang pemerintah daerah, termasuk kegiatan bidang pariwisata dan sektor terkait sebagai pendukungnya.

Kebijakan pariwisata dan pembangunan daerah

Sejalan dengan semangat penerapan undang-undang yang berkaitan dengan pelaksanaan OTDA (UU No 22 dan NO 25 tahun 1999) , maka kewenangan pemerintah daerah dalam menyusun kebijaksanaan pembangunan daerah kini lebih besar daripada era sebelumnya. Namun sesuai dengan peraturan yang berkaitan dengan OTDA, kewenangan lebih banyak pada Daerah Tingkat II. Sedangkan kewenangan Dinas Pariwisata Tingkat I justru makin berkurang, bahkan terbatas pada membantu daerah dalam pembinaan dan promosi pariwisata baik di dalam maupun luar negeri.

Dalam rangka otonomi daerah, pendekatan pembangunan diarahkan pada sistem program terpadu dan tersinergi sesuai dengan kebutuhan wilayah sebagai ganti dari sistem yang sentralistik sektoral pada era Orde Baru. Pengembangan industri pariwisata merupakan salah satu bagian penting dari rencana pembangunan daerah DIY. Hal ini dapat dilihat dari rencana pembangunan DIY untuk 5 tahun ke depan, yaitu draft PROPEDA DIY 2001-2005 (Bappeda DIY, draft: 27-28), di mana salah satu penekanan visi dan misi pembangunan daerah adalah aspek pariwisata. Berikut ini petikan dari visi dan misi pembangunan regional DIY yang menunjukkan posisi kebijakan pariwisata dalam pembangunan daerah.

Visi pembangunan DIY yaitu :

‘Terwujudnya Pembangunan Regional sebagai wahana menuju pada kondisi DIY pada tahun 2020 sebagai pusat pendidikan, budaya dan daerah tujuan wisata terkemuka dalam lingkungan masyarakat yang maju, mandiri, sejahtera lahir dan batin didukung oleh nilai-nilai kejuangan dan pemerintah yang bersih dalam pemerintahan yang baik dengan mengembangkan Ketahanan Sosial Budaya dan sumberdaya berkelanjutan’.

Berdasarkan visi tersebut, salah satu misi pembangunan yang berkaitan langsung dengan pengembangan pariwisata adalah :

‘Menjadikan DIY sebagai daerah tujuan utama wisata MICE (Meeting, Incentive, Conference and Exhibition) di Indonesia dan sekaligus mengembalikan posisi DIY sebagai daerah tujuan wisata kedua setelah Bali, yang didukung posisi DIY sebagai simpul strategis dan penting dalam perhubungan dan komunikasi di Pulau Jawa’.

Dalam rencana program pembangunan daerah, bidang pariwisata diandalkan sebagai salah satu pemulihan ketahanan ekonomi daerah, di samping beberapa bidang lain seperti industri, perdagangan dan pertanian dalam arti luas. Dengan potensi pariwisata yang dimiliki oleh setiap wilayah di DIY, pariwisata dapat berfungsi sebagai salah satu elemen pengembangan wilayah tersebut, bahkan berperan penting dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di DIY. Hal ini terbukti dengan banyaknya sektor terkait yang mengalami kemerosotan, sebagai dampak menurunnya jumlah wisatawan ke DIY. Oleh karena itu, hal terpenting yang harus diupayakan di bidang pariwisata adalah meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan ke Yogyakarta. Untuk mengakomodasi perkembangan permintaan pasar pariwisata dan potensi produk wisata di setiap Dati II, maka ditetapkan 3 kawasan pengembangan pariwisata daerah (KPPD) yaitu bagian utara untuk wisata alam, bagian tengah untuk wisata budaya dan bagian selatan yang merupakan wilayah pantai selatan Yogyakarta. Penetapan ketiga wilayah pengembangan berdasarkan pertimbangan berbagai aspek baik fisik maupun non-fisik (Dinas Pariwisata DIY dan PUSPAR UGM, 1999).

Adapun strategi pengembangan kepariwisataan DIY berdasarkan kawasan pengembangan dijabarkan dalam 8 komponen yang meliputi:

1. Komponen obyek dan daya tarik wisata (ODTWA).
2. Komponen akomodasi terutama dengan inventarissi dan pemberdayaan hotel melati, *home-stay* dan pondok wisata sehingga keberadaan akomodasi sesuai dengan kebutuhan wisatawan.
3. Komponen sarana dan prasarana transportasi pariwisata (kuantitatif dan kualitatif).
4. Komponen SDM sehingga dapat mengisi lowongan yang tersedia, meningkatkan standar kompetensi pelayanan pariwisata dan mampu menjaga citra kepariwisataan DIY.
5. Komponen kelembagaan, agar kelompok masyarakat menengah ke bawah ikut berpartisipasi dalam kelembagaan pariwisata.
6. Komponen fasilitas penunjang untuk meningkatkan pelayanan wisatawan.
7. Komponen promosi dan pemasaran.
8. Komponen lingkungan.

Komponen-komponen tersebut saling berkaitan, sehingga diperlukan kebijakan yang tersinergi dan terpadu, untuk memperoleh hasil yang optimal. Untuk melaksanakan program sesuai dengan arah kebijakan pariwisata tersebut, maka diperlukan koordinasi antar sektor terkait yang mengacu pada keberhasilan industri pariwisata secara komprehensif.

Kebijakan ketenagakerjaan di bidang kepariwisataan

Menurunnya laju pertumbuhan ekonomi DIY akibat krisis, telah meningkatkan pengangguran dari sekitar 2,5 persen pada tahun 1990 menjadi 4,7 pada tahun 1999. Sedangkan setengah pengangguran mengalami penurunan dari sekitar 39,7 persen menjadi sekitar 35 persen. Krisis ekonomi juga telah menurunkan kesempatan kerja formal dan meningkatkan kesempatan berusaha informal. Kondisi demikian mendorong pemerintah DIY untuk menentukan kebijakan pembangunan yang dapat diandalkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi sekaligus memperluas kesempatan kerja. Pengembangan pariwisata DIY selama ini sebagai salah satu sektor andalan di DIY, terbukti telah berperan penting dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, yang merupakan modal dalam perluasan kesempatan kerja. Kegiatan pariwisata yang merupakan kegiatan *cross sectoral* juga mempunyai efek ganda terhadap perkembangan sektor-sektor lainnya, sehingga

dapat menggerakkan roda perekonomian dan potensial membuka lapangan kerja sektoral. Meskipun demikian masih banyak potensi wilayah yang belum berkembang, karena berbagai kendala internal maupun eksternal.

Tekad pemerintah DIY untuk menjadikan wilayahnya sebagai daerah tujuan utama wisata di Indonesia diharapkan mampu meningkatkan PAD dan kesejahteraan masyarakat. Untuk mencapai kondisi tersebut salah satu komitmen yang ingin dicapai dalam kaitan dengan bidang ketenagakerjaan adalah pemberdayaan ekonomi kerakyatan. Untuk itu diperlukan suatu perencanaan kebijaksanaan pengembangan pariwisata, yang dapat mengarahkan program sehingga berhasil guna seperti yang diharapkan. Beberapa parameter yang digunakan saat ini untuk mengukur keberhasilan pengembangan pariwisata antara lain: pemasukan devisa, jumlah wisatawan, lama tinggal, jumlah belanja dan penciptaan lapangan kerja dan usaha (Dinas Pariwisata dan PUSPAR UGM, 1999).

Kesempatan kerja

Kesempatan kerja dan berusaha di DIY didominasi oleh sektor-sektor informal terutama sekitar ekonomi rakyat. Sedangkan untuk menyediakan kesempatan kerja yang lebih luas dan merata belum dapat diwujudkan sampai sekarang, terutama di sektor formal yang membutuhkan kualifikasi yang sesuai dengan kebutuhan. Keadaan ini menyebabkan pengangguran meningkat khususnya di kalangan terdidik (SLTA dan Perguruan Tinggi) (BPS, DIY, 2001).

Seperti disebutkan di muka bidang ketenagakerjaan merupakan aspek penting dalam kegiatan kepariwisataan, baik yang menyangkut perluasan kesempatan kerja maupun peningkatan kualitas tenaga kerja. Meskipun terdapat kesulitan dalam menghitung jumlah kesempatan kerja kegiatan pariwisata, namun tidak dapat disangkal bahwa kesempatan kerja yang tercipta dari kegiatan pariwisata sangat luas, baik yang langsung sebagai pelaku pariwisata, maupun lapangan usaha dari sector-sektor terkait. Dominannya sektor tersier dalam struktur lapangan usaha di DIY (seperti perdagangan, pengangkutan dan komunikasi, keuangan dan jasa), menunjukkan bahwa bidang pariwisata telah berperan penting dalam penyerapan tenaga kerja selama ini. Kebijakan yang telah disusun dalam RIPPDA DIY sampai tahun 2018, merencanakan peningkatan penyerapan tenaga kerja di DIY dari sektor pariwisata sebesar 1.009.840 pada tahun 2018.

Kualitas sumber daya manusia

Dalam era globalisasi di mana persaingan usaha semakin ketat, dibutuhkan SDM yang dapat bekerja secara professional. Meskipun DIY memiliki banyak SDM yang relatif berkualitas, namun kondisi SDM pada institusi manajemen dan masyarakat yang terkait dengan pariwisata belum menunjukkan kinerja yang professional. Hal ini berkaitan dengan kondisi SDM baik kuantitas dan kualitas pada lembaga pemerintah (Dinas Pariwisata Tingkat I dan II) dan lembaga swasta. Pada lembaga swasta mencakup semua tenaga kerja yang berkaitan dengan bidang usaha jasa pariwisata (biro/agen perjalanan wisata, jasa pramuwisata dan jasa konsultan pariwisata), kelompok usaha obyek dan daya tarik wisata dan usaha sarana wisata (seperti hotel, restoran, transportasi, dan rekreasi dan hiburan) dan kelompok pemikir atau pengembang pariwisata. Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Pariwisata Kodya Yogyakarta (1999:III-25), hampir semua karyawan di Dinas Pariwisata DIY (96 orang) berpendidikan bukan bidang kepariwisataan. Namun demikian banyak di antara karyawan yang berkesempatan meningkatkan pendidikan melalui kursus, pendidikan berjenjang dan diklat, walaupun lebih untuk kepentingan peningkatan karir dan jenjang kepegawaian.

Kondisi SDM pada lembaga swasta keparawisataan menunjukkan peningkatan jumlah sekitar 22 persen antara 1995 -1997, untuk semua kategori laki-laki dan perempuan, tenaga Indonesia maupun asing. Hal ini sejalan dengan peningkatan kunjungan wisata ke DIY sampai tahun 1997. Demikian pula dari sisi penyerapan tenaga kerja, SDM bidang pariwisata mampu menyerap tenaga kerja lebih banyak, yaitu mencapai sekitar 6000 orang pada periode 1993-1997. Jumlah penyerapan tenaga kerja diperkirakan jauh lebih besar, apabila termasuk tenaga kerja yang terlibat di usaha sektor non-formal. Namun dilihat dari segi kualitas SDM yang bekerja di sector swasta kepariwisataan, seperti pada sector pemerintah sebagian besar tidak berpendidikan pariwisata. Rata-rata berpendidikan umum atau kejuruan non-pariwisata, meskipun untuk SDM yang berpendidikan pariwisata menunjukkan peningkatan. Demikian pula jumlah dan kualitas pramuwisata mengalami perkembangan, namun belum dapat memenuhi kebutuhan wisman, terutama soal bahasa. Dari hasil penelitian di lapangan kelemahan SDM pariwisata terutama pada kesiapan pihak birokrasi sebagai pelaku kebijakan pariwisata DIY. Hal ini disebabkan adanya perubahan wewenang dan fungsi akibat penerapan OTDA, masalah eselonisasi serta pergantian jabatan dan pimpinan, yang menyebabkan banyak pejabat kurang menguasai permasalahan pariwisata. Sedangkan di kalangan

kelembagaan swasta, pada umumnya merasa cukup siap memiliki SDM pariwisata untuk menyongsong perkembangan pariwisata di daerahnya, terutama dalam bidang akomodasi, penyediaan atraksi dan pelayanan turis lainnya. Namun demikian mereka merasa masih perlu meningkatkan kualitas SDM agar dapat berkompetisi baik dengan Bali maupun pihak luar negeri. Sedangkan untuk mengantisipasi merosotnya kunjungan wisman ke DIY maupun Indonesia secara keseluruhan dianggap sebagai kelemahan peran *public relation*, sehingga gagal dalam mengkonter berbagai isu negatif tentang Indonesia. Demikian juga masih lemahnya peran KBRI dalam membantu promosi pariwisata daerah, sehingga wawasan wisman terbatas pada daerah-daerah tertentu yang sudah mapan. Peran pemerintah (Departemen Pariwisata) sangat penting dalam menghadapi permasalahan global yang berdampak terhadap pariwisata nasional. Demikian pula pemerintah diharapkan berlaku bijak dalam mengatasi dampak tragedi Bali, tanpa merugikan daerah pariwisata lainnya.

Melihat fasilitas sarana pendidikan pariwisata yang berada di Yogyakarta, kemampuan SDM pariwisata masih dapat ditingkatkan. Melihat kondisi SDM pada umumnya di bidang kepariwisataan, maka untuk meningkatkan profesionalisme bidang kepariwisataan RIPPD DIY telah merumuskan kebijaksanaan tentang SDM sebagai berikut:

‘Mengembangkan SDM dengan meningkatkan keterkaitan dan kesepadanan pendidikan pariwisata dengan peluang kerja sektor pariwisata, meningkatkan standar kompetensi SDM pelayanan pariwisata, pembinaan dan pengembangan SDM diarahkan pada sikap mental pelaku pariwisata terutama dalam pelayanan sehingga mampu menjaga citra kepariwisataan DIY’. (Bappeda DIY, draft:54).

Untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut perlu peningkatan SDM birokrasi terkait dengan melakukan kerjasama pada lembaga-lembaga pendidikan yang terkait dengan permasalahan pariwisata. Hal ini telah mulai dirintis dengan penyusunan RIPPD DIY yang bekerjasama dengan PUSPAR UGM. Lembaga pemikir pariwisata lainnya di Yogyakarta adalah STUPPA (Studio Perencanaan Pariwisata) yang telah banyak membantu pengembangan pariwisata DIY, terutama berkaitan dengan wisata konfensi.

Isu Pokok Ketenagakerjaan di Industri Pariwisata: Peluang dan Tantangan Global

Indonesia sebagai anggota APEC dan salah satu negara yang turut menandatangani perjanjian WTO pada tahun 1994, memastikan diri termasuk dalam arus globalisasi ekonomi atau sistim pasar bebas yang akan diberlakukan secara bertahap sebelum tahun 2020. Hal ini berarti Indonesia harus siap menerima semua konsekuensi dari ciri globalisasi ekonomi yaitu makin menipisnya batas antar negara (*borderless*) dalam berbagai kegiatan ekonomi, termasuk kegiatan pariwisata. Konsekuensi positif yaitu makin terbukanya pasar bagi perluasan usaha atau tenaga kerja antar negara, karena restriksi yang makin berkurang. Namun sebaliknya keterbukaan pasar ini juga sebagai tantangan yang tidak ringan karena adanya kompetisi yang makin ketat untuk memenangkan persaingan global (Thoha, ed., 2001).

Tantangan dunia pariwisata makin berat dengan kondisi sosial politik yang belum stabil, sehingga posisi daya saing Indonesia makin lemah baik di antara negara-negara Asean maupun Asia Pasifik. Suseno (internet, 2002) mengingatkan bahwa sistim Globalisasi yang lebih banyak menguntungkan negara kapitalis dengan kekuatan modal dan teknologinya, berpotensi mempersempit ruang untuk menciptakan keadilan pembangunan, terutama bagi kelompok masyarakat lemah yang kini makin membengkak akibat krisis. Kegiatan industri pariwisata dengan segala konsekuensinya akan bersentuhan dengan '*human being*', yang merupakan subyek dan obyek dari kegiatan pariwisata tersebut. Sebagai subyek berarti masyarakat setempat berperan sebagai pelaku yang dapat mendukung atau menghambat keberhasilan program pariwisata. Sebagai obyek, masyarakat akan menerima segala konsekuensi dari adanya kegiatan pariwisata di daerahnya, baik yang positif maupun negatif. Sebagai industri jasa, peran sumberdaya manusia sangat penting dalam perkembangan pariwisata, terutama di DIY yang dikenal miskin SDA namun kaya SDM yang relatif berkualitas (Tahajudin dan Susanto, 1996).

Industri pariwisata dilihat dari sifat kegiatannya tidak dapat mengabaikan pengaruh globalisasi, karena hasil kajian empiris menunjukkan dalam tiga dekade terakhir terjadi peningkatan kegiatan pariwisata di berbagai negara. Hal ini tidak terlepas dari kemajuan pesat dalam bidang teknologi informasi dan transportasi dalam skala global. Namun dalam bidang pariwisata, globalisasi juga dapat bermata ganda, di satu sisi sebagai peluang untuk memperluas pasar dan di sisi lain sebagai tantangan dalam menghadapi pesaing yang diberbagai segi

lebih siap untuk berkompetisi. Dengan makin tipisnya batas antar negara, maka peluang usaha jasa negara lain juga makin bebas keluar masuk ke Indonesia. Pariwisata Indonesia secara nasional akan menghadapi persaingan yang ketat dari negara lain yang sudah lebih berpengalaman. Analisis pada bagian ini terutama menekankan pada isu-isu pokok ketenagakerjaan terutama yang berkaitan dengan peluang kesempatan kerja maupun tantangan kualitas tenaga kerja dalam menghadapi perkembangan serta prospek Industri pariwisata DIY dalam era globalisasi.

Pariwisata dan peluang kesempatan kerja

Industri jasa pariwisata DIY telah berperan penting sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah. Hal ini berarti kegiatan pariwisata telah mendorong terciptanya kesempatan kerja baik langsung maupun tidak langsung terutama untuk sektor terkait. Namun demikian peran penting pariwisata ini kurang tercermin dalam perencanaan pembangunan daerah, sehingga perkembangan kegiatan sektoral masih sporadis dan belum tersinergi dalam mendukung kegiatan pariwisata DIY. Demikian pula perencanaan yang ada kurang berhasil dalam mengantisipasi perubahan global yang bersifat cepat dan dinamis. Meskipun wisman di DIY tidak dominan, turunnya jumlah wisman secara drastis akibat suatu hal yang kurang terantisipasi, dapat mengganggu kelangsungan kesempatan kerja di banyak sektor yang terkait dengan kegiatan pariwisata, terutama di sektor jasa perhotelan, transportasi dan berbagai industri kecil. Untuk mengatasinya perlu memperkuat peran pemerintah dalam mengantisipasi gangguan keamanan yang dapat menurunkan citra Indonesia di pasar global. Demikian pula peran KBRI di luar negeri perlu ditingkatkan terutama di bidang promosi dan *public relation* sehingga mampu mengantisipasi isu negatif yang merugikan dunia pariwisata Indonesia.

Keberhasilan industri pariwisata daerah dalam memperluas kesempatan kerja sangat tergantung dari posisi daya saing daerah tersebut baik secara domestik maupun internasional. Hal ini berarti setiap wilayah yang memastikan industri pariwisata sebagai sektor unggulan, harus mempunyai kemampuan daya saing dan keunikan karakteristik dalam perekonomian (Sugiantoro, 2001). Untuk meningkatkan daya saing industri pariwisata daerah, banyak faktor yang harus dipertimbangkan sehingga dapat menarik investor ke wilayah tersebut. Namun karena semua faktor pendukung untuk menarik investasi masih dalam kewenangan dan kebijakan pemerintah pusat,

maka upaya peningkatan daya saing regional akan optimal, apabila didukung oleh iklim yang kondusif di tingkat nasional. Kerentanan dunia pariwisata juga dipengaruhi oleh berbagai gejolak sosial politik yang dialami Indonesia beberapa tahun terakhir. Iklim yang tidak kondusif tersebut berpengaruh terhadap menurunnya posisi daya saing pariwisata baik nasional maupun daerah. Kelemahan pemerintah dalam mengantisipasi dan mengatasi permasalahan keamanan nasional maupun daerah, akan menyulitkan daerah dalam meningkatkan posisi daya saingnya, meskipun banyak upaya telah dilakukan untuk mengangkat citra pariwisata daerah (misalnya menciptakan *brand image*, menggalang hubungan bilateral, promosi dsb.).

Adanya ketimpangan pembangunan antar daerah di DIY, terutama Wilayah Tengah (Sleman, Kota Yogya dan Bantul) di satu sisi dan wilayah lainnya seperti Kulon Progo dan Gunung Kidul di sisi lain, tampaknya sejalan dengan perbedaan perkembangan pariwisata di wilayah-wilayah tersebut. Ketimpangan tersebut dipengaruhi adanya perbedaan potensi dan fasilitas pendukung yang dimiliki masing-masing wilayah DIY. Untuk mengurangi ketimpangan wilayah, diperlukan kesiapan masing-masing Daerah Tingkat II dalam melaksanakan OTDA, serta bantuan yang optimal bagi wilayah yang tertinggal. Untuk membantu mempercepat pembangunan wilayah yang tertinggal, diperlukan peran strategis Dinas Pariwisata Tingkat I, terutama dengan meningkatkan promosi pariwisata melalui penyelenggaraan atau memfasilitasi pameran industri atau unggulan wilayah lain baik di dalam maupun di luar negeri. Pemerintah daerah Tingkat I juga berperan dalam mengkoordinir dan mensinergikan kegiatan pariwisata secara terpadu antar Daerah Tingkat II, sehingga dapat menjadi kegiatan yang komplementer. Namun demikian Pemda TK I memiliki kendala dalam mengaplikasikan wewenangnya sesuai dengan OTDA, baik secara administratif maupun keterbatasan dana. Padahal keseimbangan kegiatan industri pariwisata diperlukan untuk wilayah DIY, agar penciptaan kesempatan kerja dapat lebih merata ke daerah, sekaligus mengurangi kekumuhan dan kota/wilayah yang menjadi konsentrasi wisatawan selama ini.

Strategi pengembangan industri pariwisata mencakup berbagai komponen yang saling berkaitan namun tetap dalam wewenang masing-masing sektor. Dalam pelaksanaan kebijakan tersebut diperlukan koordinasi untuk mensinergikan komponen-komponen tersebut menjadi suatu kegiatan yang terpadu mendukung perkembangan pariwisata DIY. Upaya meningkatkan koordinasi sektoral dan wilayah pembangunan DIY,

pemerintah daerah dengan kewenangan sesuai OTDA, menghadapi berbagai hambatan baik birokrasi, SDM, kultural maupun ketersediaan dana.

- Hambatan birokrasi internal DIY: antara lain kesiapan Daerah Tingkat II dalam rangka pelaksanaan OTDA seperti masalah perizinan, lisensi pemandu wisata, peningkatan kualitas SDM dan pendanaan.
- Hambatan SDM: terbatasnya kemampuan SDM birokrasi sebagai pelaku kebijaksanaan pariwisata untuk pengembangan pariwisata masing-masing wilayah pembangunan DIY.
- Hambatan kultural terutama dari kelompok masyarakat Yogya yang masih menganggap kemajuan pariwisata sebagai ancaman dari pelestarian budaya Jawa.
- Hambatan dana: terutama dalam pembinaan dan promosi wisata di dalam dan luar negeri yang seharusnya menjadi wewenang Dinas Pariwisata Tingkat I, namun sulit dilakukan, tanpa kecukupan dana yang dimiliki daerah.

Berdasarkan RIPPDI DIY, salah satu parameter keberhasilan kegiatan pariwisata adalah terciptanya lapangan kerja dan usaha. Parameter ini hanya mungkin berdaya guna apabila dilengkapi dengan konsep dan cara untuk mengetahui sektor-sektor yang tercakup dalam kegiatan pariwisata, baik langsung maupun tidak. Selama ini pengaruh kegiatan pariwisata terhadap peningkatan kesempatan kerja dan usaha hanya dapat diperkirakan berdasarkan penyerapan tenaga kerja di sektor yang berkaitan langsung dengan pariwisata, seperti perhotelan, pemandu wisata dan jasa yang langsung melayani wisatawan. Sedangkan dalam kenyataannya banyak kegiatan sektoral yang secara tidak langsung terkait dengan kegiatan pariwisata, namun sulit dipisahkan dari pengaruh kegiatan non-pariwisata. Untuk mengetahui pengaruh pariwisata dalam penciptaan lapangan kerja dan usaha pada semua sektor diperlukan konsep atau cara untuk memisahkannya dari faktor-faktor lain. Akibatnya keberhasilan pariwisata dalam menciptakan lapangan kerja dan usaha selama ini, cenderung *under reporting*, karena berdasarkan perkiraan kasar dari sektor yang terkait langsung dan cenderung mengabaikan pengaruh dari sektor lainnya.

Kesempatan kerja dan kesempatan berusaha di DIY masih didominasi oleh sektor-sektor informal yang umumnya sektor ekonomi rakyat. Sektor ini berhasil menyerap banyak tenaga kerja, namun sumbangan sektor tersebut dalam pertumbuhan ekonomi sangat

terbatas. Akibatnya penciptaan lapangan kerja terutama di sektor formal masih terbatas, sehingga pengangguran didominasi angkatan kerja yang relatif terdidik (2/3 penganggur berpendidikan SLTA). Adanya pergeseran pola pemerintahan baik di tingkat lokal (diefektifkannya OTDA) maupun tingkat nasional (dari sentralistik-eksploitatif ke desentralistik partisipatif), membutuhkan tenaga-tenaga terdidik, terampil dan berdedikasi untuk mengisi peluang kerja sesuai kebutuhan. Permasalahannya adalah apakah ada kesesuaian pencari kerja dengan peluang yang tersedia? Dengan kata lain apakah SDM yang relatif terdidik, selain 'siapa kerja' juga 'siapa pakai'?

Kualitas tenaga kerja di industri pariwisata : realitas dan tantangan

Menurut Porter dalam bukunya *'The Competitive Advantage of Nations'*, keunggulan kompetitif ditentukan oleh produktivitas sumberdaya manusia (SDM) suatu bangsa (dikutip oleh Sugiantoro, 2001). Dengan demikian tersedianya SDM yang berkualitas baik dari segi ilmu pengetahuan, ketrampilan maupun etos kerja, sangat penting dalam meningkatkan daya saing produk jasa pariwisata. Di era globalisasi peran keunggulan komparatif yang hanya mengandalkan input (buruh murah, sumberdaya alam dan modal), makin berkurang, dan bergeser pada peran keunggulan kompetitif yang lebih mencerminkan suatu pencapaian dalam efisiensi atau produktivitas tenaga kerja.

Faktor manusia mempunyai peran penting dalam menentukan daya saing pariwisata, baik sebagai pelaku wisata maupun sebagai pengambil manfaat dari kegiatan industri pariwisata di wilayahnya. Untuk mencapai posisi daya saing yang dibutuhkan bagi perkembangan pariwisata, diperlukan baik kemauan politik maupun kemauan action yaitu bekerja keras sesuai dengan visi dan misi yang ditentukan. Untuk itu dibutuhkan birokrasi dan politisi yang siap melahirkan kebijakan yang kondusif bagi peningkatan daya saing regional dan global. Demikian pula untuk pelaksanaan kegiatan, diperlukan tenaga kerja yang terampil dan siap kerja di bidangnya.

Dilihat dari potensi SDM, Yogyakarta dianggap memiliki kelebihan dalam ketersediaan SDM yang berkualitas dibandingkan daerah lain di Indonesia. Hal ini dapat dijadikan modal yang baik dalam mengelola potensi besar pariwisata di berbagai wilayah DIY. Namun dalam realitas kegiatan pariwisata DIY selama ini para pelaku pariwisata baik dari kalangan birokrasi maupun swasta, didukung oleh SDM yang kebanyakan bukan dari latar belakang pendidikan kepariwisataan. Untuk meningkatkan profesionalisme diperlukan tenaga-tenaga kerja yang

terdidik dan terlatih serta mempunyai etos kerja di bidangnya. Mengingat jumlah lulusan kejuruan terkait cukup tersedia di DIY, ketidaksesuaian pendidikan dengan dunia pekerjaan perlu dicermati, apakah karena masalah sistem pendidikan yang tidak sesuai dengan kebutuhan atau faktor lainnya. Demikian pula banyak pelaku dari birokrasi yang kurang memiliki kemauan politik dan komitmen yang jelas untuk perkembangan pariwisata, baik karena tidak kontinu menduduki posisi tersebut (akibat mutasi atau promosi jabatan).

Perubahan-perubahan besar yang terjadi, baik karena perubahan sistem pemerintahan terkait pelaksanaan OTDA, maupun pemberlakuan AFTA pada tahun 2003, memaksa pemerintah daerah mentransformasikan diri dari “*bureaucratic-monopolistic government*” menjadi *entrepreneurial competitive government* (Sugiantoro, 2001: xvi). Untuk itu diperlukan tenaga kerja birokrasi dengan kualifikasi yang cocok dengan kebutuhan seperti jeli melihat peluang, berpikir keras dan dapat mendorong terjadinya kompetisi dalam pelayanan publik. Dalam realitas, diefektifkannya OTDA telah menyebabkan terjadi perubahan-perubahan status dan jabatan. Akibatnya banyak pejabat baru yang kurang menguasai permasalahan yang berkaitan dengan kebijakan pariwisata, sehingga pekerjaan menjadi tidak efisien atau kurang terjadi inovasi dalam kegiatan pariwisata. Rendahnya kinerja birokrasi pelaku pariwisata juga dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan yang umumnya tidak terkait dengan bidang kepariwisataan (Bappeda DIY, draft).

Salah satu kelemahan pariwisata DIY adalah rendahnya kemampuan pelaku pariwisata dalam menahan wisman untuk tinggal lebih lama di DIY. Hal ini dipengaruhi oleh kemampuan pelaku dalam menentukan paket wisata yang masih tergantung pada daerah wisata Bali atau Jakarta. Kompleksnya permasalahan dalam pengembangan pariwisata, diperlukan pemikir-pemikir untuk menyusun perencanaan yang lebih cerdas di bidang pariwisata. Untuk itu diperlukan kerja sama yang lebih optimal antara birokrasi terkait dengan kelembagaan pemikir pariwisata (seperti Puspar UGM dan STUPA), terutama dalam melakukan terobosan dan inovasi yang dapat meningkatkan daya saing DIY.

Prospek pariwisata dalam era globalisasi

Prospek perkembangan pariwisata DIY dalam era globalisasi, dipengaruhi oleh berbagai faktor baik internal maupun eksternal. Secara internal, dengan menjadikan turisme sebagai komoditas unggulan dalam pembangunan wilayah DIY, maka pariwisata DIY diharapkan mampu

menjadi lokomotif dari perkembangan sektor lainnya, termasuk perdagangan dan investasi. Dalam bidang pariwisata DIY sudah memiliki modal yang cukup memadai terutama untuk tujuan wisata budaya. Meskipun DIY dianggap miskin SDA, namun memiliki kelebihan SDM yang merupakan modal utama dalam pengelolaan pariwisata. DIY juga memiliki berbagai obyek wisata yang telah/ siap dikembangkan serta sarana pendukung yang memadai untuk perluasan pasar baik regional maupun internasional. Dengan kekayaan yang dimiliki di bidang seni budaya, aneka macam industri kerajinan dan dukungan dari para pemikir pariwisata dan akademisi terkait, DIY siap melangkah untuk memiliki produk unggulan yang berdaya saing baik di tingkat lokal, regional maupun global. Dalam bingkai OTDA, di mana setiap daerah ingin berjuang untuk keunggulan daerahnya, DIY juga harus siap berjuang untuk menghadapi persaingan antar daerah, sehingga dapat terpilih sebagai daerah yang layak untuk investasi. Hal ini didukung oleh perubahan mendasar sistem pemerintahan yang memungkinkan daerah memiliki wewenang lebih besar. Faktor internal lainnya yang cukup strategis adalah peran Sri Sultan selaku Kepala Daerah Tingkat I yang mempunyai komitmen tinggi terhadap perkembangan pariwisata terutama yang berbasis komunitas. Peran sentral sebagai raja yang menguasai keraton dengan keunikan budaya Jawa, sangat penting artinya dalam mempertahankan salah satu keunggulan pariwisata DIY yaitu wisata budaya. Berbagai faktor positif tersebut merupakan modal yang sangat berharga untuk menghadapi berbagai tantangan internal, seperti kelemahan birokrasi, rendahnya kesadaran masyarakat serta keamanan lingkungan.

Untuk perkembangan pemasaran global, di mana batas negara semakin pudar, DIY telah menyiapkan perangkat untuk kemudahan investasi atau kerja sama dan kemitraan dengan daerah atau negara lain, dalam bentuk *sister city* atau *sister state*. Sejak tahun 1995 Kota Yogyakarta berhasil menjalin hubungan persahabatan dengan Kota Kyoto di Jepang (*sister city*), dengan California, AS dan dengan provinsi di Austria. Hubungan persahabatan dan kerja sama tersebut dapat dimanfaatkan untuk peningkatan kegiatan pariwisata. Kini upaya yang masih terus gigih dilakukan pemerintah daerah adalah meningkatkan Bandara Adisucipto menjadi bandara internasional, agar kunjungan wisman khususnya dari negara-negara Asia, tidak tergantung pada kegiatan pariwisata Bali dan Jakarta. Upaya ini masih terganjal oleh kondisi fisik bandara (tidak memungkinkan untuk pesawat besar) serta sulitnya kompromi dengan AURI sebagai pemilik bandara. Kendala lain

yang dihadapi industri pariwisata di DIY adalah masih rendahnya ‘sadar wisata’ dari masyarakat Yogyakarta yang relatif heterogen.

Faktor eksternal yang mempengaruhi perkembangan pariwisata daerah, yaitu kondisi sosial politik secara nasional. Banyak faktor eksternal yang kurang kondusif untuk perkembangan pariwisata secara global. Untuk meningkatkan daya saing investasi, berbagai faktor pendukung menjadi kewenangan kebijakan pemerintah pusat. Hal ini berarti peningkatan daya saing regional akan optimal bila didukung oleh iklim yang kondusif di tingkat nasional. Upaya untuk menekan resiko juga terbatas pada resiko keamanan daerah, karena berbagai resiko lain seperti resiko ekonomi, finansial dan suku bunga berada di tingkat pusat (Sugiantoro, 2001). Sejak krisis tahun 1997, Imej Indonesia di luar negeri kurang menguntungkan untuk perkembangan pariwisata, terutama dari sisi kekerasan, ketidakpastian dan ketidakamanan sosial politik, yang berimbas pada pariwisata daerah, termasuk DIY. Demikian pula kejadian terakhir yaitu tragedi Bali yang telah menewaskan banyak wisman, hampir melengkingi keterpurukan pariwisata Indonesia termasuk di tingkat daerah. Untuk mengurangi dampak buruk dari keterpurukan pariwisata, DIY tetap berupaya untuk tetap survive terutama dengan mengupayakan pelayanan prima terhadap wisnus, yang kebetulan merupakan mayoritas turis ke DIY. Sedangkan untuk meningkatkan daya saing di tingkat regional, pariwisata DIY berusaha meneguhkan posisi sebagai wilayah yang relatif aman dan sejuk, di tengah situasi beberapa daerah lain yang terus berkecamuk. Sedangkan untuk menghadapi kompetisi regional maupun global, pariwisata DIY memiliki strategi untuk mengusung *brand image* yang unik yaitu “*JogJa: Never Ending Asia*”. Strategi ini untuk mengurangi imbas dari imej buruk di tingkat nasional, dan sekaligus penguksuhan diri sebagai tujuan utama di Asia, yang siap menantang Malaysia dengan *brand image* “*The truly Asia*” dan Singapore dengan “*The New Asia*”. Dalam jangka panjang para investor memerlukan jaminan keamanan bisnis, yang merupakan faktor penting untuk perkembangan pariwisata yang berkelanjutan, terutama untuk pariwisata yang berbasis komunitas.

Penutup

Pada akhirnya kita menyadari permasalahan dalam perkembangan industri jasa pariwisata sangat kompleks. Dunia pariwisata juga sangat rentan dari berbagai perubahan dan gejala baik di dalam maupun luar negeri. Untuk tetap *survive* dan kompetitif

- Dinas Pariwisata Kodya Dati II Yogyakarta (2000)
RIPPD Konya Tingkat II Yogyakarta. Yogyakarta : DinPar Kodya Yogyakarta.
- N.N dan ND
Himpunan Perintis Kepariwisataan
- Republik Indonesia (2000)
PROPENAS , Jakarta : Republik Indonesia
- Sugiantoro, V. Ronny (2000).
Pariwisata : Antara Obsesi dan Realita. Yogyakarta : Adicita Karya Nusa.
- _____, (2001)
Tourisme, Trade , Invesment: Yogya Dalam Bingkai Otonomi. Yogyakarta : Bigraf Pub.
- Tahajudin, Ujud dan Hari Susanto, (1996).
Aspek Sosial Budaya Industri Pariwisata: Hubungan Timbal Balik antara Industri Pariwisata dan Aspek Sosial Budaya di Daerah Tujuan Wisata. *Jakarta : PMB-LIPI*.
- Thoha, Mahmud (Ed.), (2001).
Globalisasi, Krisis Ekonomi dan Kebangkitan Ekonomi Kerakyatan. *Jakarta : PEP-LIPI*.



BAGIAN KEDUA

KUALITAS TENAGA KERJA INDUSTRI PARIWISATA DI YOGYAKARTA : Dalam Perspektif Sosial-Ekonomi

YB. Widodo

Pendahuluan

Ekonomi Pariwisata yang berkembang saat ini merupakan loncatan besar dari masyarakat agraris ke masyarakat jasa, dalam hal ini yang berkaitan dengan bisnis pariwisata. Loncatan tersebut sangat dipengaruhi oleh transformasi yang terjadi, baik yang bersifat ekonomi maupun sosial sebagai salah satu dampak ekonomi global. Transformasi yang lazim seharusnya bersifat alami, yaitu dari struktur ekonomi agraris, melalui ekonomi manufaktur, baru kemudian ke ekonomi jasa (Schultz, T.W. 1976 dan Djojohadikusumo, S. 1994). Oleh karena itu, transformasi yang terjadi dari sektor agraris langsung ke sektor jasa merupakan loncatan yang signifikan dan tentu saja mengakibatkan beberapa ketimpangan sosial. Adapun mereka yang diuntungkan dalam

perubahan ekonomi seperti itu (bisnis pariwisata) adalah masyarakat yang telah memiliki pendidikan dan ketrampilan serta mampu memasuki pasar tenaga kerja pariwisata.

Transformasi dalam industri pariwisata jelas membutuhkan sumber daya manusia yang mampu memenuhi perkembangan tersebut, yaitu pekerja profesional, teknis, administratif dan manajerial. Bagi Indonesia, proses tersebut tidak akan berjalan secara murni berurutan tetapi bersifat simultan. Artinya, pada saat yang sama industri yang padat karya dan menggunakan tenaga berkeahlian rendah akan tetap sangat diperlukan meskipun langkah menuju tahap industri selanjutnya sudah berjalan (Mulyani, dan Triaswati, 1995). Hal ini karena formasi tenaga kerja Indonesia masih sangat didominasi oleh orang-orang yang berkeahlian dan berpendidikan rendah. Hal ini akan mewarnai corak dan arah perekonomian Indonesia di masa yang akan datang serta mempengaruhi kesiapan Indonesia untuk memasuki era globalisasi.

Ekonomi pariwisata tidak hanya merupakan kegiatan ekonomi yang langsung berkaitan dengan pariwisata, seperti usaha perhotelan, restoran, dan usaha paket wisata. Namun banyak juga kegiatan ekonomi lainnya yang berhubungan erat dengan pariwisata, misalnya transportasi, telekomunikasi dan bisnis eceran (Suwanto, 2001). Fenomena semacam ini memberikan dampak positif terhadap kegiatan ekonomi di suatu wilayah. Dengan kata lain, kegiatan industri pariwisata mendorong berkembangnya berbagai kegiatan ekonomi lainnya.

Hirschman (dalam Djojohadikusumo, S. 1994:103) mengungkapkan adanya keterkaitan atau *linkages* antar bermacam-macam kegiatan ekonomi. Dikatakan bahwa keterkaitan antara sektor jasa dengan sektor industri dan sektor pertanian akan memberikan manfaat komparatif (*comparative advantage*), terutama di bidang produksi dan lapangan kerja, yang akhirnya mempunyai efek positif karena merupakan salah satu cara untuk mengurangi pengangguran.

Masyarakat DIY yang kebanyakan memiliki latar belakang agraris, secara tidak langsung terlibat dalam pengembangan industri pariwisata di daerah tersebut. Keterlibatan tidak langsung, karena sebagian dari penduduk memiliki pekerjaan utama sebagai petani. Pekerjaan di luar sektor pertanian, kadang-kadang dianggap sebagai pekerjaan sampingan yang dilakukan untuk menambah pendapatan rumah tangga. Sebagai contoh, pekerjaan sampingan yang dilakukan masyarakat adalah sebagai pengrajin atau buruh atau pekerja di sektor jasa perhotelan di Kota Yogyakarta. Mereka ada yang tetap tinggal di desa

walaupun juga melakukan pekerjaan di kota. Kehidupan seperti ini merupakan solusi atau jalan tengah dalam menghadapi pekerjaan rangkap. Dengan kata lain, mereka telah beradaptasi dengan keadaan dalam menjawab tantangan perubahan sosial ekonomi saat ini.

Latar belakang keadaan sosial ekonomi masyarakat DIY akan menjadi landasan pemikiran dalam tulisan ini. Tinjauan terhadap aspek ekonomi diharapkan dapat memberikan gambaran tentang peranan sektor jasa pariwisata dalam perekonomian daerah yang memiliki latar belakang agraris. Karena itu, penulisan ini bertujuan mencari jawaban mengapa sektor pariwisata sangat penting di DIY dan apa saja faktor yang mendukung asumsi tersebut. Tulisan ini juga akan menguraikan keterkaitan atau *linkages* antara jasa pariwisata dengan sektor-sektor lain serta posisi daya saing di tingkat nasional maupun internasional.

Tulisan ini memaparkan perkembangan ekonomi pariwisata di DIY yang sangat dipengaruhi oleh faktor alam, kebudayaan dan pendidikan. Secara khusus tulisan ini mengkaji perkembangan ekonomi pariwisata di DIY, mengkaji kelembagaan ekonomi yang terkait dengan pariwisata dalam era otonomi daerah, serta mengkaji aspek kualitas manajemen usaha dari para pelaku industri pariwisata (pengusaha dan pekerja).

Peranan Industri Pariwisata dalam Perekonomian Daerah

Pariwisata di DIY sudah dimulai sejak zaman penjajahan Belanda. Pada tahun 1908 telah berdiri sebuah hotel megah, *Grand Hotel de Jogja*, di pusat Kota Yogyakarta. Pada tahun 1945, nama hotel tersebut diganti menjadi Hotel Merdeka, yang kemudian lebih dikenal dengan nama Hotel Garuda (Artha, 2000). Selanjutnya, namanya berubah menjadi *Nature Garuda* atau *Ina Garuda*. Hotel tersebut didirikan dengan tujuan untuk menyediakan akomodasi bagi para pedagang Belanda yang datang ke kota tersebut. Hotel tersebut juga menyediakan tempat penginapan bagi para pelancong bangsa Belanda dan orang asing lainnya yang datang untuk melihat kemegahan Candi Borobudur dan Candi Prambanan. Pada saat itu Keraton Yogyakarta belum dimanfaatkan sebagai obyek pariwisata. Dengan demikian, keterkaitan antara hotel dan pariwisata sangat erat, karena para turis yang datang untuk berwisata ke DIY dan sekitarnya, pada umumnya memerlukan tempat untuk menginap. Dengan kata lain, tersedianya fasilitas penginapan (hotel) amat penting dalam pengembangan pariwisata di daerah tersebut.

Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, untuk menghormati jasa Sri Sultan Hamengku Buwana IX sebagai Raja Yogyakarta yang memberikan dukungan penuh kepada Republik Indonesia, pemerintah menetapkan status wilayah Kasultanan Yogyakarta menjadi daerah istimewa, yaitu menjadi Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Wilayah propinsi ini tidak terlalu luas, sehingga hampir semua Daerah Tingkat II dan semua obyek wisata relatif mudah dijangkau dari pusat Kota Yogyakarta. Sejak dahulu kunjungan ke Candi Borobudur dan Candi Prambanan dikemas dalam satu paket wisata bersama obyek-obyek wisata lainnya di DIY. Sedangkan Keraton Yogyakarta, sebagai satu-satunya obyek wisata budaya di DIY, baru dibuka untuk umum sebagai obyek wisata sejak tahun 1960. Peranan Keraton sebagai obyek wisata budaya sangat mendukung perkembangan obyek wisata lainnya. Hal ini terlihat dari kehidupan ekonomi masyarakat DIY yang banyak terkait langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan industri pariwisata.

Krisis ekonomi tahun 1997/1998 sangat mempengaruhi perkembangan usaha yang berkaitan dengan pariwisata. Sebagai contoh, para pengrajin perak banyak yang menutup usahanya karena bahan baku perak sangat mahal. Keadaan ini berdampak besar terhadap kehidupan ekonomi masyarakat. Kunjungan wisatawan yang mengalami penurunan sejak krisis, berdampak terhadap para pengusaha perak. Pada umumnya mereka belum berhasil bangkit kembali dari keterpurukannya, karena rendahnya pemesanan/order terhadap hasil kerajinan perak. Keadaan ini menggambarkan adanya keterkaitan berbagai usaha dengan kegiatan pariwisata, seperti kerajinan perak dan batik yang sangat bergantung pada jumlah wisatawan, khususnya wisatawan manca negara, yang datang ke Yogyakarta. Namun demikian, beberapa kerajinan rakyat, seperti keramik, gerabah dan batik, yang banyak dipasarkan ke luar negeri justru mendapat keuntungan karena kenaikan kurs dolar terhadap rupiah, serta pemakaian bahan baku yang dapat dipenuhi dari dalam negeri.

Peranan Sultan Hamengku Buwana IX dalam pengembangan pariwisata di DIY sangat besar. Selain merintis pengembangan pariwisata, Sultan juga merintis pengembangan dunia pendidikan. Pada awal berdirinya Universitas Gadjah Mada hingga tahun 1973, bagian depan dari kompleks Keraton yaitu *Pagelaran* digunakan untuk tempat kuliah para mahasiswa, dan beberapa bangunan yang menjadi tempat tinggal para bangsawan digunakan sebagai tempat praktikum calon dokter dan Rumah Sakit Universitas Gadjah Mada. Kemudian atas

prakarsa adik Sultan, yaitu Pangeran Prabuningrat, didirikan Universitas Islam Indonesia. Dalam perkembangannya sampai sekarang, kedua universitas tersebut menjadi kebanggaan Kota Yogyakarta sebagai perguruan tinggi yang cukup bermutu.

Setelah kampus Universitas Gadjah Mada dipindahkan dari lingkungan keraton ke wilayah Kabupaten Sleman, maka Keraton Yogyakarta kemudian dibuka untuk umum sebagai obyek wisata. Semenjak itu masyarakat umum mulai mengetahui secara pasti bahwa budaya Keraton Yogyakarta mempunyai kaitan erat dengan sejarah perkembangan kerajaan-kerajaan sebelumnya di Jawa.

Sebagai ukuran besarnya peranan keraton dalam pengembangan ekonomi pariwisata di DIY adalah adanya usaha-usaha yang bersumber dari keraton sendiri, yaitu berkembangnya usaha kerajinan rakyat seperti batik, wayang kulit, keramik, dan perak. Semua jenis kerajinan tersebut mengalami perkembangan pesat seiring dengan perkembangan pariwisata di DIY.

Secara umum dapat dikatakan bahwa DIY tidak banyak memiliki sumber daya alam (SDA), tetapi memiliki SDM yang relatif lebih berkualitas dibandingkan provinsi-provinsi lain. Demikian juga stabilitas politik di wilayah ini relatif baik, terutama karena jabatan gubernur menjadi hak istimewa Sri Sultan. Wawasan masyarakat yang luas serta kuatnya rasa memiliki Kota Yogya oleh masyarakat, turut mendukung stabilitas keamanan. Kondisi ini berdampak positif terhadap besarnya minat para investor untuk menanam modal di Yogyakarta.

Perlu diakui bahwa ada sisi-sisi pasif dalam pengembangan pariwisata di DIY. Masyarakat kelas menengah bersikap acuh tak acuh, *entrepreneurship* relatif rendah, pedagang kecil cenderung *nrimo* dan bersikap pasif. Di sinilah peranan keraton sangat besar, terutama tercermin dalam diri Sultan yang menjadi panutan bagi setiap orang, dari kelas sosial tertinggi sampai terendah. Pembukaan keraton sebagai obyek wisata budaya menjadi contoh nyata bagi masyarakat Yogyakarta. Sesungguhnya masih banyak obyek wisata yang belum digarap dengan baik, misalnya panorama Gunung Merapi dengan aliran laharnya yang bisa dijadikan obyek wisata alam di malam hari.

Besar kecilnya peranan sektor ekonomi yang terkait dengan industri pariwisata dapat dilihat dari sumbangan industri tersebut dalam PDRB (Produk Domestik Regional Bruto). Beberapa sektor yang mempunyai kaitan dengan industri pariwisata antara lain usaha jasa transportasi dan komunikasi, perdagangan, kerajinan, perhotelan dan restoran. Tentu saja perkembangan dan peranan (*share*) masing-masing

usaha industri pariwisata tersebut sangat ditentukan oleh kemampuan mereka untuk menjadi *leading sector* dalam perekonomian daerah. Kecuali itu, faktor potensi wilayah juga tidak kalah penting karena sangat dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah daerah dalam pengembangan pariwisata.

Struktur perekonomian DIY dapat dilihat dari besarnya peran masing-masing sektor ekonomi dalam PDRB. Struktur ini memberikan gambaran tentang ketergantungan suatu wilayah terhadap sektor tertentu. Laporan tentang Revitalisasi Ekonomi Makro Yogyakarta (Bappeda DIY, 2002) menunjukkan bahwa sektor jasa merupakan sektor yang memberi kontribusi terbesar pada PDRB (rata-rata sekitar 20 persen dalam 5 tahun terakhir), diikuti sektor pertanian (16,5 persen), sektor perdagangan, hotel dan restoran (15,7 persen), sektor industri pengolahan yang termasuk industri kecil (13,6 persen), sektor angkutan dan komunikasi 11,5 persen (Tabel 2.1). Meskipun belum ada data resmi dan akurat tentang kontribusi pariwisata terhadap PDRB di Daerah Istimewa Yogyakarta, namun berdasarkan data tersebut dapat diperkirakan keterkaitan sektor-sektor tersebut dengan kegiatan pariwisata. Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB masing-masing sektor yang terkait dengan pariwisata diperkirakan dapat mencapai sekitar 60 persen. Angka tersebut menunjukkan bahwa sektor-sektor yang terkait/pendukung industri pariwisata tersebut mempunyai peranan penting dalam perkembangan perekonomian Daerah Istimewa Yogyakarta.

Tabel 2.1
Peranan Sektor Ekonomi Terhadap PDRB Propinsi DIY
Atas Dasar Harga Konstan 1993 Tahun 1996 - 2000
(Persen)

Lapangan Usaha	1996	1997	1998	1999	2000	Rata-rata (Pertumbuhan) 1996-2000
1. Pertanian	15.57	15.56	16.59	16.95	17.96	16.53 (3,8)
2. Pertambangan	1.37	1.35	1.28	1.25	1.21	1.29 (0,1)
3. Industri Pengolahan	13.61	13.28	14.07	14.15	13.24	13.67 (0,2)
4. Listrik, Gas, Air Minum	0.57	0.59	0.67	0.73	0.76	0.66 (5,1)
5. Bangunan	10.43	10.46	7.92	7.94	7.99	8.95 (-2,0)
6. Perdagangan, Hotel, Restoran	15.63	15.67	15.83	15.77	15.78	15.74 (1,6)
7. Angkutan & Komunikasi	11.27	11.23	11.54	11.46	12.15	11.53 (3,1)
8. Keuangan	10.66	10.73	11.25	11.01	10.45	10.82 (-0,1)
9. Jasa	20.90	21.13	20.85	20.73	20.47	20.81 (1,2)
Jumlah Persen Absolut (jutaan Rp)	100.0 5.106,3	100.0 5.286,3	100.0 4.689,9	100.0 4.824,4	100.0 5.017,7	100.0 (1,7) -

Sumber : Bappeda DIY, 2002

Dilihat dari peran sektoral terhadap PDRB selama 5 tahun terakhir (1996-2000) secara umum, maka Tabel 2.1 tidak menunjukkan terjadinya penurunan yang berarti pada sumbangan masing-masing sektor terhadap PDRB, dan angka pertumbuhan rata-rata 1,7 persen. Namun apabila dilihat dari besarnya angka PDRB pada masing-masing sektor per tahun selama lima tahun terakhir, tampak bahwa pada tahun 1997 dan 1999 terjadi penurunan. yang cukup mencolok Hal ini merupakan dampak langsung dari krisis ekonomi tahun 1997, dan kecenderungan pemulihan ekonomi yang ditandai dengan kenaikan PDRB pada tahun 2000.

Apabila sumbangan sektor ekonomi terhadap PDRB dikaitkan dengan jumlah tenaga kerja yang bekerja di masing-masing sektor, maka pada Tabel 2.2. dapat dilihat bahwa sumbangan masing-masing sektor terhadap PDRB diikuti oleh jumlah tenaga kerja yang terserap dalam sektor tersebut. Dengan kata lain, hubungan antara sumbangan masing-masing sektor terhadap PDRB dengan jumlah tenaga kerja yang dapat diserap oleh sektor yang bersangkutan sangat besar dan proporsional.

Tabel 2.2
Tenaga Kerja Dan PDRB Propinsi DIY Menurut
Lapangan Usaha , Tahun 2000
(Persen)

Lapangan Usaha	Tenaga Kerja Tahun 2000 (Persen)	PDRB Tahun 2000 (Persen)	Keterangan
1. Pertanian	43.31	17.96	Proporsional
2. Pertambangan	0.29	1.21	Proporsional
3. Industri Pengolahan	12.95	13.24	Proporsional
4. Listrik, Gas, Air Minum	0.07	0.76	Proporsional
5. Bangunan	6.18	7.99	Proporsional
6. Perdagangan, Hotel, Restoran	18.78	15.78	Proporsional
7. Angkutan & Komunikasi	3.64	12.15	Tidak
8. Keuangan	1.67	10.45	Tidak
9. Jasa	13.12	20.47	Proporsional
Jumlah	100.00 (1.663.503)	100.00 (5.017,7 juta)	

Sumber: BPS DIY 2000; Bappeda DIY, 2002

Tabel 2.2. menunjukkan bahwa di luar sektor keuangan dan sektor angkutan besarnya sumbangan masing-masing sektor terhadap PDRB diikuti pula dengan tingginya angka tenaga kerja yang terserap di sektor tersebut. Dengan kata lain, terjadi keseimbangan yang proporsional, terutama di sektor yang berkaitan dengan jasa pariwisata, seperti industri pengolahan, perdagangan, hotel dan restoran serta sektor jasa lainnya. Tenaga kerja yang terserap oleh masing-masing sektor yang mendukung pariwisata adalah sebesar 48,5 persen dari seluruh kegiatan masyarakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa di DIY pengaruh krisis 1997 tidak membuat masing-masing sektor terpuruk. Justru sektor riil pertanian dan industri pengolahan masih tetap menunjukkan sumbangan yang sangat berarti bagi perekonomian daerah setelah masa krisis.

Dilihat dari sumbangan masing-masing sektor terhadap PDRB, sektor yang mempunyai *share* tinggi adalah sektor jasa, sektor pertanian, sektor perdagangan, hotel dan restoran, dan sektor industri pengolahan. Menurut Raymond (Bappeda, 2002), keempat sektor tersebut sangat terkait dengan perkembangan wilayah DIY yang didukung oleh kondisi sosial sebagai pusat budaya, potensi pariwisata dan pusat pendidikan. Hal ini juga didukung oleh lahan pertanian yang relatif subur dan potensial. Keadaan ini menunjukkan bahwa pariwisata mempunyai potensi yang mampu mengembangkan sektor jasa, hotel dan restoran serta sektor industri pengolahan, khususnya kerajinan. Keterkaitan ke depan terdapat di sektor-sektor perdagangan, hotel dan restoran, sedangkan keterkaitan ke belakang terdapat dalam sektor industri pengolahan dan sektor pertanian. Itulah yang oleh Hirschman disebut *linkages* di antara berbagai kegiatan ekonomi.

Pengembangan sektor pariwisata telah didukung oleh tersedianya sarana transportasi dan tersedianya tempat penginapan/hotel memadai. Pada tahun 2002, di Kota Yogyakarta terdapat 38 hotel berbintang dengan 3.783 kamar dan 362 hotel nonbintang dengan 5.717 kamar, 27 restoran besar dengan 4.925 tempat duduk (PHRI, 2002). Kota Yogyakarta menjadi pusat pengembangan industri pariwisata yang didukung oleh penjualan produk-produk setempat. Pada tahun 2000, sumbangan industri pariwisata terhadap PAD telah mencapai 3,5 milyar rupiah (DIY Dalam Angka, 2001).

Kelembagaan Dalam Industri Pariwisata

Lembaga-lembaga yang menunjang perkembangan pariwisata di Yogyakarta adalah lembaga pemerintah dan lembaga swasta. Lembaga

pemerintah terdiri dari Dinas Pariwisata, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Perhubungan, serta pusat-pusat penelitian yang berada di bawah lembaga pendidikan pemerintah, seperti PUSPAR-UGM (Pusat Penelitian dan Pengembangan Pariwisata). Sedangkan lembaga swasta adalah PHRI (Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia), STUPPA (Studio Perencanaan Pariwisata), HPI (Himpunan Pramuwisata Indonesia), dan ASITA (Association of the Indonesian Tours and Travel Agencies).

Perkembangan pariwisata di Yogyakarta sangat erat kaitannya dengan perkembangan lembaga (institusi) yang ada di masyarakat. Masing-masing lembaga melakukan integrasi dalam mengelola kepariwisataan di Yogyakarta. PHRI mempunyai anggota 38 hotel berbintang dan 362 hotel nonbintang; sedangkan biro perjalanan yang tergabung dalam ASITA beranggotakan 80 biro perjalanan. Kedua lembaga tersebut sangat menunjang perkembangan pariwisata, khususnya dalam penyediaan sarana akomodasi atau penginapan dan sarana transportasi atau perjalanan. Walaupun kedua lembaga tersebut berpusat di Jakarta, tetapi masing-masing mempunyai perwakilan dan otonomi di daerah tingkat I. Jaringan kedua lembaga tersebut sangat luas, baik di lingkup nasional maupun lingkup internasional. Dengan jaringan informasi yang sangat luas, mereka sangat siap menghadapi pasar global dan mengembangkan jasa pariwisata dengan pesat.

Untuk menumbuh-kembangkan pariwisata di Yogyakarta, kedua lembaga tersebut (PHRI dan ASITA) bekerja sama dengan lembaga lain, baik dari pemerintah maupun swasta, antara lain dengan mendirikan pusat latihan dan pengembangan pariwisata yang disebut *Jogja Tourism Training Center (JTTC)* agar perkembangan industri pariwisata di Yogyakarta dapat diimbangi dengan ketersediaan sumber daya manusianya yang berkualitas. Lembaga pengkajian seperti PUSPAR merupakan lembaga penelitian yang dikelola UGM dan melakukan kajian terhadap perkembangan pariwisata, terutama di DIY.

Dalam mendukung pengembangan pariwisata di DIY lembaga swasta dan lembaga pemerintah saat ini sedang mencari titik temu mengenai apa yang dapat mereka lakukan bersama untuk meningkatkan pendapatan daerah melalui industri pariwisata. Walaupun di atas sudah disinggung bahwa peran sektor pariwisata terhadap PAD cukup berarti, namun angka tersebut sebenarnya masih dapat terus ditingkatkan. Untuk meningkatkan angka tersebut, sektor-sektor pendukung lainnya harus ditingkatkan peranannya, sehingga tercapai *multiplier effect* atau efek ganda dengan adanya industri pariwisata.

Dalam ekonomi global, dengan memperhatikan peran industri pariwisata dalam perkembangan perekonomian daerah berarti merupakan loncatan besar. Sebab dari masyarakat agraris (berbasis pertanian) langsung ke masyarakat jasa. Sayangnya, masih banyak masyarakat yang memiliki pemahaman yang sempit terhadap industri pariwisata. *Banyak orang memahami pariwisata sebagai sekadar kegiatan jalan-jalan, pelancongan, atau piknik. Padahal sekarang industri pariwisata sudah membuat loncatan besar. Artinya, rohnya sudah merasuk ke semua aspek.* (Wawancara dengan Ketua PHRI, PPK-LIPI 2002).

Selanjutnya, arah kegiatan pariwisata dapat dikembangkan seluas-luasnya hingga mencakup wisata konferensi, wisata eksibisi, wisata ziarah, dan lain-lain, yang akhirnya akan mendatangkan devisa lebih besar bagi daerah, karena berbagai kegiatan tersebut dapat menggerakkan kegiatan ekonomi yang lebih luas lagi.

Ada tiga aspek utama, yang dapat dikemas oleh lembaga yang menanganinya, dalam kehidupan ekonomi di Yogyakarta, yaitu aspek kegiatan pendidikan, aspek kegiatan pariwisata, dan aspek kegiatan industri kerajinan rakyat. Ketiga aspek tersebut sudah ada dan berkembang sejak zaman Kerajaan Mataram dan sudah meresap dalam kehidupan sehari-hari masyarakat setempat. Kemudian Yogyakarta berkembang menjadi kota yang penduduknya heterogen, pluralis, dan mayoritas berusia muda. Kondisi ini merupakan potensi yang besar bagi pengembangan pariwisata.

Dengan kerja sama antar lembaga, di kota Yogyakarta sudah sering diadakan konferensi tingkat nasional dan internasional yang secara tidak langsung mendukung kegiatan pariwisata di Yogyakarta. Para peserta konferensi secara otomatis mendatangi obyek-obyek wisata di sekitar Yogyakarta dan di Jawa Tengah.

Interaksi Antar Lembaga

Kerja sama lembaga pemerintah dengan lembaga swasta mempunyai peranan besar dalam pengembangan pariwisata di DIY. Lembaga swasta mempunyai peranan besar dalam penentuan arah kebijakan pemerintah daerah. Sebagai contoh, dalam penerapan pajak iklan yang berbasis pariwisata, PHRI meminta pengurangan pajak untuk promosi kepariwisataan, karena pajak yang rendah akan berdampak langsung pada peningkatan pendapatan sektor swasta. PHRI mengusulkan agar penambahan pajak ditetapkan setelah terjadi

meningkat, pendapatan wilayah menurun, dan Kotagede menjadi kota mati. Menjawab tantangan tersebut, PUSPAR membangun pasar tradisional yang sudah ada dengan arsitektur lokal, memugar bangunan kuno yang sudah ratusan tahun usianya dan menggunakannya sebagai restoran, warung telekomunikasi (wartel) dan penyedia jasa internet serta tempat pameran bernuansa etnis. Efek yang sudah terlihat adalah tumbuhnya hotel dan losmen bernuansa etnis di Kotagede. Dengan cara itu muncul aktivitas yang menghidupkan kembali usaha pengrajin perak lokal yang akhirnya dapat kembali menyerap tenaga kerja profesional.

Sejarah Kotagede sangat menarik. Kawasan ini mengalami beberapa kali transformasi sosial seiring gerak dan perubahan sosial yang terjadi (Kompas, 2001). Gerakan perubahan ini bisa dilacak dari arsitektur bangunan dan seluruh tata ruang di wilayah itu.

Paparan mengenai kinerja kedua lembaga tersebut membuktikan bahwa telah terjadi integrasi dan kerja sama erat antara lembaga pemerintah dan lembaga swasta dalam pengembangan pariwisata di DIY. Hal ini sesuai dengan keinginan Gubernur DIY yang menegaskan agar lembaga swasta dan lembaga pemerintah aktif bekerja sama mengembangkan industri pariwisata. Ide agar Yogyakarta dikembangkan menjadi seperti Singapura mendapat sambutan hangat dari lembaga-lembaga yang terkait. Sebagai contoh, JTTC (*Jogya Tourism Training Center*) merupakan wadah yang mengakomodasi ASITA, PUSPAR dan PHRI. Dari lembaga pemerintah, dalam hal ini dinas pariwisata, memberi fasilitas dan sarana untuk berbagai kegiatan tersebut.

Di lain pihak, usaha-usaha tersebut saat ini menghadapi kendala karena dinas pariwisata sedang dibenahi dan direstrukturisasi sehubungan dengan otonomi daerah. Akibatnya, beberapa jabatan diisi oleh orang yang tidak memahami masalah-masalah di kepariwisataan. Di samping itu, isu ketidakstabilan politik dan keamanan masih berdampak negatif, terutama setelah terjadinya peristiwa ledakan gedung WTC 11 September 2001 dan ledakan bom di Legian Bali 12 Oktober 2002 yang lalu.

Peran Koperasi Batik

Kelembagaan ekonomi di tingkat masyarakat yang tumbuh dan berkembang menyertai pengembangan pariwisata di DIY adalah koperasi batik. Koperasi tersebut didirikan oleh para elit pribumi yang berprofesi sebagai pengusaha batik tulis dengan tujuan utama meningkatkan daya

saing mereka menghadapi jenis-jenis usaha lain, terutama yang dimiliki pihak swasta asing.

Sejarah batik di Yogyakarta tidak terlepas dari lembaga yang melakukan usaha seperti itu, yaitu Gabungan Koperasi Batik di Indonesia atau GKBI. Lembaga ini sudah lama berdiri, yaitu pada tahun 1948, atas prakarsa Jawatan Koperasi Pusat di Yogyakarta, sebuah lembaga di bawah Kementerian Kemakmuran RI. Waktu itu, semua koperasi batik yang ada di wilayah RI digabung dalam satu wadah, yaitu Gabungan Koperasi Batik Indonesia (GKBI, 1954).

Tujuan utama didirikannya GKBI adalah untuk mengimpor bahan baku batik berupa kain mori dan bahan baku lain seperti malam dan pewarna. GKBI juga bertugas menetapkan harga dasar produk batik, agar perusahaan-perusahaan batik dapat memproduksi secara kontinyu, dan melayani distribusi bagi para anggota koperasi. Di masa itu, perusahaan-perusahaan batik yang menjadi anggota koperasi antara lain adalah perkumpulan pembatik bernama Mitra Batik dari Tasikmalaya, GPBB dari Ciamis, TRUSMI dari Cirebon, Persatuan Batik Keris dari Pekalongan, Pekajangan, Purwokerto, PPBI dari Yogyakarta, Batari dari Surakarta, Ponorogo dan Tulungagung. Di masa-masa awalnya, GKBI berpusat di Surakarta. Kemudian pada tahun 1953 pindah ke Jakarta.

Pada tahun 1970-an batik berkembang pesat, terutama batik *printing* dan batik cap. Di masa itu batik tulis dianggap sangat mahal dan mempunyai nilai seni dan budaya sangat tinggi. Sebaliknya, batik *printing* sangat digemari karena sangat mudah dibuat, harganya murah, dan cara perawatannya tidak serumit batik tulis yang harus dicuci dengan bahan khusus dan sulit didapat.

Pada tahun 1964, Persatuan Pengusaha Batik Indonesia (PPBI) di Yogyakarta dikembangkan menjadi 5 koperasi, yaitu : (1). Koperasi Batik Tamtomo; (2). Koperasi Batik Mataram; (3). Koperasi Batik Senopati; (4). Koperasi Batik Karang Tunggal; dan (5). Koperasi Batik PPBI sendiri. Kelima koperasi yang wilayah usahanya di tingkat kecamatan itu masih bertahan hingga sekarang dan masing-masing anggotanya mempunyai ciri yang berbeda dalam mengelola usaha batik. Kemudian seiring dengan perkembangan jaman, tidak semua anggota koperasi dapat bertahan hanya dengan mengelola usaha batik.

Setelah ditetapkannya kebijakan pengembangan garmen di Indonesia pada tahun 1970, pembuatan batik dilakukan dengan mesin *printing*. Akibatnya, batik tulis mengalami penurunan permintaan di pasar. Tumbuhnya usaha *printing*, seperti yang dikelola oleh perusahaan

besar Batik Keris dan Batik Semar di Surakarta adalah berkat kemudahan yang diberikan penguasa Orde Baru kepada pengusaha-pengusaha besar. Akibatnya, banyak usaha kerajinan batik, terutama yang membuat batik tulis, akhirnya terpaksa gulung tikar. Di sisi lain, peran GKBI dalam kegiatan pemasokan kain mori kepada perusahaan-perusahaan batik di Yogyakarta juga semakin berkurang.

Sebagian besar anggota koperasi batik beralih ke usaha lain, misalnya membuka hotel, pabrik roti, toko kelontong, biro perjalanan, atau tempat kos pelajar. Mereka yang bertahan menggeluti usaha batik tinggal kira-kira 10 persen. Usaha-usaha baru mereka, disesuaikan dengan perkembangan perekonomian, terutama yang diwarnai oleh perkembangan jasa pariwisata dan pendidikan.

Peran langsung koperasi terhadap perkembangan batik di Yogyakarta sudah sangat menurun. Salah satu faktor utama penyebabnya adalah mudahnya bahan baku kain mori diperoleh di pasar umum, padahal tujuan utama didirikannya koperasi adalah untuk menjamin pengadaan bahan baku kain mori. Di lain pihak, saat ini sedang terjadi perkembangan batik tulis dari bahan baku sutera. Batik tulis jenis ini ditujukan bagi konsumen menengah ke atas dan pengadaan bahan bakunya tidak lagi menjadi kewenangan koperasi. Fakta-fakta tersebut tidak menyurutkan semangat dan usaha para pengurus dan anggota kelima koperasi batik yang ada di Yogyakarta. Mereka masih terus bertahan, meskipun usaha para anggotanya banyak yang sudah beralih profesi. Hal ini terbukti dengan adanya regenerasi ke anak-cucu dari bekas para pengurus atau anggota koperasi yang tidak aktif lagi karena sudah tua atau telah meninggal. Sayangnya, sebagian besar dari mereka tidak lagi menggeluti usaha batik.

Profesionalisme Tenaga Kerja Pariwisata

Usaha batik dan usaha perhotelan tidak dapat dipisahkan dari perkembangan industri pariwisata. Kedua usaha tersebut telah terbukti dapat melengkapi kebutuhan pariwisata, baik dari sisi penyediaan sarana akomodasi maupun pemenuhan kebutuhan cenderamata bagi wisatawan. Oleh sebab itu, pengalihan usaha yang dilakukan para pengusaha batik menjadi pengelola hotel atau rumah penginapan merupakan langkah yang logis untuk menyelamatkan usaha mereka agar tidak mati alias gulung tikar. Di samping itu, kedua jenis usaha tersebut mempunyai kaitan yang sangat erat dengan perkembangan pariwisata di Yogyakarta.

Perkembangan usaha batik

Kerajinan batik merupakan usaha yang sudah digeluti oleh sebagian masyarakat Yogyakarta sejak jaman dulu. Selain memenuhi kebutuhan akan bahan pakaian sehari-hari dan *busana* dalam berbagai upacara adat, batik juga mengandung nilai seni budaya. Walaupun awalnya usaha batik terkait dengan keraton, tetapi dalam perkembangannya usaha ini meluas di tingkat masyarakat umum. Siapa saja yang menggeluti usaha batik berpeluang untuk mengembangkannya. Pengembangan batik juga sangat mendorong pengembangan pariwisata di DIY. Ini terbukti dalam pameo umum di kalangan wisatawan, “*Jika datang ke Yogya belilah batik.*”

Perkembangan batik di DIY mengalami perubahan sangat signifikan karena tuntutan pasar. Pada awalnya, batik di Yogya, sebagaimana di daerah-daerah lain, pewarnaannya dilakukan dengan sistem tulis. Sistem ini terutama berkaitan erat dengan tradisi keraton dan masyarakat sekelilingnya, yaitu membuat batik untuk digunakan dalam upacara adat. Selain itu, sejak awal perkembangannya hingga tahun 1970-an, batik juga digunakan kaum perempuan sebagai pakaian sehari-hari. Dalam perkembangan selanjutnya, agar proses pembuatan lebih cepat pembatikan dilakukan dengan cap. Dalam pemasaran bahan baku dan pemasaran hasil produksi hingga tahun 1970, peran GKBI masih sangat besar.

Pada tahun 1971 peranan mesin *printing* berkembang sangat pesat, hingga menggeser peran kain batik dan kain tenun. Pembuatan pakaian seragam siswa sekolah dan seragam pegawai sipil juga dilakukan dengan sistem *printing*. Sejak itu terjadilah pergeseran nilai bahan batik, dari nilai yang semula menekankan unsur keindahan menjadi nilai yang lebih menekankan unsur fungsional atau kegunaan. Penghargaan terhadap keindahan kain batik yang mengandung nilai seni dan budaya semakin luntur di masyarakat.

Dengan berkembangnya mode dan pilihan yang lebih mementingkan unsur kepraktisan, semakin sedikit kaum perempuan yang menggunakan kain batik sebagai pakaian sehari-hari. Harga kain batik yang relatif lebih mahal daripada harga kain pada umumnya, membuat kaum perempuan memilih untuk tidak menggunakan kain batik.

Di sisi lain, batik berkembang mengikuti permintaan pasar. Batik dibuat sangat eksklusif dan disesuaikan permintaan/pesanan kalangan terbatas. Batik dengan motif modern banyak digemari meskipun harganya hanya bisa dijangkau oleh kalangan tertentu saja.

Sejak beberapa tahun terakhir ini, bahan batik untuk baju laki-laki dan perempuan banyak yang dibuat dari sutera.

Penggunaan kain batik untuk *hem*/baju laki-laki baru berkembang pada tahun 1974, yaitu sejak dicanangkan oleh Ali Sadikin yang saat itu menjadi Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya. Sejak itu, baju batik mulai digemari oleh kaum pria. Kemudian bahan batik berkembang menjadi pakaian seragam sekolah dan kantor. Sampai saat ini, 10 persen anggota koperasi batik di Yogyakarta menekuni pembuatan batik dengan berbagai motif menurut kegunaan, baik dengan sistem pembuatan batik tulis klasik, batik cap, batik cap dan tulis, dan batik *printing*.

Dedikasi dan kecintaan para pecinta batik di Yogyakarta yang tergabung dalam Paguyuban Pecinta Batik Indonesia (PPBI) Sekar Jagad (didirikan tahun 1999) terhadap batik telah mengantarkan batik *go international*. (M. Indonesia, 15 September 2002).

Pernyataan itu dibuktikan oleh fakta bahwa perkembangan batik di Yogyakarta justru diminati oleh para sarjana arsitektur, teknik, dan sarjana lainnya yang menggeluti desain grafis, didukung oleh perkembangan seni desain grafis melalui komputer. Didorong dan didukung oleh tokoh batik dan pengusaha kawakan yang masih hidup seperti WS, tampaknya usaha batik di Yogyakarta tidak akan menyurut. Tokoh-tokoh penerus yang berpendidikan tinggi itu aktif mempromosikan batik melalui beberapa festival dan lomba di tingkat nasional dan internasional.

Demikianlah, perkembangan batik dan perkembangan pariwisata erat berkaitan, bahkan saling melengkapi. Dengan selalu mengikutsertakan generasi muda, usaha batik memberi peluang kepada SDM untuk meningkatkan kemampuan mereka, baik dalam menciptakan inovasi maupun mengembangkan manajemen. Keluarga Winotosastro menggeluti usaha batik sejak tahun 1940. Usaha mereka merupakan warisan turun-temurun yang didirikan nenek moyang mereka pada tahun 1800 (Wawancara mendalam dengan pengusaha batik). Sampai saat ini, keluarga WS masih tetap mensponsori pameran batik klasik (tradisional) agar jenis batik tersebut tetap digemari generasi muda.

Secara umum dapat dikatakan bahwa usaha batik tulis di Yogyakarta dilakukan secara turun-temurun. Adapun tenaga kerja pengrajin batik kebanyakan berasal dari penduduk desa yang tinggal di sekitar kota, dengan jarak tempuh antara setengah sampai satu jam naik kendaraan umum atau kendaraan sepeda.

Faktor-faktor yang mempengaruhi perekrutan tenaga kerja pengrajin batik di Kota Yogyakarta :

- a. Tenaga kerja berketrampilan memadai semakin berkurang.
- b. Tenaga kerja muda enggan bekerja sebagai pembatik karena merasa kurang telaten, tidak bebas dan upah masih rendah.

Berkurangnya pengrajin yang bersedia bekerja di usaha batik merupakan salah satu faktor penghambat dalam perekrutan tenaga kerja baru. Hambatan ini lebih disebabkan oleh semakin lemahnya usaha batik tradisional di pasar nasional dan pasar internasional karena mendapat saingan dari pengusaha besar bermodal besar yang mendapat perlindungan pemerintah di masa Orde Baru. Akibatnya, tenaga pengrajin yang semula rajin membatik kemudian memilih berusaha di sektor perdagangan atau kembali ke sektor pertanian.

Dalam hal tenaga kerja, para pengusaha batik yang masih bertahan tidak mengalami hambatan karena mereka mempunyai hubungan kemitraan yang bagus dengan para pengrajin di pedesaan. Hubungan antara para pengusaha dan para pembatik di pedesaan yang bersifat timbal-balik itu telah terjalin dan terpelihara secara turun temurun. Lebih dari itu, tampaknya sekarang para pengusaha batik telah berubah sikap. Mereka memberi kebebasan kepada para pengrajin. Sama sekali tidak ada unsur pemaksaan dalam hubungan tersebut. Sebagai contoh, para pengrajin bebas melakukan pekerjaan utama mereka sebagai petani dan baru kembali melakukan pekerjaan membatik setelah pekerjaan bertani selesai. Hubungan seperti inilah yang dilakukan oleh hampir semua pengusaha batik di Yogyakarta, sehingga dapat dikatakan bahwa unsur pemaksaan dan ketergantungan antara buruh dan majikan tidak ada lagi. Ini membuktikan bahwa sesuai dengan perkembangan era globalisasi saat ini, posisi tawar para tenaga kerja menjadi sangat tinggi. Mereka tidak perlu lagi bergantung pada satu jenis pekerjaan atau majikan tertentu.

Usaha perhotelan / penginapan

Jumlah sarana akomodasi (hotel, penginapan) di DIY meningkat, baik hotel berbintang maupun hotel melati. Peningkatan tersebut diakibatkan oleh meningkatnya jumlah wisatawan dari dalam negeri dan dari manca negara yang berkunjung ke Yogyakarta. Selama lima tahun terakhir terjadi peningkatan yang cukup berarti, dari 27 hotel berbintang dan 371 hotel melati (1996) menjadi 38 hotel berbintang dan 382 hotel non bintang (2002). (PHRI, 2002; PUSPAR, 2001). Hotel

berbintang sebagian besar terletak di Kota Yogyakarta dan di wilayah perkotaan Kabupaten Sleman, sedangkan hotel melati tersebar di wilayah Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, dan beberapa terdapat di Kabupaten Gunung Kidul dan Kabupaten Kulon Progo.

Berkaitan dengan perkembangan pariwisata di Yogyakarta, telah tumbuh penginapan-penginapan di sekitar rumah-rumah tinggal penduduk yang oleh PUSPAR-UGM disebut kampung wisata. Di Yogyakarta terdapat dua lokasi kampung wisata, yaitu di Sosrowijayan dan Prawirotaman. Dalam perkembangan selanjutnya, diperkirakan kampung wisata akan terus tumbuh di berbagai pelosok kota; sementara yang tumbuh di pedesaan disebut desa wisata.

Usaha penginapan yang disebut kampung wisata tumbuh karena lesunya pasar batik pada tahun 1970. Berkurangnya jumlah pembeli batik, terutama dari dalam negeri, membuat para pengusaha atau saudagar batik beralih ke usaha penyediaan sarana akomodasi bagi turis. Mereka mendirikan penginapan bagi para wisatawan, baik domestik maupun asing. Dengan modal rumah besar berhalaman luas, para saudagar beralih profesi menjadi pengusaha penginapan atau *homestay* bagi para wisatawan. Namun demikian masih ada pengusaha yang tetap menggeluti usaha batik tulis, sambil mengembangkan usaha perhotelan, seperti yang dilakukan pengusaha batik WS, yaitu tokoh batik terkenal yang tinggal di Kampung Prawirotaman, di kawasan selatan Kota Yogyakarta. Hotel keluarga WS, yang terdiri dari tiga hotel kelas melati dengan fasilitas hotel berbintang di sepanjang Jalan Prawirotaman, dikelola oleh generasi penerus. Hanya sayang manajemen dan pelayanannya belum menggunakan cara-cara yang profesional.

Di kawasan Prawirotaman banyak pengusaha batik yang beralih ke usaha hotel. Peralihan usaha ini sangat relevan dengan perkembangan industri pariwisata di Yogyakarta. Pertumbuhan hotel berkembang pesat sejak tahun 1970 hingga tahun 1985. Sekarang di Kampung Prawirotaman ada 35 hotel yang statusnya setingkat losmen atau penginapan sederhana yang dibuat dengan menyekat-nyekat bangunan rumah yang sudah ada menjadi kamar-kamar yang disewakan. Dari 35 hotel tersebut, sekitar 75 persen pemiliknya pernah menggeluti usaha batik.

Dengan tumbuhnya hotel dan penginapan, di kawasan tersebut juga telah tumbuh berbagai usaha ikutan seperti toko batik, restoran, *art shop* penjual *souvenir*, wartel, *money changer*, biro perjalanan, pedagang asongan, dan aneka kios yang menunjang industri pariwisata.

Peluang tersebut juga dimanfaatkan oleh tenaga kerja berpendidikan rendah, misalnya tukang becak. Mereka bahkan dikoordinir untuk bekerja berkelompok menurut jalur jalan atau lorong yang ada hotelnya. Mereka mendapat pelatihan singkat mengenai cara-cara melayani wisatawan, baik wisatawan dalam negeri maupun wisatawan mancanegara, oleh lembaga swadaya masyarakat. Karena itu, dilihat dari eksternalitas ekonomi, pertumbuhan usaha hotel dan penginapan berikut usaha-usaha pendukungnya telah memberi manfaat positif, terutama dalam membuka lapangan kerja bagi masyarakat kalangan menengah ke bawah.

Wisatawan mancanegara yang singgah di kawasan tersebut kebanyakan berasal dari Eropa, Taiwan, Jepang, Australia dan Amerika. Sedangkan di waktu liburan sekolah, para pelajar dari berbagai penjuru tanah air yang berlibur di Yogyakarta atau mencari sekolah juga banyak yang menginap di kawasan itu. Jadi di Yogyakarta terbukti bahwa berbagai sektor bisa saling menunjang, seperti sektor pendidikan, jasa pariwisata, perdagangan dan pemerintahan.

Pengelolaan *homestay* atau hotel nonbintang rata-rata dilakukan dengan sistem manajemen keluarga, tidak melakukan promosi, tidak ada aturan ketat, hanya menekankan saling menjaga, saling percaya, tidak saling mengganggu. Yang penting pemilik penginapan dan para wisatawan merasa nyaman dan aman. Perekrutan karyawan hotel dilakukan lewat kenalan dan sanak-saudara yang bisa melakukan pekerjaan pelayanan dan bisa berbahasa asing. Sejak adanya akademi dan perguruan tinggi yang memiliki program studi perhotelan, maka penyediaan tenaga kerja perhotelan yang profesional menjadi sangat terbantu. Hanya belum semua hotel mau menerima para alumni lembaga-lembaga pendidikan tersebut.

Homestay atau rumah istirahat biasanya penuh di bulan Juni-Agustus dan di bulan Desember-Januari, yaitu pada masa liburan sekolah. Krisis ekonomi tahun 1997 juga berpengaruh terhadap jumlah wisatawan pada tahun berikutnya. Dari tahun 1997 sampai 1999 kunjungan wisatawan terus menurun. Kemudian sejak tahun 2000 sampai tahun 2002 mulai ada sedikit peningkatan. Tamu asing yang datang biasanya sudah pernah menginap di hotel atau *homestay* tertentu, jadi sudah menjadi pelanggan. Kebanyakan mereka berasal dari Perancis, Australia, dan Philipina (wawancara mendalam, PPK-LIPI 2002).

Peluang dan tantangan pasar industri pariwisata

Yogyakarta sebagai kota budaya, kota pendidikan dan kota pariwisata mempunyai potensi besar untuk dikembangkan. Selain itu, dapat pula terus dikembangkan industri pengolahan, industri pendidikan, industri kerajinan, industri makanan tradisional, industri jasa perhotelan, restoran, hiburan dan biro perjalanan.

Sumbangan sektor industri pengolahan terhadap perekonomian daerah belum begitu besar, namun sebagian besar (90 persen) merupakan sumbangan dari industri kecil. Sumbangan ini sebagian besar berasal dari pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yang umumnya adalah pendatang dari luar kota Yogyakarta (Bappeda DIY, 2002). Sarana transportasi yang menghubungkan pusat kota dan daerah-daerah di tingkat kabupaten sangat membantu kelancaran perkembangan pariwisata. Semua itu membuat sektor pariwisata memberikan sumbangan penting terhadap PAD yang sebagian besar bersumber dari masyarakat di Kota Yogyakarta dan di Kabupaten Sleman.

Kaitan antara pendidikan dan pariwisata sangat erat. Peranan sebagai kota pelajar dan kota pariwisata saling mendukung. Kondisi ini memberikan kontribusi penting bagi pendapatan Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman. Lebih jauh lagi, dua kabupaten lainnya, yaitu Bantul dan Gunung Kidul, ikut menerima dampak positifnya. Sayangnya, *entrepreneur* dari kalangan penduduk setempat masih kurang. Banyak usaha didirikan dan dikelola oleh para pendatang, sementara penduduk setempat hanya bekerja sebagai buruh atau pekerja. Hal seperti ini tampak dalam usaha industri kecil makanan khas Yogyakarta, seperti gudeg, bakmi jawa, bakpia, dan berbagai makanan khas oleh-oleh yang terbuat dari ketan dan kelapa.

Pada tahun 1995 pernah dilakukan hubungan persahabatan sebagai *sister cities* dengan kota Kyoto di Jepang. Hubungan tersebut meliputi bidang : (1). Budaya; (2). Industri Kecil; (3). Pariwisata; dan (4). Pendidikan. Salah satu contoh beberapa industri kecil yang dibina terletak di Desa Moyudan-Sleman, merupakan sentra industri perabot dari bambu.

Keberadaan DIY sebagai tujuan wisata terpopuler setelah Bali dapat dilihat dari slogan *Yogya never ending Asia*. Tema ini pernah diulas di *New York Time*, bulan Juli tahun 2000. Adapun yang membuat Yogyakarta sekarang unggul adalah adanya pariwisata, industri kecil, dan sebagai kota pendidikan.

Wisatawan mancanegara yang transit di Yogyakarta biasanya mengambil paket wisata yang sudah baku, seperti kunjungan ke

Keraton, Candi Borobudur dan Candi Prambanan; sedangkan *souvenir* yang diminati antara lain adalah batik, gamelan, ukiran kulit, perak, kerajinan gerabah dari Kasongan.

Hambatan yang dialami Yogyakarta sejak krisis ekonomi 1997/1998 hingga saat ini adalah :

1. Faktor eksternal yang menyatakan bahwa Yogyakarta dan Indonesia secara keseluruhan tidak aman. Hal ini bisa diatasi dengan meningkatnya promosi pariwisata oleh KBRI (Kedutaan Besar Republik Indonesia). Dibutuhkan usaha keras untuk memulihkan kepercayaan masyarakat internasional terhadap Indonesia. Sayangnya, belum lagi usaha tersebut berhasil, terjadi tragedi Bom Bali. Peledakan bom di kawasan yang merupakan pusat pariwisata di Indonesia, berdampak besar bagi perkembangan pariwisata di Yogyakarta yang merupakan daerah tujuan wisata kedua setelah Bali.
2. Sumber daya manusia setempat mencerminkan keadaan masyarakat Yogyakarta secara keseluruhan yang selalu menjaga keharmonisan dan diteladani sendiri oleh Sultan HB X. Tentu saja dalam era global kondisi seperti ini merupakan hambatan dalam persaingan usaha. Sebagai contoh, pengusaha pendatang tidak merasa memiliki Yogyakarta, tetapi hubungan antar masyarakat Yogyakarta sangat berpengaruh terhadap keberadaan mereka. Akibatnya, terjadi dilema antara perilaku Jawa yang mementingkan ketenangan dan keharmonisan dengan perilaku pasar global yang dinamis.

Menumbuhkan citra daerah pariwisata

Melakukan kegiatan yang dapat meyakinkan dunia bahwa pariwisata di Yogyakarta bercitra baik merupakan pekerjaan yang membutuhkan pemikiran keras. Kita patut mengacungkan jempol terhadap kepeloporan dari PUSPAR-UGM yang mempunyai ide menghidupkan kembali Kotagede, dari STUPPA yang berupaya mencari jaringan tingkat nasional dan internasional demi perkembangan pariwisata DIY. Semua usaha mereka didukung oleh kebijakan pemerintah daerah yang berusaha meningkatkan citra Yogyakarta sebagai kota budaya. Dengan cara itu, diharapkan akan tumbuh aktivitas di berbagai sektor dan usaha-usaha lokal yang terkenal seperti kerajinan batik, perak, gerabah dan makanan khas Yogyakarta dapat dihidupkan kembali.

Sejak tahun 2000, dinas pariwisata telah bersiap menyambut AFTA 2003/4. Agar pariwisata dapat masuk ke tingkat pedesaan dan

dapat menambah penghasilan masyarakat. Pemerintah Daerah telah mulai membina desa-desa wisata yang disiapkan untuk bisa menyerap para wisatawan domestik maupun mancanegara.

Desa yang sudah dibina menjadi desa wisata adalah:

1. Desa Brayur, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Sleman
2. Desa Tembi, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul

Kedua desa tersebut menjadi desa percontohan yang diharapkan bisa dicontoh oleh desa-desa lain. Kedua desa tersebut dikembangkan dengan menciptakan berbagai peralatan rumah tangga yang dibuat oleh masyarakat setempat dan bisa dijual sebagai barang kerajinan untuk konsumsi pasar dalam negeri maupun luar negeri. Bahan baku diperoleh dari sekitar desa-desa tersebut, seperti batang-daun-serabut-tempurung kelapa, rumput, pelepah pisang, dan lain-lain. Desa wisata tersebut dibentuk berdasarkan kerja sama dengan biro perjalanan dan hotel-hotel. Sistem ini dikenal dengan nama PIR atau Pariwisata Inti Rakyat; hotel-hotel besar membina desa pariwisata. Desa pariwisata sudah ada hasilnya dengan sering dipakai sebagai studi banding propinsi lain, antara lain Propinsi Sumatra Barat dan Kalimantan Timur. Desa-desa seperti ini biasanya disenangi turis Eropa tapi tidak disukai oleh turis Asia.

Dalam pengembangan wilayah pariwisata antar daerah, sudah dilakukan bentuk kerjasama antar pemerintah daerah, hal ini merupakan persoalan *cross border* dalam menentukan obyek ekoturisme di daerah-daerah yang berbatasan. Seperti antara daerah Gunung Kidul, Pacitan dan Wonogiri, karena ketiga daerah tersebut merupakan wilayah dua provinsi yang berbeda, yaitu DIY dan Jawa Tengah. Demikian juga Candi Prambanan yang letaknya berbatasan juga menjadi wewenang dua provinsi tersebut. Padahal dalam pariwisata sangat dibutuhkan partisipasi masyarakat. Partisipasi mereka merupakan hak masyarakat dan itu tercantum dalam UU tahun 1990. Persoalan pokoknya pada masa Pemerintah Orde Baru adalah karena selama itu pemerintah hanya menentukan kewajiban masyarakat, misalnya dengan program SAPTA PESONA. Padahal untuk mengembangkan ekoturisme dibutuhkan empati masyarakat setempat terhadap pariwisata. Oleh sebab itu, untuk mengembalikan citra wisata yang positif, harus menciptakan interaksi yang harmonis antara lembaga pemerintah dan masyarakat kedua daerah tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Arwan Tuti Artha. (2000)
Yogyakarta Tempo Dulu, Sepanjang Catatan Pariwisata, Yogyakarta : Penerbit PT Bayu Indra Grafika.
- BAPPEDA Propinsi DIY. (2002)
Revitalisasi Ekonomi Makro Yogyakarta Tahun 2002, Yogyakarta: Bappeda Provinsi DIY, Yogyakarta.
- Dinas Pariwisata Provinsi DIY dan PUSPAR-UGM. (2001)
Kaji Ulang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah Propinsi DIY, Yogyakarta.
- Djojohadikusumo, Sumitro. (1994)
Dasar Teori Ekonomi Pertumbuhan dan Ekonomi Pembangunan, Jakarta : LP3ES.
- GKBI. (2001)
'Managemen dan Wirausaha', GKBI edisi 13 Th. VI, Jakarta 2001.
-(2001)
'Pengembangan Usaha GKBI', GKBI edisi 13 Th. VI, Jakarta 2001
- Kusworo, Hendrie Adji. dkk (2001)
Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan: Peluang pengusaha Kecil dan Menengah Dalam Perkembangan Pariwisata Internasional, Yogyakarta : Lembaga Penelitian Universitas Gadjah Mada.
- Kompas (2001)
Belajar Untuk Terpesona di Kotagede, *Kompas Minggu*, 14 - 10 - 2001, hlm. 16.
- Kompas (2002)
Himalaya Mengatasi Kemiskinan Melalui Pariwisata, *Kompas*, 9 September 2002.
- Media Indonesia (2002)
Mengupayakan Ceplok Bercita Rasa Internasional, *Media Indonesia*, 15 - 9 - 2002, hlm. 10.
- Mulyani, Sri Indrawati dan Ninasapti Triaswati (1995)
'Tantangan Transformasi SDM Indonesia Menghadapi Era Globalisasi' dalam Alumni FEUI dan Tantangan Masa Depan: Beragam Pemikiran, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.
- Schultz, Theodore W (1967)
Transforming Traditional Agriculture, New York : Yale University Press.
- Suwantoro, Gamal (2001)
Dasar-dasar Pariwisata, Yogyakarta : Penerbit Andi Yogyakarta.

BAGIAN KETIGA

**KUALITAS TENAGA KERJA DI INDUSTRI
PERHOTELAN DAN KERAJINAN BATIK
DI YOGYAKARTA :**

Dalam Perspektif Sosial-Kependudukan

Daliyo

Pendahuluan

Industri pariwisata adalah semua kegiatan yang terkait dengan pariwisata, termasuk perhotelan, restoran, kerajinan cinderamata, transportasi, biro jasa perjalanan, tempat hiburan, objek wisata, atraksi budaya dll (Suwanto, 2001). Di antara usaha kegiatan-kegiatan tersebut yang banyak menyerap tenaga kerja adalah usaha perhotelan dan usaha kerajinan cinderamata. Tulisan ini bertujuan untuk menyajikan tentang keadaan kualitas tenaga kerja di dua usaha industri pariwisata (perhotelan dan kerajinan batik) dalam perspektif kependudukan di Kota Yogyakarta. Dalam penyajian antara lain akan

diungkap tentang karakteristik demografis tenaga kerja, pekerjaan dan pendapatan, mobilitas pekerjaan dan kualitas tenaga kerja. Dalam kualitas tenaga kerja akan disajikan tentang bagaimana penyiapannya, tingkat pendidikan dan ketrampilan serta teknologi yang digunakan, bidang dan kesesuaian dengan pekerjaan serta produktivitas yang terkait dengan kondisi demografisnya.

Bahan tulisan mendasarkan pada hasil wawancara mendalam, pengumpulan bahan dokumentasi dan observasi. Sasaran penelitian adalah sekolah/ pendidikan pariwisata, hotel dan perusahaan yang terkait/pendukung industri pariwisata. Sampel penelitian adalah 4 sekolah/ perguruan tinggi pendidikan pariwisata (2 buah Sekolah Menengah Kejuruan Kelompok Pariwisata dan 2 buah Perguruan Tinggi Pariwisata), 4 buah hotel (hotel berbintang dan melati), dan 4 buah perusahaan batik (2 buah perusahaan batik tradisional/ klasik dan 2 buah perusahaan batik modern). Di samping itu, wawancara mendalam juga dilakukan dengan pihak Bappeda Tingkat I sebagai pembuat kebijakan; Dinas Pariwisata sebagai pelaksana kebijakan; pusat-pusat studi pariwisata (PUSPAR-Pusat Penelitian & Pengembangan Pariwisata dan STUPPA - Studio Perencanaan Pariwisata) sebagai institusi yang banyak mengadakan studi mengenai kepariwisataan dan pelatihan bagi para pelaku usaha pariwisata; Dinas Pendidikan Propinsi dan Dinas Perindustrian & Perdagangan untuk mendapatkan data usaha-usaha di industri pariwisata; PHRI (Perhimpunan Hotel & Restoran Indonesia) dan Koperasi Batik untuk mendapatkan informasi tentang dinamika perhotelan dan usaha pengrajin batik. Observasi dilakukan di semua lokasi sampel dan bahan dokumentasi diperoleh di hampir semua instansi.

Seting daerah dan kependudukan

Kota Yogyakarta merupakan ibukota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan sekaligus merupakan satu-satunya daerah tingkat II yang berstatus sebagai *kota* atau sebelumnya sebagai kotamadya. Pada masa revolusi kemerdekaan pernah dijadikan ibukota Republik Indonesia. Di kota inilah sebagai pusat kebudayaan Jawa dan terletak Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat, Puro Pakualaman dan berbagai museum, lembaga-lembaga kesenian, kerajinan seni serta terdapat berbagai fasilitas kepariwisataan.

Luas wilayah Kota Yogyakarta hanya sebesar 32,5 km² (BPS, 2001b). Sedangkan jumlah penduduk Kota Yogyakarta tahun 1980 sebesar 398 192 orang, selanjutnya meningkat menjadi 412 059 orang

pada tahun 1990 dan anehnya malah menurun pada tahun 2000 hanya mencapai 394 917 orang (BPS, 1983; BPS, 1992; BPS, 2001). Menurut tingkat pertumbuhannya, pada tahun 1980-1990 hanya 0,34 persen dan menurun menjadi - 0,44 persen pada tahun 1990-2000. Kepadatan penduduk kota pada tahun 1990 sebesar 13 524 orang/ km² dan menurun menjadi 12 153 orang/km² pada tahun 2000. Meskipun mengalami penurunan namun dengan angka di atas 10 000 orang/ km² tersebut masih menunjukkan bahwa kota ini termasuk kota yang padat penduduk. Penurunan jumlah, pertumbuhan dan kepadatan penduduk kota tersebut disebabkan makin gencarnya pertumbuhan permukiman di wilayah sekitarnya (seperti di wilayah bagian selatan Kabupaten Sleman, antara lain : di Kecamatan Depok (Condong Catur, Sekitar Kampus UGM dan Kampus UNJ), Kecamatan Gamping, Kecamatan Mlati, Kecamatan Berbah dll. ; dan di wilayah bagian utara Kabupaten Bantul, antara lain: di Kecamatan Kasihan (sekitar Madukismo, Bangunjiwo), Kecamatan Sewon, Kecamatan Banguntapan dsb). Pertumbuhan permukiman yang pesat tersebut menyebabkan makin banyak penduduk kota yang tertarik tinggal di luar kota, meskipun tempat kerjanya tetap di kota. Dari lokasi permukiman tersebut masih sangat mudah dan cepat untuk menjangkau ke tempat kerja di Kota Yogyakarta.

Meskipun penduduk Kota Yogyakarta dalam 10 tahun terakhir mengalami penurunan karena banyak yang pindah ke luar kota, namun ada pula penduduk perdesaan Yogyakarta dan propinsi lain yang malah sebaliknya masuk Kota Yogyakarta, baik sebagai penduduk tetap maupun sebagai penghuni sementara. Mereka adalah migran muda untuk melanjutkan pendidikan dan para wiraswatawan untuk mengembangkan usaha di Kota Yogyakarta, termasuk dalam industri pariwisata. Seperti usaha agen perjalanan, usaha wartel dan warnet, *money changer*, penginapan dan kos-kosan pelajar/ mahasiswa, rumah makan dan usaha dagang barang antik (*art shop*). Di samping yang tidak kalah pentingnya adalah masuknya tenaga kerja dari luar Kota Yogyakarta untuk mencari kerja dan bekerja di sektor jasa dan kerajinan, seperti perhotelan dan di industri kerajinan batik.

Kota Yogyakarta terletak pada posisi sentral dari wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Secara topografis wilayahnya masih merupakan dataran kaki Gunung Merapi, sedikit miring dari utara ke selatan dan *drainage*-nya cukup bagus, sebab wilayah kota ini terbelah oleh tiga sungai yang mengalir dari utara ke selatan. Oleh karena itu, di Kota Yogyakarta sangat jarang terjadi banjir yang menggenangi sebagian wilayah kota seperti di wilayah Daerah Khusus

Ibukota Jakarta dan kota-kota lainnya yang terjadi hampir di setiap tahun. Sungai-sungai tersebut adalah Sungai Gajah Wong, Sungai Code dan Sungai Kenongo. Kota ini juga cukup strategis sebagai pusat pemerintahan propinsi, pusat pendidikan, pusat kebudayaan Jawa, pusat kegiatan pariwisata dan industri-industri pendukungnya.

Sejarah Kota Yogyakarta dimulai sejak adanya Kerajaan Pajang (1568-1586) di bawah pemerintahan Sultan Hadiwijaya. Kemudian Kerajaan Pajang surut dan berdiri Kerajaan Mataram di bawah pemerintahan Panembahan Senopati. Pada abad ke-18, Kerajaan Mataram diperintah Sri Paku Buwono II, sepeninggalnya terjadi pertikaian antar kerabat kerajaan. Dengan Perjanjian Gianti, wilayah kerajaan dibagi dua, yaitu Kerajaan Surakarta Hadiningrat dan Ngayogyakarta Hadiningrat, termasuk Kadipaten Pakualaman/ Adikarto. Kerajaan Ngayogyakarta Hadiningrat/Kasultanan Yogyakarta tersebut sekarang dikenal dengan Yogyakarta atau nama wisata '*Jogja*' dengan pusatnya Kota Yogyakarta. Setelah Proklamasi Kemerdekaan (September 1945) atas kehendak Sri Sultan Hamengku Buwono IX, Yogyakarta menyatakan diri bergabung dengan NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) (Soempono Djojowadono, 1989). Sebagai imbalannya Yogyakarta diberi status Daerah Istimewa, di mana gubernurnya sejak Sri Sultan Hamengku Buwono IX adalah Sultan dan wakilnya Sri Paku Alam. Oleh karena itu, bagi propinsi ini Sultan dapat berperan ganda, kecuali sebagai simbol *Penguasa Daerah* secara formal (Gubernur Kepala Daerah), juga sebagai simbol seorang *Raja* sebagai pelestari budaya Jawa dan dengan keraton sebagai *simbol pertahanan budaya* (Gerald Gay, 1989). Sehubungan dengan itu, Yogyakarta juga dikenal sebagai salah satu *Pusat Kebudayaan Jawa*. Sebagai pusat budaya telah dilestarikan keberadaan adat budaya Keraton Yogyakarta, kesenian Jawa (seni tari, seni karawitan, seni pedalangan, seni lukis, seni teater, seni tradisional wayang dan ketoprak, kerajinan batik dan perak), peninggalan candi, musium, arsitektur rumah joglo, kendaraan andong, beca dsb. Untuk mendukung pengembangan dan pelestarian budaya tersebut diperlukan banyak sumber daya manusia yang berkualitas dan profesional.

Untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia sebagai tenaga ahli, terdidik dan terlatih yang dibutuhkan, pada awal kemerdekaan Pemerintah RI memandang perlu untuk mendirikan suatu universitas. Universitas pertama di Indonesia yang lahir pada masa awal kemerdekaan ada di Kota Yogyakarta, yaitu Universitas Gadjah Mada (tahun 1949). Kemudian diikuti dengan munculnya berbagai

perguruan tinggi lain baik negeri maupun swasta dengan membuka berbagai fakultas, jurusan dan program studi. Saat ini di Kota Yogyakarta ada 89 perguruan tinggi, yang terdiri dari 15 universitas, 5 institut, 20 sekolah tinggi, 46 akademi dan 3 politeknik (Kopertis Wilayah V, 2001). Kemudian juga munculnya ratusan SLTA baik negeri maupun swasta. Hal ini menjadikan Kota Yogyakarta tumbuh menjadi kota pelajar dan dikenal sebagai pusat pendidikan sejak tahun 50-an. Berbagai fasilitas transportasi dan akomodasi yang terus dibangun di kota ini yang menyebabkan banyak para pelajar dari berbagai penjuru tanah air ingin melanjutkan pendidikannya di Kota Yogyakarta. Akibatnya banyak arus mobilitas anak-anak muda lulusan SLTA masuk ke Kota Yogyakarta sejak tahun 50-an sampai sekarang.

Seluruh kondisi Yogyakarta yang berupa kekayaan baik fisik maupun sosial budaya tersebut yang menjadikan wilayah ini menjadi *Daerah Tujuan Wisata* (DTW). Kemudian kondisi tersebut didukung oleh berbagai fasilitas akomodasi yang memadai, seperti hotel berbintang, hotel melati, penginapan, losmen dan *homestay*; transportasi yang mudah dan lancar serta agen perjalanan yang memadai. Ketersediaan akomodasi yang memadai merupakan sarana yang sangat penting dalam rangkaian menarik wisatawan masuk ke Yogyakarta, dan membuat mereka merasa kerasan dan nyaman tinggal lebih lama di daerah ini (Hendrie Adji Kusworo dkk, 2001). Hotel yang tertua dan berbintang V, yang berdiri sejak sebelum kemerdekaan adalah Hotel Garuda. Kemudian muncul hotel-hotel berbintang lain berada di jalur-jalur jalan besar, seperti Jalan Malioboro dan Jalan Jenderal Sudirman. Sedang hotel-hotel melati atau jenis penginapan lain tersebar di wilayah-wilayah perkampungan, seperti di Jalan Sosrowijayan, Jalan Prawirotaman, Jalan Mangkubumi, Jalan Pasar Kembang, Jalan Taman Siswo dan Jalan Mangkuyudan.

Sebagai salah satu industri yang terkait dengan pariwisata, telah lama tersedia berbagai industri kerajinan sebagai cenderamata (*souvenir*) atau sebagai buah tangan yang khas Yogyakarta. Berbagai hasil kerajinan rakyat yang terkenal sebagai cenderamata bagi para wisatawan, antara lain hasil kerajinan batik, kerajinan perak, kerajinan kulit, kerajinan bambu dan kayu, barang antik serta gerabah. Di antara kerajinan-kerajinan cenderamata tersebut, batik merupakan hasil kerajinan yang paling terkenal sejak dahulu bahkan sebelum merdeka dan merupakan salah satu warisan budaya keraton yang tetap dipertahankan (Sekar Jagad, 2001). Usaha industri kerajinan dan jumlah toko yang paling banyak di Kota Yogyakarta sejak dulu sampai sekarang

adalah batik. Batik merupakan salah satu jenis hasil industri kerajinan yang memiliki seni budaya yang tinggi dan luhur (*adiluhung*). Yogyakarta merupakan salah satu pusat batik klasik dengan ciri pola yang menonjol dan dengan warna yang tradisional, yaitu warna biru nila yang dipadukan dengan warna soga coklat dan warna dasar putih (Hani W., 2002). Banyak motif-motif batik yang tetap mempertahankan motif-motif Keraton Yogyakarta dan disebut *motif klasik*. Namun dalam perkembangannya akhir-akhir ini telah ada juga industri kerajinan batik yang sudah mulai mengembangkan motif modern dan motif lukis. Batik sebagai cenderamata yang menarik bagi para wisatawan dan merupakan khas Yogyakarta, telah memunculkan adanya moto untuk wisatawan '*belum ke Jogja bila belum membawa atau membeli batik*' (Wawancara mendalam, 2002).

Karakteristik Sosial-Demografi Tenaga Kerja

Usaha dalam industri pariwisata di Kota Yogyakarta seperti telah disinggung di muka, terdiri dari berbagai macam, mulai dari perhotelan/ akomodasi, agen perjalanan, industri kerajinan, objek wisata dll. Di antara industri-industri pariwisata di Kota Yogyakarta tersebut yang cukup banyak menyerap tenaga kerja adalah perhotelan dan industri kerajinan. Oleh karena itu, dalam sampel penelitian yang diteliti lebih terfokus ke tenaga kerja perhotelan dan kerajinan, yaitu kerajinan batik. Jumlah hotel berbintang yang ada di Kota Yogyakarta sebanyak 23 (dari Bintang I - V) dan hotel melati sebanyak 222 (dari Melati I - III) (Dinas Kebudayaan & Pariwisata DIY, 2001). Jumlah tenaga kerja diperkirakan di atas 5000 orang. Sedangkan untuk industri kerajinan batik pada tahun 60-an pernah mencapai 500 pengusaha lebih, sekarang (tahun 2002) sekitar 100 pengusaha, dengan jumlah tenaga kerja diperkirakan sekitar 1000 orang. Dari sejumlah industri batik yang masih bertahan tersebut dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu industri batik tradisional/ klasik dan industri batik modern (lukis). Dalam pembahasan berikut ini akan menguraikan tentang karakteristik tenaga kerja yang ada di perhotelan dan industri kerajinan batik di Kota Yogyakarta.

Umur dan jenis kelamin tenaga kerja

Tenaga kerja yang dipekerjakan di dua jenis industri tersebut dilihat dari usia menunjukkan perbedaan nyata. Para tenaga kerja di perhotelan umumnya adalah mereka yang berusia muda atau usia sangat

produktif. Mereka kebanyakan berusia antara 20 - 40 tahun. Hal ini disebabkan para pengusaha hotel memang memerlukan tenaga yang masih produktif, usia muda dan sebagian berpendidikan tinggi dan sebagian berkecakupan sesuai dengan kebutuhan hotel. Sebab memang bidang-bidang pekerjaan yang dilakukan menuntut pendidikan dan kecakupan dalam bidang perhotelan. Di samping itu, juga usaha perhotelan mengikuti peraturan formal ketenagakerjaan, yang membatasi usia kerja karyawan hanya dari 18 tahun sampai usia pensiun (55 tahun). Sedangkan di industri kerajinan batik, yang tidak mengikuti peraturan formal ketenagakerjaan pada umumnya masih mempekerjakan tenaga kerja yang sudah tua, yaitu di atas 55 tahun. Hal ini disebabkan peremajaan tenaga kerja di industri batik tidak mudah dan jenis pekerjaan yang dilakukan lebih memerlukan kecakupan khusus dalam pembatikan dan tidak memerlukan pendidikan formal.

Makin tuanya usia tenaga kerja di industri kerajinan batik mempunyai implikasi terhadap penurunan produktivitas perusahaan. Secara demografis tenaga kerja yang telah berusia di atas 55 tahun sudah termasuk tenaga kerja yang sudah kurang produktif lagi. Meskipun ada kasus istimewa, seperti seorang *Simbah* (nenek) pembatik Ny. S. berasal dari pedesaan Bantul yang dalam usia 90 tahun lebih masih mampu membatik, tanpa bantuan pola dan tanpa menggunakan kacamata. Namun secara umum kemampuan fisik dan kemampuan kreativitas mereka sudah banyak menurun. Pada waktu masih muda dapat menyelesaikan pembatikan sekitar 1 bulan per lembar, namun sekarang bisa mencapai 3 bulan per lembar. Di usia-usia di atas 55 tahun dalam institusi formal memang mereka sudah merupakan usia pensiun dan perlu diganti tenaga kerja yang lebih muda dan lebih produktif. Oleh karena itu, kualitas tenaga kerja dalam arti produktivitas di kerajinan batik tersebut telah banyak yang sudah menurun. Kemudian ditambah usia para pengusaha atau pemiliknya juga kebanyakan telah mencapai usia tidak produktif di atas 60 tahun. Selama ini gejala digantikan oleh tenaga yang muda juga masih kurang nampak. Anak-anak pembatik cenderung bercita-cita menjadi pegawai pemerintah atau swasta setelah lulus pendidikan. Seperti ada kasus pengusaha batik Bapak T. usia mendekati 70 tahun, anak-anaknya lulusan perguruan tinggi, namun mereka tidak mau meneruskan usaha orangtuanya. Malahan mereka telah bekerja sebagai dosen dan pegawai swasta yang tidak ada keterkaitannya dengan usaha kerajinan batik. Meskipun juga masih ada waktu untuk membantu usaha orang tuanya.

Dalam usia yang terus menua dan kreativitas usaha para pengusaha cenderung menurun, dampak berikutnya produktivitas perusahaan akan semakin menurun dan masa depan perusahaan-perusahaan tersebut terutama pengusaha batik pola tradisional/ klasik perlu dipertanyakan.

Daerah asal dan mobilitas tenaga kerja

Sebagian besar tenaga kerja baik di industri perhotelan maupun di kerajinan batik berasal dari migran luar Kota Yogyakarta. Di perhotelan tenaga kerja/ karyawan yang dipekerjakan sebagian besar dari luar kota. Hanya di hotel yang berbintang yang kebanyakan tenaga kerjanya telah menjadi penduduk tetap di Kota Yogyakarta, namun sebelumnya sebagian dari mereka berasal dari luar kota. Mereka memang sebelumnya mengikuti pendidikan di sekolah-sekolah menengah atau perguruan tinggi di Kota Yogyakarta, setelah lulus bekerja di perhotelan di Kota Yogyakarta dan menjadi penduduk tetap di kota. Sedangkan di hotel-hotel melati banyak tenaga kerjanya yang langsung berasal dari luar kota dan langsung dipekerjakan di hotel. Mereka berasal dari perdesaan di Bantul, Kulon Progo dan Gunung Kidul dan ada sebagian yang '*nglajo*' (*ulang alik*) dari tempat asal.

Sedangkan para tenaga kerja di industri kerajinan batik hampir seluruhnya berasal dari luar kota/ perdesaan. Umumnya mereka sebagai migran sirkuler, baik sebagai migran ulang-alik tiap hari maupun migran sirkuler mingguan. Bagi tenaga kerja yang mobilitas ulang-alik atau '*nglajo*', umumnya mereka memanfaatkan alat transportasi sepeda *pancal* atau *onthel* /tanpa motor, meskipun jarak yang ditempuh antara 6 - 10 km lebih. Mereka berasal dari daerah-daerah kering dan daerah miskin yang di daerah asalnya hanya memiliki lahan pertanian yang sempit atau bahkan tidak memiliki lahan sama sekali. Sebagian dari mereka berasal dari keluarga yang secara turun temurun sebagai pembatik atau bekerja di kerajinan batik. Desa-desa/ dusun-dusun sumber tenaga kerja batik dari perdesaan Kabupaten Bantul antara lain Imogiri, Selarong, Srandakan, Ciren dan Madukismo. Dari pedesaan Kabupaten Kulon Progo antara lain berasal dari Sentolo dan Brosot. Sedangkan dari perdesaan Kabupaten Klaten berasal dari Desa Bayat.

Dampak dari tenaga kerja kerajinan batik bermobilitas sirkuler harian (*nglajo*) dan ditambah dengan para tenaga kerja usianya yang umumnya telah makin menua sangat dimungkinkan akan berdampak negatif terhadap kualitas atau produktivitas tenaga kerja. Dengan mobilitas dalam jarak yang cukup jauh, penggunaan alat transportasi hanya memanfaatkan sepeda *pancal* dan akan membuang energi yang

banyak dalam perjalanan tiap pagi dari rumah desa asal ke tempat kerja di kota. Di samping itu, harus diingat bahwa usia mereka kebanyakan telah mendekati tidak produktif lagi dan bahkan sebagian yang lain telah berusia tidak produktif lagi. Hal ini jelas berpengaruh terhadap penurunan stamina dan produktivitas kerjanya. Oleh karena itu, jarang dijumpai tenaga kerja kerajinan batik ini yang berpenampilan ceria, mereka kebanyakan kelihatan kusut, loyo dan terlihat ketuaannya serta kurang bergairah.

Lapangan dan jenis pekerjaan

Lapangan kerja yang diteliti adalah industri perhotelan dan industri kerajinan batik. Dalam perhotelan banyak variasi jenis pekerjaan yang ada, mulai dari resepsionis, *bell boy*, *house keeper*, pelayan restoran, penjaga keamanan/ satpam dsb. Ada dua jenis pekerjaan yang dilakukan di hotel yang diteliti. Hotel yang berbintang umumnya mengetrapkan pembagian kerja secara spesifik, sesuai dengan ketrampilan yang dimiliki karyawannya atau bidang tugas yang diberikan. Pembagian pekerjaan menurut jenis kelamin tidak begitu nampak, kecuali untuk tenaga keamanan umumnya laki-laki. Hotel berbintang ini telah memanfaatkan struktur organisasi dan manajemen yang sudah baik dan modern. Sebaliknya di hotel-hotel melati banyak hotel yang masih mengetrapkan manajemen kekeluargaan dan kurang profesional. Struktur organisasi dan pembagian kerjanya kurang jelas. Ada tenaga kerja yang harus melakukan pekerjaan srabutan dalam arti satu karyawan harus mampu dan mau ditugaskan di berbagai bagian sesuai dengan kebutuhan. Mungkin hal tersebut disebabkan jumlah karyawannya sedikit dan jumlah kamarnya tidak banyak. Hotel-hotel tersebut juga kurang dapat membina karyawan secara profesional.

Bagi industri kerajinan batik, hampir di semua perusahaan, masing-masing karyawannya memiliki pekerjaan yang spesifik dan jenis pekerjaan juga dilakukan menurut jenis kelamin. Dalam usaha batik pekerjaan dari *desain* gambar (membuat pola), pembatikan (*'nyerat'* - bhs. lokal), pengecapan, kerok, pencelupan/ pewarnaan/ pembabaran dan pemasaran dilakukan oleh tenaga karyawan yang berbeda. Masing-masing telah memiliki ketrampilan khusus di bidang pekerjaannya dan tidak mudah untuk dimutasikan ke bagian yang lain. Jenis pekerjaan pembatikan dan *pengerokan* lilin (*malam*) umumnya dilakukan oleh tenaga wanita, sebab jenis pekerjaan ini memang sangat memerlukan *ketelatenan* dan ketelitian yang tinggi. Sedangkan jenis pekerjaan pengecapan, *pembabaran* dan pewarnaan biasanya dilakukan oleh tenaga

laki-laki. Pekerjaan ini memerlukan ketahanan fisik yang tinggi, mampu berdiri berjam-jam dan perlu kecermatan yang tinggi. Sedangkan tenaga kerja untuk membuat gambar pola batik (*desainer*) dipilih tenaga yang sudah ahli, kreatif dan mampu menyerap selera pasar. Hal ini biasanya dilakukan oleh tenaga khusus yang sudah berpengalaman bersama pemilik/pengusaha atau kadang dilakukan oleh pemiliknya sendiri, yang kebetulan kebanyakan laki-laki. Namun ada juga tenaga pembuat pola perempuan, namun sangat jarang. Untuk tenaga dalam pelayanan pemasaran kebanyakan dilakukan tenaga perempuan. Biasanya tenaga perempuan lebih pintar menawarkan atau memasarkan, karena pembelinya juga kebanyakan perempuan. Oleh karena itu, apabila memperhatikan pasar-pasar di Yogyakarta (seperti Pasar Beringharjo) dan toko-toko terutama tempat penjualan batik, umumnya penjualan/pedagang dilakukan oleh perempuan. Dalam naluri pembagian pekerjaan di Yogyakarta, di pedesaan pekerjaan seperti bertani dan usaha-usaha yang lain kebanyakan dilakukan kaum laki-laki. Sedangkan untuk menjual hasil atau memperdagangkannya dilakukan perempuan. Juga dalam industri batik, pengusaha, pencari bahan baku dan angkutan ke pasar dilakukan oleh laki-laki (suami). Sedangkan yang memasarkannya umumnya dilakukan oleh perempuan (isteri).

Lama Kerja tenaga kerja

Ada perbedaan yang agak mencolok lama masa kerja para karyawan di perhotelan dan kerajinan batik. Karyawan di perhotelan kebanyakan lama masa kerja masih pendek, yaitu di bawah 10 tahun. Nampaknya lama masa kerja tersebut lebih dipengaruhi oleh usia hotel yang kebanyakan belum lama berdiri atau mulai menerima tamu. Kebanyakan hotel tersebut baru berdiri sekitar 10 tahun terakhir. Ada hotel yang diteliti telah berusia lama yang berdiri sejak sebelum kemerdekaan, banyak karyawan yang lama masa kerjanya (di atas 10 tahun). Namun demikian di perhotelan ini juga ada pembatasan usia kerja, apabila telah berusia di atas 55 tahun akan dipensiun.

Bagi kerajinan batik tidak ada istilah pensiun untuk karyawannya. Oleh karena itu, selagi karyawannya masih mampu dan mau bekerja, mereka tetap dipekerjakan. Meskipun banyak karyawan kerajinan batik ini yang telah berusia di atas 60 tahun. Hal ini disebabkan bagi pengusaha kerajinan batik tidak mudah mencari tenaga kerja baru yang muda. Tenaga kerja yang masih mau dan masih mempunyai ketrampilan dalam pembatikan hanya mereka yang sudah berusia tua. Hanya dengan ketuaannya jelas kualitas/ produktivitasnya

sudah cenderung makin menurun. Sedangkan tenaga mudanya termasuk anak-anaknya banyak yang sudah tak tertarik bekerja di kerajinan batik. Di samping merupakan pekerjaan yang tak bergensi, juga pendapatannya kurang menarik dan mungkin dianggap terlalu kecil.

Alasan memilih pekerjaan

Mengapa para karyawan tertarik memilih pekerjaan tersebut? Jawaban yang diberikan untuk karyawan hotel memang bervariasi, bagi karyawan yang berpendidikan diploma umumnya mengatakan pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan bidang pendidikan yang diperoleh. Sehingga merasa cocok dengan jenis pekerjaan yang dilakukan. Sedangkan bagi mereka yang berpendidikan SLTA ke bawah umumnya mengatakan karena tidak ada jenis pekerjaan lain yang mau menerima dirinya. Oleh karena itu, mereka biasanya ditempatkan pada pekerjaan yang tidak menuntut latar belakang pendidikan spesifik. Mereka ditempatkan di pekerjaan yang hanya memerlukan pelatihan beberapa saat atau hari langsung bisa mengerjakan, seperti *house keeping* atau *bell boy*.

Bagi karyawan di kerajinan batik mereka memilih pekerjaan di kerajinan batik sebab di kampungnya tidak ada kesempatan kerja. Umumnya mereka berasal dari petani miskin, yaitu petani pemilik lahan sempit atau bahkan tidak punya lahan sama sekali. Mereka mengolah lahan hanya dalam waktu yang pendek dan sisa waktunya yang banyak digunakan untuk bekerja di kota sebagai buruh/ karyawan di kerajinan batik. Kebanyakan tenaga kerja tersebut memang ada yang telah turun-temurun melakukan pekerjaan di industri kerajinan batik. Menurut pengakuan beberapa pemilik industri kerajinan batik, apabila pesanan batik sedang tidak banyak, pada waktu musim pengolahan lahan atau menanam padi di desa asal pekerjanya, para pekerja tersebut biasanya diberi kesempatan untuk tidak masuk kerja. Agar mereka dapat mengolah lahan pertanian atau menanam dan memanen padi, setelah selesai pekerjaan pertanian boleh mulai bekerja di kerajinan batik lagi. Akan tetapi apabila pesanan batik cukup banyak dan kebetulan bersamaan waktunya dengan pekerjaan di pertanian, mereka diminta kerelaannya untuk bekerja di pembatikan. Untuk kegiatan di pertanian sementara dapat diserahkan kepada keluarganya yang tidak ikut bekerja di pembatikan.

Pendapatan tenaga kerja dan pengaruhnya terhadap kualitas tenaga kerja

Ada perbedaan yang mencolok antara pendapatan/gaji/upah tenaga kerja di industri perhotelan dan industri kerajinan batik. Pendapatan/gaji tenaga kerja di perhotelan umumnya sudah cukup baik, yaitu telah sama atau sebagaimana telah mencapai di atas UMR (upah minimum regional). UMR di propinsi ini pada tahun 2002 sebesar Rp 320 000,-. Sedangkan upah tenaga kerja di industri kerajinan batik umumnya masih di bawah UMR. Banyak di antara mereka terutama di bagian membatik (*nyerat* - istilah Jawa) yang sebagian besar perempuan masih di bawah Rp 300 000,- per bulan. Khusus di bagian pengecapan yang jumlahnya tidak banyak dan semuanya laki-laki telah mendekati UMR.

Sejak tahun 70-an di Yogyakarta telah bermunculan usaha penginapan/ perhotelan, meskipun tingkatnya hanya melati. Ini disebabkan karena usaha perhotelan nampaknya lebih menjanjikan dari pada usaha lain seperti di industri kerajinan batik. Dari hasil wawancara di empat koperasi batik di Kota Yogyakarta menunjukkan bahwa para pengusaha batik di Kota Yogyakarta sejak tahun 70-an sudah banyak yang melakukan alih usaha dari usaha kerajinan batik ke usaha penginapan, baik berupa hotel, penginapan, losmen atau *home stay*. Kecenderungan ini sebagai akibat usaha kerajinan batik tidak banyak menguntungkan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelum 70-an. Lesunya usaha batik karena adanya pesaing dari usaha *batik printing* yang memproduksinya cepat dan harganya lebih murah. Masalah lain juga adanya kesulitan dalam bahan baku, dalam arti ketersediaannya dan harganya yang semakin tinggi. Akibatnya keuntungan yang diterima pengusaha batik tulis dan cap makin menurun. Keuntungan yang makin menurun tersebut yang menyebabkan kemampuan usaha batik untuk memberikan upah yang layak kepada para pekerjanya semakin menurun. Hal ini terefleksi dengan kemampuan para pengusaha memberikan upah masih di bawah UMR. Meskipun pengusaha batik telah menolong para pekerjanya agar mampu bertahan dengan memberi makan sekali, namun dengan upah yang rendah jelas berpengaruh terhadap kualitas tenaga kerja dan produktivitas tenaga kerja. Pendapatan yang rendah (di bawah UMR) berdampak terhadap daya beli rumah tangga yang rendah dan tingkat konsumsi dan kualitas bahan makanan yang rendah. Tingkat konsumsi rumah tangga dan kualitas bahan makanan yang rendah tersebut akan berpengaruh terhadap stamina atau daya tahan tenaga kerja. Apalagi hampir sebagian besar pekerjaan di kerajinan batik

memerlukan ketahanan fisik yang tinggi. Pendapatan yang rendah di kerajinan batik tersebut menyebabkan para generasi muda banyak yang tidak mau lagi meneruskan pekerjaan yang dilakukan oleh orang tuanya. Dampak berikutnya adalah putusnya regenerasi tenaga pengrajin batik tulis ke generasi yang lebih muda.

Mobilitas Pekerjaan Tenaga Kerja

Bagi para pekerja di perhotelan umumnya mereka tidak pernah bekerja sebelum dipekerjakan di hotel tempat bekerja. Umumnya mereka masih mengikuti pendidikan. Berbeda dengan mereka yang bekerja di kerajinan batik. Pada umumnya mereka berasal dari keluarga petani miskin dan memiliki pekerjaan sampingan atau pokok di kerajinan batik. Sebagian dari para tenaga kerja kerajinan batik tersebut masih memiliki pekerjaan rangkap sebagai petani atau buruh tani di tempat asal. Ada sebagian lagi yang pekerjaan sebelumnya memang juga dalam kerajinan batik, sebagai pembatik bagi perempuan dan sebagai tukang cap atau pembabar bagi laki-laki. Hanya pekerjaan tersebut mereka lakukan di industri kerajinan batik yang lain dan industri tersebut sekarang telah gulung tikar, karena kalah dalam persaingan.

Pada umumnya pekerjaan di kerajinan batik terutama sebagai pembatik telah berlangsung turun-temurun dari orang tua ke anak-anaknya. Banyak pekerjaan pembatikan (seperti kain mori, malam dan peralatan membatik) dibawa para pekerjanya ke rumah masing-masing dan biasa dikerjakan di rumahnya sendiri. Oleh karena itu, sejak kecil anak-anak mereka telah disosialisasikan atau terbiasa dengan kondisi kerja dalam pembatikan dan sejak muda telah mencoba-coba pekerjaan pembatikan yang dilakukan orang tuanya di rumah mereka. Di sini orang tua secara tidak langsung telah menularkan ketrampilannya kepada anak-anak mereka. Sehingga apabila mereka kelak berminat masuk sebagai tenaga pembatik mudah untuk beradaptasi dan siap kerja.

Meskipun telah dilakukan secara turun-temurun, namun ketrampilan di kerajinan batik seperti pengecapan tidak mudah dapat diturunkan dari orang tua ke anaknya. Anak perlu mendapatkan pelatihan (khusus) lagi di perusahaan apabila ingin bekerja di bagian pengecapan, sebab proses pekerjaan pengecapan tidak mungkin dibawa ke rumah pekerja dan ditularkan ke anak. Di samping itu, alat cap yang digunakan cukup banyak polanya, bervariasi dan terus berkembang. Demikian juga untuk pekerjaan *pembabaran* dan *pengerokan malam* juga tidak bisa dipraktikkan/disosialisasikan di rumah pekerja kepada lingkungan keluarganya.

Alasan pindah pekerjaan

Bagi para tenaga kerja di kerajinan batik pada umumnya mereka berasal dari pedesaan Bantul, Klaten dan Kulon Progo, yaitu di daerah miskin atau di desanya hanya memiliki lahan sempit atau tak memiliki lahan hanya sebagai buruh tani. Mereka bekerja di kerajinan batik ingin mendapatkan pendapatan yang tetap dan lebih baik dari pada harus sebagai buruh tani dan petani kecil yang penghasilannya tidak menentu. Buruh tani pendapatan per hari hanya sekitar Rp 4 000,00 - Rp 5 000,00 dan itupun tidak dapat dilakukan sepanjang tahun, hanya pada musim pengolahan dan musim panen saja. Sedangkan di kerajinan batik mereka dapat mencapai Rp 8 000,00 - Rp 17 500,00 per hari. Meskipun kalau diperhitungkan per bulan masih di bawah UMR.

Rekrutmen tenaga kerja

Cara rekrutmen tenaga kerja bagi hotel yang berbintang dilakukan secara terbuka. Pihak hotel membuka pengumuman resmi lewat Dinas Tenaga Kerja. Kemudian bagi para calon yang telah mendaftar juga dilakukan seleksi secara tertulis dan lisan oleh pihak hotel. Persyaratan yang diperlukan antara lain dokumen tingkat dan bidang pendidikan yang dimiliki, pengalaman kerja dan kemampuan bahasa asing dsb. Ada hotel melati yang mencari calon karyawannya langsung mendatangi ke sekolah/ perguruan tinggi yang memiliki jurusan terkait dengan perhotelan. Kemudian diseleksi melalui praktek dan kemampuan Bahasa Inggris. Di samping itu, ada hotel melati yang mencari tenaga kerja dari mulut ke mulut tanpa test melalui para karyawannya yang telah bekerja dan ada pula yang mencari ke daerah asal, seperti majikan akan mencari pembantu rumah tangga. Dalam hal ini mereka tidak mensyaratkan pendidikan, hanya dapat baca tulis dan mau bekerja. Oleh karena itu, pendidikan mereka ada yang hanya SLTP dan SD. Dengan demikian para calon tenaga kerja yang masuk ke perhotelan untuk hotel berbintang memerlukan kualitas calon tenaga kerja yang lebih tinggi, karena mensyaratkan tingkat dan bidang atau jurusan yang sesuai dengan jenis pekerjaan yang akan dilakukan. Kebanyakan dari lulusan diploma jurusan perhotelan.

Bagi kerajinan batik cara rekrutmen tenaga kerja pada umumnya hanya *model gethok tular* atau dari mulut ke mulut. Biasanya melalui karyawan yang telah bekerja. Oleh karena itu, calon karyawan yang diperoleh umumnya masih ada hubungan saudara, tetangga atau kenalan para karyawan yang ada. Calon pekerja diutamakan mereka

yang telah berpengalaman dalam pekerjaan pembatikan, sedangkan persyaratan usia tidak menjadi pertimbangan yang serius.

Pekerjaan sebelumnya terkait dengan pariwisata

Dalam usaha kerajinan batik, pada umumnya pekerjaan yang telah dikerjakan para tenaga kerja sebelumnya tak terkait dengan industri pariwisata. Mereka hanya sebagai petani atau buruh tani. Ada sebagian tenaga kerja yang pekerjaan sebelumnya masih terkait dengan pariwisata, sebab pekerjaan sebelumnya juga di kerajinan batik. Biasanya karena usaha kerajinan batik tempat kerja sebelumnya telah gulung tikar dan terpaksa mereka di PHK (Pemutusan Hubungan Kerja). Sedangkan tenaga kerja di perhotelan seperti telah diungkapkan di atas, sebelum bekerja di hotel umumnya mereka masih sekolah. Apabila ada sebagian yang sudah bekerja sebelumnya, biasanya juga bekerja di perhotelan juga, yaitu pindahan dari hotel lain dan pindah untuk mendapatkan upah yang lebih baik.

Kualitas Tenaga Kerja dan Penyiapan Tenaga Kerja

Sebagaimana telah diungkap di atas bahwa sebagai unggulan daerah di Yogyakarta, kegiatan industri pariwisata sudah lama berlangsung dan telah berlangsung sejak sebelum kemerdekaan. Kegiatan usaha tersebut didukung oleh sumberdaya manusia yang memadai. Dari berbagai sumber informasi menyebutkan bahwa sumberdaya manusia swasta untuk Yogyakarta sudah lama siap, dari mulai dalam menyajikan atraksi, memberikan pelayanan akomodasi, pelayanan transportasi, pemandu wisata, penyediaan cenderamata dsb. Menurut sumber-sumber yang diwawancarai peneliti justru yang belum siap adalah SDM birokrasi, yaitu personal dinas-dinas yang terkait dengan pariwisata. Ketidaksiapan mereka disebabkan karena terbentur masalah ekselonisasi, apalagi menghadapi era otonomi daerah ini, mereka masih sibuk dengan urusan pembenahan administrasi kepegawaian dan ekselonisasi.

Dalam uraian berikut ini sajian akan lebih melihat bagaimana penyiapan tenaga kerja usaha industri pariwisata, antara lain lembaga-lembaga pendidikan yang ada atau telah dibangun, bidang/ jurusannya, jumlah lulusan dan pemasaran atau penyebarannya. Kemudian berikut disajikan kualitas ketenagakerjaan usaha-usaha industri pariwisata perhotelan dan kerajinan batik, yang meliputi antara lain latar belakang

tingkat dan bidang pendidikan, kemampuan ketrampilan dan teknologi yang dimiliki dan asal/sejarah ketrampilan diperoleh.

Fasilitas pendidikan pariwisata dan penyiapan tenaga kerja

Sebagai daerah tujuan wisata, Yogyakarta telah didukung oleh berbagai fasilitas pendidikan yang terkait dengan industri pariwisata. Fasilitas-fasilitas pendidikan tersebut dipersiapkan untuk menciptakan sumber daya manusia berkualitas untuk mendukung industri pariwisata. Di Kota Yogyakarta setelah tahun 80-an ada berbagai fasilitas pendidikan setingkat sekolah menengah, yaitu SMK Kelompok Pariwisata dan Perguruan Tinggi serta setingkat BLK (Balai Latihan Kerja).

Sekolah Menengah Kejuruan Kelompok Pariwisata di Kota Yogyakarta ada 8 sekolah, terdiri dari 2 sekolah negeri dan 6 sekolah swasta. Jurusan yang ada di sekolah tersebut antara lain tata boga, tata busana dan tata rias. Tujuan pendidikan ini untuk mendidik tenaga trampil kelas menengah. Rata-rata lulusan per tahun mencapai di atas 500 orang. Mereka terserap di hotel-hotel, restoran/ catering, toko kue dan modiste. Umumnya mereka terserap di Kota Yogyakarta dan sekitarnya. Usaha pengembangan sekolah menengah kejuruan kelompok pariwisata tersebut terus dikembangkan untuk mendukung industri pariwisata di Yogyakarta, hanya kendala yang dihadapi sampai saat ini adalah masih kurangnya fasilitas praktek dan instruktur praktek serta guru mata pelajaran tertentu (Bahasa Inggris). Sebagai akibatnya porsi praktek bagi para lulusan sekolah tersebut dirasakan masih kurang.

Sedangkan untuk perguruan tinggi di Kota Yogyakarta ada 9, yang hampir semuanya mendidik calon tenaga kerja dengan kualifikasi tingkat diploma 1 dan diploma 3. Tujuannya adalah menciptakan tenaga kerja siap pakai yang mempunyai kemampuan *skill*, kemampuan komunikasi dan *performance* yang memadai (tinggi badan dan penampilan) di perhotelan dan usaha wisata lainnya (agen perjalanan, restoran dll). Jurusan yang dikembangkan adalah perhotelan dan usaha wisata, termasuk di dalamnya tentang biro perjalanan, restoran, *ticketing* dan *tourist guide*. Sebagian besar perguruan tinggi tersebut dilola oleh swasta. Hanya ada dua yang dilola perguruan tinggi negeri, yaitu di Fakultas Sastra UGM dan di Universitas Negeri Yogyakarta (dulunya IKIP Negeri Yogyakarta). Jumlah lulusan per tahun secara keseluruhan dapat mencapai ribuan orang, meskipun ada beberapa perguruan tinggi yang masih baru belum menghasilkan lulusan. Para lulusan tersebut tersebar di berbagai hotel berbintang, restoran, kapal pesiar dan agen perjalanan, antara lain di Kota Yogyakarta (yang

terbanyak), Jakarta, Bali, Surabaya, Malang dan Semarang. Masalah yang masih dihadapi para perguruan tinggi pariwisata ini umumnya adalah kurangnya fasilitas praktek, kurangnya instruktur praktek, guru-guru bahasa asing dan kesulitan mendapatkan hotel tempat praktek. Sebab umumnya banyak hotel yang tidak mau menerima mahasiswa praktek setiap saat. Hanya pada bulan-bulan tertentu di mana banyak kunjungan tamu saja hotel tersebut mau menerima mahasiswa praktek, sehingga bagi perguruan-perguruan tinggi tersebut agak mengalami kesulitan untuk mengatur jadwal praktek. Akibatnya bagi para lulusan bekal porsi teori masih terlalu banyak dibandingkan dengan porsi praktek, sehingga ada perguruan tinggi yang belum mampu menghasilkan tenaga kerja yang seratus persen siap pakai dan masih harus diberikan pelatihan lagi di tempat kerja.

Di Kota Yogyakarta hanya ada satu BLK Pariwisata. BLK ini berdiri pada akhir tahun 90-an dan dilola oleh Dinas Tenaga Kerja Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Tujuannya adalah ikut menyiapkan tenaga trampil untuk hotel-hotel berbintang. Bidang yang dikembangkan adalah terutama perhotelan, jurusan *Food and Beverage* dan *House Keeping*. Para peserta adalah para lulusan SLTA yang menganggur dan sedang mencari pekerjaan terutama yang tinggal di Kota Yogyakarta dan dari luar kota (masih penduduk wilayah DI. Yogyakarta) yang berminat. Lama pendidikan selama satu tahun dengan dana bantuan dari pemerintah pusat dan daerah. Namun dengan adanya otonomi daerah di tahun-tahun mendatang pemerintah daerah diharapkan harus mampu membiayai sendiri tanpa bantuan pusat. Juga mungkin perlu terus mengadakan kerjasama dengan lembaga lain, khususnya yang ada di Kota Yogyakarta (Dinas Pariwisata, PUSPAR, PHRI, Perguruan Tinggi yang membuka Jurusan Pariwisata) dan kerjasama dengan lembaga di luar negeri. Pada tahun 2001-2002 BLK Pariwisata mendapatkan dana bantuan dari AusAID untuk mengadakan pelatihan para *trainer*.

Kemudian mengenai jumlah siswa pelatihan di BLK ini rata-rata per tahun hanya sekitar 30 orang, jumlah ini didasarkan daya tampung dan jumlah fasilitas praktek yang disediakan. Oleh karena itu, jumlah lulusan rata-rata setahun hanya sekitar 30 orang. Para lulusan tersebut pada umumnya cukup terserap di hotel-hotel di Kota Yogyakarta dan sekitarnya. Namun pihak pengelola BLK tidak tahu persis di hotel-hotel mana saja mereka dapat terserap, sebab selama ini belum pernah dilakukan monitoring tentang tempat penyebaran mereka. Tentang kualitas para siswa setelah pelatihan, bagi BLK hanya berusaha maksimal

dari kemampuan instruktur dan fasilitas yang tersedia untuk menyiapkan calon tenaga kerja yang siap kerja.

Di Kota Yogyakarta ada Balai Penelitian dan Pengembangan Batik yang lingkupnya nasional, tugasnya mengadakan penelitian dalam teknologi batik dan tidak mengadakan pelatihan untuk tenaga kerja di pembatikan. Di Yogyakarta belum ada balai atau lembaga pendidikan yang mendidik atau melatih tenaga kerja dalam pembatikan. Pelatihan dalam pekerjaan batik dilakukan langsung di tempat industri kerajinan, secara *gethok tular* dan secara turun temurun, bukan dalam suatu lembaga pendidikan seperti pendidikan dan pelatihan untuk tenaga kerja perhotelan.

Pendidikan tenaga kerja

Pendidikan yang dimiliki tenaga kerja di perhotelan untuk hotel yang berbintang cukup bervariasi. Namun sebagian besar berpendidikan SLTA dan sebagian yang lain berpendidikan perguruan tinggi. Bagi yang berpendidikan SLTA tersebut umumnya karyawan lama (masa kerja di atas 10 tahun) dan telah mendapatkan pelatihan baik di dalam maupun di luar hotel. Kebanyakan mereka dipekerjakan sebagai *room boy*, *house keeper* dan satuan pengaman (satpam). Sedangkan mereka yang berasal dari perguruan tinggi kebanyakan berkualifikasi diploma (I, II, III) kejuruan kepariwisataan dan lainnya berpendidikan S1 untuk bidang hukum dan ekonomi. Mereka yang berpendidikan perguruan tinggi tersebut biasanya ditempatkan di bidang-bidang yang sesuai dengan latar belakang jurusan pendidikannya, seperti di *front office*, *restourant*, administrasi personalia dan administrasi keuangan.

Untuk hotel-hotel melati umumnya belum banyak yang membutuhkan tenaga-tenaga berpendidikan perguruan tinggi kejuruan pariwisata atau perhotelan. Umumnya mereka hanya menerima tenaga kerja berpendidikan SLTA atau bahkan SLTP. Hal ini lebih disebabkan kemampuan hotel masih rendah untuk memberikan imbalan atau pendapatan yang sesuai dengan pendidikannya. Hotel melati umumnya belum banyak yang memerlukan tenaga kualifikasi diploma pariwisata. Sebab para lulusan diploma tersebut dikawatirkan akan menuntut jabatan lebih tinggi dengan upah yang lebih tinggi daripada yang non-diploma. Bahkan masih ada anggapan dari pemilik hotel melati bahwa pekerjaan-pekerjaan di hotel melati tidak menuntut tenaga kerja dengan spesifikasi pendidikan perguruan tinggi.

Kasus Hotel TK

Pendidikan karyawan hotel saya cukup SMP saja, sebab apabila mengambil lulusan diploma kepariwisataan khawatir mereka akan menuntut gaji dan jabatan yang tinggi. Sebagai hotel kecil struktur jabatan di hotel ini masih sederhana. Saya mencari tenaga karyawan, biasanya langsung mencari ke desa asal mereka agar dapat tenaga yang betul-betul mau bekerja, jujur dan yang penting bisa baca tulis. Toh pekerjaan di sini seperti pekerjaan rumah tangga saja, dilatih sehari dua hari langsung bisa.

Sumber : Hasil wawancara mendalam dengan pemilik

Sedangkan para manajer dan sekaligus pemilik hotel tingkat melati umumnya tidak memiliki latar belakang pendidikan pariwisata atau yang terkait dengan bidang pariwisata. Sebagian dari mereka adalah mantan pengusaha kerajinan batik. Struktur organisasi hotel melati tersebut umumnya kadang kurang jelas atau sangat sederhana dan cara pengelolannya kadang kurang profesional. Pola manajemennya adalah manajemen keluarga. Latar belakang pendidikan tenaga kerjanya kebanyakan hanya SLTP dan SLTA umum, tanpa ada tambahan pendidikan dan pelatihan profesional ke luar hotel atau di dalam hotel selama bekerja. Cara kerjanya kadang srabutan (kurang ada spesialisasi pekerjaan), kemampuan komunikasi terutama bahasa asing masih kurang dan pelayanan kurang profesional dan cenderung lamban.

Namun demikian ada juga hotel setingkat melati yang telah mengetrapkan pelayanan dan kualitas tenaga kerja yang profesional seperti hotel besar. Seperti kasus salah satu hotel (Hotel SP) di Jalan Pawirotnaman, hotel tersebut memiliki langganan turis-turis asing, terutama dari Australia, Perancis, Belanda dan Belgia. Cara promosi hotel tersebut menggunakan media brosur/ pamlet dan *gethok tular* melalui para turis yang pernah menginap di hotel ini. Agar profesional dalam pelayanan, para tenaga kerjanya direkrut dari para lulusan sekolah/ pendidikan pariwisata/ perhotelan, yaitu SMK Kelompok Pariwisata dan akademi kepariwisataan. Karyawan bagian *front office* (resepsionis) diangkat dari para tenaga kerja wanita lulusan diploma III Jurusan Bahasa Inggris, untuk *Cook* diangkat 2 orang tenaga kerja wanita lulusan diploma III Jurusan Tata Boga dan untuk *Waitrees* diangkat mereka yang berpendidikan SMK Pariwisata. Sedangkan untuk *room boy* diangkat dari para tenaga kerja lulusan SMP dan SMU. Pemilik yang sekaligus sebagai manajer menganggap bahwa pekerjaan *room*

boy bukan merupakan pekerjaan yang memerlukan ketrampilan yang harus melalui pendidikan formal khusus. Mereka cukup mendapatkan pengarahan dan pelatihan praktek dari pemilik atau karyawan lama yang telah berpengalaman dalam pekerjaan di *room boy*. Waktu pelatihan diselenggarakan satu bulan, tanpa mendapat gaji bulanan hanya mendapat uang saku harian. Setelah satu bulan dinyatakan telah siap bekerja oleh pemilik segera diangkat sebagai karyawan tetap. Menurut penuturan pemilik hampir semua karyawannya mampu berkomunikasi dalam Bahasa Inggris, meskipun belum sempurna betul. Kemampuan Bahasa Inggris tersebut sangat ditekankan oleh pemilik, sebab tamu-tamu yang menginap pada umumnya orang asing, sehingga dalam pelayanan perlu menguasai Bahasa Inggris. Bahkan para tukang becak yang mangkal di sekitar hotel-hotel melati di daerah perkampungan Pawirotaman tersebut, sedikit-sedikit juga mampu berkomunikasi Bahasa Inggris. Mereka pernah mendapatkan pelatihan Bahasa Inggris yang diselenggarakan kelompok tukang becak di salah satu gang di Pawirotaman dan dibiayai oleh para pemilik hotel di lokasi tersebut. Hasilnya menurut pengakuan seorang tukang becak yang bernama TKM (usia sekitar 40 tahun) dari hasil pelatihan tersebut sedikit-sedikit dapat digunakan untuk berkomunikasi dengan turis asing dan merasa percaya diri ketika mengantarkan para turis asing. Bahasa komunikasi yang dimiliki paling tidak dapat menanyakan kemana pergi (... *where are you going, sir ...*) dan tawar menawar harga (seperti *five thousand, ten thousand dsb*). Lain dengan seorang tukang becak Pak KR usia sekitar 60 tahun yang sering mangkal bukan di sekitar hotel, yaitu di sekitar pasar, dia merasa tak berani mengangkut turis asing, takut diajak bicara dan tidak tahu cara menjawabnya. Oleh karena itu, dia tidak pernah mangkal di sekitar hotel-hotel tempat para turis asing menginap dan dia sering menghindari apabila ada turis yang mau memanfaatkan jasanya.

Keluhan yang dirasakan oleh seorang informan tenaga kerja wanita lulusan diploma I Jurusan Perhotelan di Pendidikan Pariwisata Yogyakarta yang bekerja di salah satu hotel melati di Pawirotaman-Yogyakarta sebagai respionis, menurutnya pelajaran-pelajaran yang dia terima dari lembaga pendidikan tersebut cukup lengkap, meliputi manajemen hotel, *house keeping, food and baverage*, administrasi hotel dan Bahasa Inggris. Namun dia merasakan pengetahuan yang diterimanya masih kurang mendalam dan terlalu umum. Apabila mereka diterjunkan ke hotel berbintang mereka merasa takut kalah bersaing dengan tenaga kerja lulusan diploma III. Sebab lulusan diploma III sudah

sangat menjurus ke *Front Office, Food & Beverage, House Keeping, Accounting* dan Manajemen Hotel, sehingga apabila ditempatkan di bidang-bidang tersebut akan dapat lebih menguasai.

Sangat berbeda lagi dengan kualifikasi pendidikan yang ada pada tenaga kerja industri kerajinan batik. Latar belakang pendidikan menurut para pengusaha batik tidak menjadi prioritas utama. Umumnya tenaga kerja mereka hanya memiliki pendidikan SD dan bahkan ada di antara mereka yang tidak tamat SD. Prioritas utama para tenaga kerjanya adalah diambil dari mereka yang sudah berpengalaman sebelumnya, disiplin dan teliti dalam bekerja, terutama untuk mengecap dan membatik (*nyerat*). Menurut para pengusaha di kerajinan batik yang menjadi sampel penelitian mengatakan bahwa calon tenaga kerja yang diterima di tempat kerjanya adalah terutama yang sudah berpengalaman atau trampil. Oleh karena itu, para tenaga kerja yang diterima tersebut umumnya telah berusia tua, ada yang telah berusia di atas 40 tahun bahkan banyak yang berusia di atas 60 tahun. Sebagai akibatnya meskipun mereka telah trampil dalam pekerjaan pematikan (membatik, mengecap, *membabar*/ pewarnaan) karena telah berusia tua tingkat produktivitasnya telah menurun. Meskipun demikian para pengusaha batik lebih senang menggunakan mereka, karena tidak perlu melatih lagi. Di samping itu, memang cukup sulit mencari tenaga kerja dalam pematikan yang lebih muda. Berbagai informan mengeluhkan bahwa sekarang banyak anak-anak muda yang tidak begitu berminat untuk bekerja di industri kerajinan batik. Hal tersebut disebabkan pekerjaan di pematikan merasa kurang bergensi, upahnya rendah dan masa depannya kurang menjanjikan.

Ketrampilan tenaga kerja dan penggunaan teknologi

Para karyawan di perhotelan pada umumnya pernah mendapatkan pelatihan setelah masuk di tempat kerja. Mereka mendapatkan pelatihan sesuai dengan jenis pekerjaan yang akan dilakukan, yang diselenggarakan baik di dalam hotel sendiri ataupun dari luar hotel. Seperti yang dialami salah satu hotel besar di Kota Yogyakarta dalam meningkatkan kemampuan karyawannya sering mengadakan kerjasama dengan instansi-instansi lain, antara lain Universitas Gadjah Mada, Universitas Brawijaya dan lembaga-lembaga pendidikan pariwisata yang ada di Yogyakarta. Tujuan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan/ ketrampilan dalam bahasa asing, pelayanan dan administrasi keuangan. Pernah mengadakan kerjasama dengan Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung, AMPTA Yogyakarta untuk

meningkatkan kemampuan dalam bidang *food & beverage* dan *house keeping*.

Dalam pelatihan ketrampilan juga dilakukan oleh hotel-hotel melati, yaitu dengan mengadakan pelatihan ketrampilan bagi para tenaga kerja yang baru saja masuk. Mereka mendapatkan pelatihan antara 1 minggu sampai 1 bulan di bidang pekerjaan yang akan dilakukan. Di samping itu, dari Dinas Pariwisata dan Pemerintah Kota Yogyakarta juga pernah memberikan pelatihan tentang tata boga dan perhotelan. Pelatihan kadang setahun sekali dan dipungut biaya. Namun tidak semua hotel mengikutsertakan dalam pelatihan tersebut. Sebab seperti telah disinggung di atas masih ada pemilik hotel melati yang menganggap bahwa pekerjaan di hotel hanya seperti pekerjaan rumah tangga, tidak perlu profesional sekali. Jenis pekerjaannya hanya menyapu, mengepel lantai, membersihkan kamar, mengganti sprei, melayani sarapan pagi, mencuci dan menyeterika pakaian seperti pekerjaan rumah tangga biasa. Oleh karena itu, mereka merasa tidak perlu diberikan pelatihan dari tenaga ahli/ trampil dari luar. Mereka cukup dilatih sendiri. Pemilik tidak sadar bahwa dengan karyawan yang tidak profesional (kedisiplinan, kecepatan pelayanan dan sopan santun/ etika menghadapi tamu) akan berpengaruh besar terhadap minat, kebetahan tinggal dan keinginan kembali lagi para tamu (tamu lokal dan tamu asing) di lain waktu atau kesempatan. Faktor tersebut mungkin yang menyebabkan hotel ini tingkat huniannya rendah. Menurut pengakuan salah satu karyawannya sering ada tamu-tamu terutama tamu asing sudah *check in* dan tinggal beberapa hari, karena kurang cocok dengan pelayanannya pindah ke hotel lain. Di samping itu, di hotel tersebut tak ada satupun karyawannya yang lancar berbahasa Inggris. Ini menunjukkan bahwa kualitas tenaga kerja dalam pelayanan masih kurang atau masih rendah. Kondisi ini juga dialami oleh sebagian hotel-hotel melati di Kota Yogyakarta lainnya.

Di samping itu, ada hotel-hotel yang sengaja hanya melayani khusus untuk wisatawan nusantara (wisnu). Hotel-hotel tersebut merasa tidak memerlukan kualitas pelayanan standar internasional. Mereka cukup menyediakan kamar yang luas, banyak tempat tidur, kamar mandi dan tempat parkir yang luas. Hotel-hotel yang khusus melayani rombongan anak sekolah dan turis lokal yang membawa kendaraan bus. Umumnya mereka tidak lama tinggal di hotel tersebut, hanya satu sampai tiga hari. Namun demikian hotel-hotel tersebut tetap harus mempekerjakan tenaga kerja profesional, antara lain pelayanan yang cepat dan memuaskan serta ramah. Sebab sering dijumpai di hotel-

hotel tersebut kadang para petugasnya tidak ramah, acuh terhadap tamu dan lambat apabila dimintai pelayanan. Seperti kasus di Hotel FB tamu minta pelayanan minum air putih, telah telpon menghubungi front office, lama tidak dilayani-layani dan karena tidak sabar akhirnya tamu terpaksa harus mengambil sendiri di *front office*. Juga kadang para petugas *front office*, *bell boy*, *house keeping* acuh terhadap para tamunya.

Ketrampilan bagi tenaga kerja dalam industri kerajinan batik, seperti telah disinggung di atas dengan menggunakan *teknologi yang masih sederhana* atau tradisional kebanyakan diturunkan dari generasi sebelumnya ke generasi berikutnya, dari orang tua ke anak-anaknya dan seterusnya. Ketrampilan tersebut kadang ditularkan secara tidak langsung. Dari beberapa informan dan literature menunjukkan bahwa kegiatan usaha di pematikan dengan teknologi sederhana tersebut telah berlangsung lama, bahkan sebelum zaman kemerdekaan. Pekerjaan pematikan dikerjakan di pabrik atau tempat pengusaha, tapi banyak yang dilakukan di rumah pekerja.

Biasanya para pembatik/ pekerja batik membawa bahan batikan (kain *mori*, *malam/ lili*) dan peralatannya teknologi sederhananya (*canting*, *angklo*, *wajan kecil*, *gawangan*) ke rumah masing-masing. Kebiasaan membawa bahan batikan, peralatan dan mengerjakan pematikan di rumah menyebabkan sejak kecil anak-anak perempuan para pekerja telah disosialisasikan atau terbiasa melihat pekerjaan pematikan. Umumnya anak-anak perempuan dalam usia belasan tahun telah mencoba-coba pekerjaan pematikan yang dilakukan orang tua di rumah mereka. Seperti pengalaman Mbah AT dari salah satu desa di Imogiri - Bantul dia mulai membatik dengan teknologi sederhana (dengan *menulis* atau *nyerat*) tersebut sejak pada usia 13 tahun, dalam arti hasil batikannya sudah diterima oleh majikan dan hasil batikannya cukup halus. Di sini orang tua secara tidak langsung telah menularkan ketrampilannya kepada anak-anak perempuan mereka.

Dalam hal ini orang tua tidak sengaja menyuruh anaknya untuk membatik. Namun anak-anak perempuan mereka telah terbiasa, mengenal pekerjaan membatik dan telah sering mencoba untuk membatik. Sehingga apabila mereka kelak ingin masuk ke perusahaan batik sebagai tenaga pembatik mudah diterima dan mudah untuk beradaptasi dengan pekerjaan membatik. Sedangkan pekerjaan dalam pematikan untuk pekerja laki-laki yang telah menggunakan *teknologi setengah modern* (dengan menggunakan alat cap) agak sulit diturunkan kepada anak-anak laki-lakinya, sebab pekerjaan khusus pekerja laki-

laki tersebut adalah pengecapan. Pekerjaan lain untuk tenaga laki-laki adalah pencelupan. Pekerjaan-pekerjaan tersebut tidak mungkin dibawa pulang dan dikerjakan di rumah. Pekerjaan tersebut harus dilakukan di perusahaan, sehingga tidak dapat disosialisasikan kepada anak-anaknya.

Sedangkan penggunaan teknologi modern dengan mesin *printing* untuk membuat kain batik di Yogyakarta tidak populer, batik printing kebanyakan dilakukan di Solo. Sebab batik printing memerlukan modal yang sangat besar dan nampaknya para pengusaha batik Yogya tetap ingin mempertahankan teknologi batik tulis dan cap, agar banyak tenaga kerja yang masih dapat dimanfaatkan.

Mengenai ketrampilan membuat pola atau motif batik ada dua jenis pembuat. Bagi para pengusaha batik yang masih mempertahankan batik klasik/ tradisional, mereka umumnya hanya meniru pola-pola/ motif-motif baku dan ada sedikit modifikasi. Pola/ motif baku tersebut berasal dari Keraton Yogyakarta, seperti motif parang, motif lereng, motif sekar, motif kawung dsb. Sebagian dari para pembuat pola ada yang sudah membuat modifikasi dengan tambahan-tambahan. Pola-pola ini sudah mulai digunakan untuk membuat taplak, sprei, gordin, urung bantal dan guling, baju, rok dsb. Kemudian sebetulnya sekitar pertengahan tahun 60-an di Yogyakarta telah muncul babak baru dalam perkembangan pola/ seni batik, yang disebut '*batik kreasi baru*'. Perkembangan pola tersebut dipengaruhi oleh adanya pandangan modern dalam seni rupa. Sebagian dari mereka lebih mementingkan segi artistik atau keindahan daripada mempertahankan makna yang terkandung dalam motif batik (Kuswadji, 1985). Para pembuat pola batik kreasi baru tersebut dapat disebut kelompok batik modern.

Mereka membuat pola-pola berdasarkan selera pasar. Pola-pola tersebut mengikuti model lukisan. Oleh karena itu, kebanyakan jenis batik ini digunakan untuk dekorasi ruangan, seperti motif gambar wayang, pemandangan, bunga-bunga dsb. Mereka belajar mengembangkan pola-pola sendiri dan meniru pola-pola dalam lukisan. Ada juga yang mengikuti gaya pelukis terkenal, seperti Bagong Kusudiarjo, Widayat, Suhardi, Naza Jamin, Sudiro dan Damas. Namun kemudian mereka memilih pola-pola yang mudah laku dipasaran internasional. Oleh karena itu, motif modern ini yang harganya cukup mahal. Jadi dalam motif pembatikan ternyata tidak statis, namun sudah mulai ada perubahan-perubahan yang cenderung mengikuti selera pasar. Hanya perubahan tersebut belum begitu besar, sebab jumlah pengusaha batik modern belum begitu banyak dan belum banyak menyerap tenaga

- BPS (1983)
Penduduk D.I Yogyakarta : Hasil Sensus Penduduk 1980, Seri S Nomor 14, Jakarta : Biro Pusat Statistik.
- BPS (1992)
Penduduk D.I Yogyakarta : Hasil Sensus Penduduk 1990, Seri S Nomor 2.12, Jakarta : Biro Pusat Statistik.
- BPS (2001)
Penduduk D.I Yogyakarta : Hasil Sensus Penduduk 2000, Seri L2.2.13, Jakarta : Biro Pusat Statistik.
- BPS (2001b)
Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Angka 2000, Yogyakarta : Badan Pusat Statistik Prop. Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Damardjati (1997)
Istilah-istilah Dunia Pariwisata. Jakarta : PT. Pradnya Paramita.
- Dinas Pariwisata Prop. D.I. Yogyakarta (1999)
Laporan Ringkas kaji Ulang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah Propinsi DIY, Yogyakarta : Kerjasama Dinas Pariwisata DIY dan Pusat Penelitian & Pengembangan Pariwisata - UGM.
- Dinas Kebudayaan & Pariwisata Prop. DIY
Statistik Pariwisata Tahun 2001 Daerah Istimewa Yogyakarta, Yogyakarta : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Prop. Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Gay, Gerald (1989)
Indonesia : A voyage through the archipelago, Singapore. Himpunan Perintis Kepariwisata Sedjarah Pertumbuhan Kepariwisata Indonesia, Jakarta : Himpunan Perintis Kepariwisata.
- Karyono, Hari (1997)
Kepariwisata, Jakarta : Penerbit PT Grasindo.
- Kuswadji K (1985)
'Motif batik dalam pandangan hidup masyarakat Jawa', dalam *Lembaga Javanologi*, Yogyakarta : Yayasan Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan.
- Kusworo, Hendrie Adji dkk (2001)
Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan : Peluang Pengusaha Pengusaha Kecil dan Menengah Memanfaatkan Kecenderungan Baru Perkembangan Pariwisata Internasional, Yogyakarta : Lembaga Penelitian Universitas Gadjah Mada.
- Pamungkas, B (2001)
'Tetap membuat batik, meski sudah usia 91 tahun' dalam *Majalah Sekar Jagad*, Nomor 4/Tahun 1 - Mei 2001, Yogyakarta.

- Soempono Djojowadono, HM (1989)
'Keraton dan Daerah Istimewa Yogyakarta' dalam *Lembaga Yavanologi*, Yogyakarta : Yayasan Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan Panunggalan.
- Suwantoro, Gamal (2001)
Dasar - dasar Pariwisata, Yogyakarta : Penerbit ANDI.
- Sumardiyono, B (2001)
'Desa wisata batik perlama masa tinggal touris' dalam *Majalah Sekar Jagad*, Nomor 5/Tahun II - Nopember 2001, Yogyakarta.
- Winotosastro, Hani (2002)
'Batik Tradisional dengan Pewarnaan Alam Indigo dan Soga', Yogyakarta.

Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu daerah tujuan wisata utama di Indonesia. Pada tahun 1996 propinsi DIY menempati urutan ke 3 dalam hal kunjungan wisatawan mancanegara. Sedangkan untuk kunjungan keseluruhan (mancanegara dan domestik) DIY menempati urutan ke 7. Namun pada tahun-tahun terakhir ini jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Yogyakarta masih menunjukkan angka yang rendah. Salah satu penyebabnya adalah pengaruh peristiwa runtuhnya *World Trade Centre/WTC*, termasuk juga adanya pemberitaan media masa mengenai belum kondusifnya keamanan nasional. Padahal Yogyakarta dikenal sebagai wilayah yang paling aman selama ini di antara propinsi-propinsi di Indonesia. Meskipun demikian banyak wisatawan mancanegara tetap terpengaruh untuk sementara tidak berkunjung ke Yogyakarta. Keadaan ini makin diperparah dengan adanya peristiwa peledakan bom di Bali 12 Oktober 2002 yang lalu. Dengan adanya kesepakatan para pemimpin ASEAN dalam KTT ASEAN agar negara-negara barat tidak mengeluarkan larangan bepergian ke negara-negara ASEAN, maka diharapkan kondisi kepariwisataan di Indonesia dan khususnya Yogyakarta bisa pulih kembali.

Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis keadaan sosial budaya para pelaku industri pariwisata yang berpotensi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam mengelola dan berperan dalam pembangunan pariwisata di daerah Yogyakarta. Analisis ini mendukung tujuan khusus yaitu mengkaji proses penyiapan tenaga kerja di industri pariwisata dan kegiatan pendukungnya. Selain itu juga mendukung tujuan khusus yaitu mengkaji kualitas tenaga kerja di industri pariwisata dilihat dari perspektif sosial budaya. Dalam kajian perspektif sosial lebih memfokuskan pada jaringan sosial antar lembaga sosial yang ada dalam meningkat kualitas tenaga kerja, khususnya di industri perhotelan dan kerajinan batik. Sedangkan kajian budaya khususnya membahas tentang konsep kerja dan nilai-nilai budaya Jawa yang berpengaruh dan dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja di dua jenis industri pariwisata tersebut.

Kajian tulisan ini berdasarkan pada hasil penelitian lapangan di Kota Yogyakarta. Data yang digunakan dalam tulisan ini adalah data kualitatif yang diperoleh dari hasil wawancara mendalam terhadap para pelaku industri pariwisata, aparat instansi pemerintah maupun swasta yang berkaitan dengan dunia pariwisata dan masyarakat. Observasi juga dilakukan terhadap usaha industri pariwisata, termasuk perhotelan dan kerajinan batik di Kota Yogyakarta.

Kualitas Tenaga Kerja Pariwisata Dalam Perspektif Sosial

Sistem pelapisan yang terjadi dalam masyarakat Yogyakarta boleh dikatakan cukup kompleks (Soekanto, 1982). Ditinjau dari status sosial ekonomi, pelapisan masyarakat dapat dibedakan menjadi masyarakat bawah dan menengah. Masyarakat bawah sebagian besar adalah masyarakat Yogyakarta asli (masyarakat setempat) dan masyarakat menengah ke atas adalah baik penduduk setempat maupun mereka yang datang dari berbagai daerah, termasuk dari luar pulau. Ditinjau dari usianya para pendatang tersebut sebagian besar berusia muda.

Selain pelapisan yang mendasarkan pada pendatang dan penduduk asli, ada pula pelapisan yang mendasarkan pada garis keturunan. Pelapisan sosial tersebut adalah masyarakat yang berasal dari keturunan bangsawan (keluarga/kerabat keraton) dan masyarakat biasa /di luar keraton. Masyarakat kerabat/dalem keraton adalah mereka yang secara garis keturunannya berasal dari keluarga Sultan mulai kerabat Sri Sultan Hamengku Buwono I sampai Sri Sultan Hamengku Buwono X. Kedudukan seseorang yang ada dalam pelapisan masyarakat bangsawan adalah anak-cucu bangsawan dan otomatis kedudukannya sebagai bangsawan pula. Sedangkan masyarakat biasa adalah masyarakat yang berasal dari luar keluarga keraton dan tidak ada garis keturunan bangsawan.

Kemudian pelapisan sosial di kalangan masyarakat batik dibedakan antara '*juragan batik*' (pengusaha batik) dan masyarakat pekerja/buruh. Menurut sosiolog Prof. Soedjito (1986), bahwa struktur masyarakat mencerminkan perbedaan antara kekuasaan dan pengaruh dari warga masyarakat yang bersangkutan. Bagi kelompok yang menduduki fungsi tinggi di dalam struktur masyarakat itu, maka dia pula yang mempunyai kekuasaan dan pengaruh besar. Contoh ini terjadi pada juragan dan pekerja batik, para juragan batik mempunyai kekuasaan dan pengaruh yang besar terhadap para pekerja dan sebaliknya para pekerja relatif tergantung pada juragan. Namun hubungan sosial tersebut saat ini mulai berubah. Karena kondisi dan situasi, pekerja batik/buruh batik baik cap maupun tulis saat ini dapat dikatakan langka, sehingga para juragan batik mulai tergantung pada para pekerja batik. Para buruh batik terutama bagian pengecapan dapat bekerja rangkap tidak hanya pada satu majikan saja. Hal ini dapat terjadi ketika pada siang hari di tempat seseorang juragan sedang kurang pekerjaan, maka mereka dapat bekerja pada seorang juragan yang lain. Kemudian para juragan batik tersebut juga tidak dapat

memaksa apabila para buruh tidak masuk kerja karena harus bekerja di sawah pada musim pengolahan lahan dan musim panen padi di desa asal mereka.

Pola hubungan sosial antara pendatang dan penduduk asli usia tua dalam bersosialisasi hampir dikatakan kurang berkomunikasi, karena penduduk usia muda yang umumnya pendatang ini kebanyakan mahasiswa/pelajar sibuk dengan kegiatannya sehari-hari. Sedangkan penduduk asli (para orang tua) atau para pensiunan yang hanya diam di rumah. Dengan demikian, mereka saling memahami kedudukan masing-masing. Di dalam hubungan mereka meskipun setiap saat ada kesediaan saling bertemu, namun tidak saling bekerja sama antara pihak masing-masing. Meskipun kerja sama ini secara sosiologis dapat dikatakan tidak ko-operatif, namun hubungan yang tidak saling mendekat ini tidak menimbulkan konflik. Dengan demikian kerja sama ini sifatnya terpaksa, mereka mau saling mendekat dan kerja sama hanya dalam keadaan-keadaan tertentu saja.

Penduduk usia muda yang pendatang ini biasanya merasa tidak ikut memiliki dan keterikatan mereka terhadap Kota Yogyakarta tidak ada (keterangan informan, catatan lapangan 2002). Mereka tidak merasa memiliki sehingga tidak peduli terhadap masalah dan perkembangan Kota Yogyakarta. Lapisan masyarakat pada tingkat ini menurut informasi perlu mendapatkan sosialisasi, supaya mereka merasa memiliki sehingga peduli dengan perkembangan kota secara umum dan kepariwisataan pada khususnya.

Bentuk pelapisan sosial dalam masyarakat Yogyakarta yang lain, adalah masyarakat yang berasal dari keturunan bangsawan (keluarga/dalem Keraton) dan masyarakat biasa /di luar keraton. Masyarakat Jawa pada masa pemerintahan Mataram mengenal sistem gelar yang cukup terperinci, gelar tersebut antara lain gelar darah kebangsawanan, gelar jabatan sebutan kebangsawanan, dan sebutan jabatan (Susilantini, 1986). Dengan mengetahui gelar atau jabatan seseorang tersebut masyarakat akan mengetahui status sosial seseorang dan orang tersebut dianggap telah masuk dalam lapisan sosial yang mana. Misal seseorang keturunan masyarakat biasa, tapi apabila dapat menduduki jabatan tertentu di Pemerintah Daerah, maka mereka bisa dimasukkan ke dalam kelas bangsawan.

Pelapisan masyarakat ini terjadi karena secara tradisional (sejak nenek moyang dulu) masyarakat yang merupakan keturunan dari keluarga keraton dipandang mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dibanding dengan masyarakat biasa, kedudukan mereka diperoleh

karena faktor keturunan. Di kalangan masyarakat bangsawan atau lingkungan keraton, lambang kedudukan sangat penting. Seseorang priyayi bangsawan dan priyayi pejabat dapat langsung diketahui status sosial oleh masyarakat dengan lambang yang dikenakan. Misal untuk mengetahui status seseorang apakah mereka bangsawan, pangeran, putra mahkota atau hanya abdi dalem di dalam keraton antara lain dapat dilihat dari pakaian yang dikenakan.

Pola hubungan mereka dalam bersosialisasi saling mendekat yaitu dapat berkomunikasi secara langsung dan saling bekerja sama antara satu sama lainnya. Masyarakat keluarga keraton dan masyarakat biasa diluar keraton ini saling membutuhkan, biasanya masyarakat luar keraton ikut mengabdikan pada keluarga keraton di dalam lingkungan keraton.

Orang yang bekerja di dalam lingkungan keraton tersebut biasa disebut dengan "*abdi dalem*", mereka ini bersedia mengabdikan meskipun dengan imbalan uang (gaji) yang relatif kecil. Gaji para abdi dalem ini tersebut saat ini hanya berkisar antara 15 ribu rupiah hingga 125 ribu rupiah, sesuai dengan golongan masa kerjanya. Mereka '*sebo*' (mengadap) ke keraton mulai dari jam 9.00 hingga jam 13.00 (4 jam), tetapi tidak setiap hari. Menurut informasi jumlah abdi dalem saat ini ada sekitar 5.000 orang, ada pula yang berasal dari luar kota Yogyakarta, misalnya Kabupaten Bantul, Imogiri, maupun Kulon Progo. Pada umumnya para abdi dalem hanya naik sepeda *pancal* / sepeda *ontel* untuk menuju ke tempat kerja. Dapat dibayangkan betapa besar rasa pengabdian mereka terhadap keraton, meskipun gaji mereka relatif kecil.

Kalau ditinjau dari uang yang mereka peroleh dengan jarak rumah dan tempat kerja, memang tidak seimbang, karena mereka masih loyal terhadap keraton. Menurut mereka bekerja di keraton tidak semata-mata mencari gaji, melainkan untuk mendapatkan "*berkah pangestu*" dari Sultan. Sultan masih dianggap sebagai pelindung supaya kehidupan anak cucunya bahagia. Di samping itu, *sebo* juga merupakan rasa terima kasih kepada Sultan yang telah melindungi mereka. Secara riil mereka juga mendapatkan makan siang di tempat kerja. Prinsip para abdi dalem tersebut bahwa mereka bukan mencari materi tetapi *hikmah dari pengabdiannya*. Selain itu tujuan mereka bekerja sebagai abdi dalem adalah untuk mengabdikan pada raja terutama untuk belajar tata krama. Mereka beranggapan bahwa tata krama yang baik adalah tata cara di dalam keraton. Keraton bagi mereka dianggap sebagai sumber kehidupan dengan bekerja/mengabdikan di keraton dan menjadi hamba raja, abdi dalem merasa hatinya tenang, tentram dan damai.

Dengan prinsip seperti ini seseorang akan merasa bangga menjadi hamba raja dan merasa terhormat di lingkungan mereka.

Dengan bentuk hubungan semacam ini mereka saling mendekat satu sama lain dan terdapat kesediaan untuk saling bertemu dan saling bekerja sama. Hubungan kerja sama ini dapat dikatakan kerja sama yang ideal dan ko-operatif. Dalam hubungannya dengan kualitas tenaga kerja dalam industri pariwisata, hubungan kerja antara keraton dengan abdi dalem tersebut mungkin dapat mewarnai hubungan kerja dalam kegiatan industri pariwisata di Yogyakarta dan bagaimana pengaruhnya terhadap peningkatan kualitas tenaga kerjanya.

Bentuk hubungan sosial

Pada pelapisan masyarakat yang pendatang dan masyarakat setempat, sejarahnya karena Kota Yogyakarta sebagai kota “pelajar”. Julukan tersebut sudah ada sejak jaman penjajahan Belanda, waktu itu sudah ada pendatang dari luar kota untuk menuntut ilmu. Dari luar kota ini baik masyarakat sekitar Kota Yogyakarta maupun dari luar Jawa (Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, Bali dan pulau-pulau lain). Di antara mereka yang menuntut ilmu ini, setelah menyelesaikan sekolahnya ada yang kembali ke daerah asal untuk mengembangkan daerahnya, ada pula yang tetap tinggal di Yogyakarta untuk bekerja di Yogyakarta, dan keadaan ini terjadi hingga saat ini. Hubungan sosial antara mereka yaitu masyarakat pendatang dan penduduk setempat, sudah sejak jaman penjajahan Belanda dulu memang sudah terjadi demikian. Dalam bersosialisasi hampir dikatakan tidak pernah berkomunikasi, karena penduduk usia muda yang pendatang ini seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa biasanya adalah mahasiswa yang sibuk dengan kegiatannya sehari-hari mereka. Sedangkan penduduk usia tua yang penduduk asli ini biasanya adalah sudah pensiun yang diam di rumah. Dengan bentuk hubungan semacam ini mereka saling memahami kedudukan masing-masing.

Di dalam hubungan mereka meskipun setiap saat ada kesediaan saling bertemu namun tidak saling bekerja sama antara pihak masing-masing. Meskipun kerja sama ini secara sosiologis dapat dikatakan tidak ko-operatif, namun hubungan yang tidak saling mendekat ini tidak menimbulkan konflik. Dengan demikian kerja sama ini sifatnya terpaksa, mereka mau saling mendekat dan kerja sama hanya dalam keadaan-keadaan tertentu saja. Keadaan hubungan ini hingga saat ini mungkin tidak ada perubahan, hubungan sosial masih seperti dulu.

Sedangkan pada pelapisan masyarakat bangsawan/ dalem keraton dan masyarakat biasa, sejarahnya memang kedudukan mereka sebagai masyarakat keturunan keraton diperoleh karena faktor keturunan. Jelasnya sejak mereka lahir sudah mendapat kedudukan sebagai keturunan dalem keraton, tanpa harus berusaha untuk mendapatkan kedudukan tersebut. Perlu kita ketahui bahwa kedudukan sebagai keturunan bangsawan dipandang mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dibanding dengan masyarakat biasa.

Masyarakat bangsawan atau lingkunan keraton pada jaman dulu, beranggapan bahwa lambang kedudukan mempunyai peranan yang sangat penting. Seorang priyayi bangsawan dan priyayi pejabat akan dapat diketahui statusnya oleh masyarakat dari lambang yang dikenakannya. Dari pakaian yang dikenakan seseorang maka akan dapat diketahui lambang dan kedudukannya, apakah dia seorang bangsawan, pangeran, putra mahkota dan *abdi dalem* di lingkungan keraton. Namun kondisi di lingkungan masyarakat keraton sekarang sudah mulai berubah, lambang dan kedudukan sudah mulai luntur, dari pakaian yang dikenakan sudah tidak lagi menunjukkan kedudukan seseorang. Hal ini karena pakaian yang dikenakan putra dalem keraton dalam sehari-hari hampir sama atau bahkan sama dengan yang lain. Yang membedakan bahwa mereka adalah *abdi dalem* yaitu apabila mereka sedang *sebo*, di dalam keraton mereka bekerja untuk pelestarian keraton. Untuk saat ini selain *abdi dalem* ada juga pemandu wisata khusus untuk menjelaskan tentang sejarah dan kondisi keraton.

Jaringan dan hubungan kerja

Kerajinan batik

Obyek dan daya tarik wisata merupakan unsur utama dalam suatu kegiatan wisata, karena hal ini merupakan pendorong atau penarik bagi wisatawan dalam berkunjung ke suatu daerah tujuan wisata. Potensi obyek dan daya tarik wisata budaya di Daerah Istimewa Yogyakarta antara lain adalah benda-benda artefak berupa candi, keraton, dan bangunan peninggalan budaya masa lalu. Pada umumnya obyek wisata dan daya tarik wisata budaya kebanyakan terletak di wilayah bagian timur Yogyakarta dan sekitar Keraton Yogyakarta.

Pengelolaan kegiatan wisata budaya Yogyakarta dilakukan atas kerjasama dari beberapa lembaga baik swasta maupun pemerintah. Untuk obyek wisata benda-benda artefak berupa candi, pada umumnya dilakukan kerja sama antara Dinas Pariwisata DIY, Jawa Tengah dan

pihak pengelola lokasi dari swasta. Pihak Dinas Pariwisata sebagai lembaga pemerintah berfungsi sebagai fasilitator dan promotor. Sedangkan pihak swasta sebagai pengelola berfungsi sebagai penyandang dana untuk daya tarik obyek wisata. Bagaimana pengelola berusaha mengemas obyek wisata tersebut agar supaya menarik wisatawan.

Dalam usaha menarik wisatawan, pihak swasta lainnya yaitu biro perjalanan mempunyai peranan pula. Biasanya biro perjalanan menawarkan obyek-obyek wisata budaya dalam paket-paket wisata. Kemudian untuk lebih memahami obyek wisata yang dikunjungi, biasanya wisatawan dipandu oleh pemandu yang mengetahui dan memahami tentang arti dan sejarah obyek wisata tersebut. Para pemandu ini statusnya tidak terikat oleh lembaga manapun, tetapi dari pihak biro perjalanan yang memberikan kualifikasi. Namun setidaknya pemandu adalah seorang sarjana dan bisa berbahasa asing terutama bahasa Inggris, Jepang, Mandarain atau lainnya.

Khusus untuk obyek wisata keraton, pemandunya biasanya dibantu oleh para abdi dalem keraton. Namun kalau ada abdi dalem yang dapat menguasai bahasa asing biasanya fungsi pemandu sudah di rangkap oleh mereka, karena para abdi dalem lebih menguasai dan memahami arti dan sejarah keraton. Dengan demikian pemandu wisata tersebut mempunyai peran yang penting terutama bagi wisatawan mancanegara, karena mereka yang biasa terlibat langsung dalam pelayanan terhadap wisatawan.

Batik merupakan kerajinan yang memiliki nilai seni tinggi. Menurut sejarahnya ide pembuatan kain batik berasal dari dalam Keraton Yogyakarta. Penggunaan kain batik pada awalnya hanya untuk keperluan upacara-upacara adat keraton serta sebagai busana sehari-hari kerabat keraton serta abdi dalem keraton. Menurut informasi, pada awalnya batik dibuat/dikerjakan oleh putri-putri keraton sendiri dan para abdi dalem di dalam keraton. Mereka mengerjakan pembatikan kain (panjang) untuk keperluan upacara adat, pakaian resmi, dan pakaian sehari-hari para kerabat. Untuk pengerjaan kain batik ini, ada syarat yang harus dipenuhi oleh para pembatik, yaitu mampu menjalankan *lampah* (melakukan sesuatu) yaitu berpuasa dan mengurangi tidur.

Uraian tersebut di atas memperlihatkan bahwa pada mulanya kegiatan membatik bukan merupakan kegiatan bisnis/ usaha, namun merupakan wujud pengabdian putri-putri keraton dan para abdi dalem terhadap keraton. Di samping itu, juga merupakan pengembangan seni

budaya yang bernilai luhur dan bermakna bagi kehidupan pemakainya. Kemudian dengan berjalannya waktu seni batik juga makin dikenal di luar keraton, pemakaian kain batik tidak terbatas untuk kerabat keraton, tapi juga untuk para pejabat daerah dan masyarakat umum. Kemudian kain batik juga digunakan untuk upacara-upacara adat dalam masyarakat mengakibatkan permintaan pasar makin meningkat. Untuk menghadapi permintaan pasar muncul pengusaha-pengusaha batik di luar keraton, seperti yang terkenal adanya juragan-juragan batik dari Kampung Pawirotaman, Sosrowijayan, Karangakajen dsb. Karena sudah menjadi usaha, maka diperlukan buruh-buruh batik yang diberi upah dan pada awalnya perintis para buruh tersebut juga ada yang pernah menjadi abdi dalem keraton. Pihak pemilik tidak tahu dikerjakan dimana yang penting setelah selesai dikerjakan maka baru diberi upah, prinsipnya adalah ada uang ada barang. Kalau dulu dengan mengerjakan batik di dalam keraton maka pembatik disediakan makan dan minum. Kondisi semacam ini juga termasuk pembatik yang merangkap sebagai petani, ketika masa panen juga kehidupannya dijamin. Sekarang keadaan sudah berubah, meskipun diantara pembatik masih ada yang sebagai petani, tapi jaminan hidup sudah tidak ada lagi.

Kaitannya dengan hubungan kerja dalam pembatikan antara di lingkungan keraton dan di luar keraton jelas ada perbedaan. Di dalam keraton ada komunikasi antara pembatik abdi dalem dengan kerabat keraton, sebagai hubungan antara abdi dalem dan *sesembahan* (yang disembah (yaitu para putri keraton) berlangsung setiap hari ada unsur pengabdian. Sedangkan pembatikan yang dikerjakan di luar keraton merupakan hubungan antara juragan dan buruh. Komunikasi terjadi pada saat menerima bahan kerjaan, menyerahkan hasil batik yang sudah selesai dan ketika menerima upah kerja. Frekuensi komunikasi tergantung dari banyaknya batik yang dikerjakan, semakin banyak yang dikerjakan semakin jarang mereka berkomunikasi. Meskipun demikian tidak mempengaruhi produktivitas dan kualitas pembatik. Namun menurut informasi hasil produksi kain batik yang dikerjakan di keraton dan di luar keraton mengalami sedikit perubahan. Misal dulu masih ditemui adanya motif-motif yang unik, seperti adanya "*ngengrengan*", "*nurboh*", atau "*ngecek*". Namun setelah dikerjakan di luar keraton motif-motif tersebut jarang ditemui lagi. Sebab adanya perubahan tersebut kemungkinan sekarang orang ingin cepat selesai dan cepat memperoleh uang, sehingga tidak mampu dan telaten mengerjakan motif-motif lama. Untuk mengerjakan motif-motif yang unik memang

memerlukan waktu yang relatif lama. Padahal perbedaan upahnya antara motif lama dan motif baru tidak banyak.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa dengan sistim pengerjaan di dalam keraton maka hubungan antara pembatik dan kerabat keraton dapat dikatakan hubungan yang saling mendekat atau hubungan persaudaraan dan pengabdian. Sedangkan untuk sistim yang sekarang hubungan mereka tidak saling mendekat meskipun kerja samanya saling menguntungkan. Dalam hal ini tidak mempengaruhi kualitas pembatik bahkan produktivitas yang diperoleh relatif lebih cepat, dengan sendirinya kuantitasnya juga lebih tinggi, dan akhirnya imbalan yang diterima juga lebih besar. Hal ini juga dikemukakan oleh salah seorang informan sebagai berikut :

“Sekarang pembuatan kain batik bisa di luar keraton dengan mengupahkan pada orang, setelah jadi baru diberi upah. Tapi untuk ngengrenan, ngecek sudah tidak mungkin ada lagi, karena lama. Tapi kalau kita mau pesan banyak untuk acara pengantenan bisa lebih cepat” (Wawancara mendalam dengan pengusaha).

Industri perhotelan

Salah satu sarana yang sangat diperlukan oleh wisatawan adalah ketersediaan akomodasi penginapan. Tanpa adanya akomodasi penginapan di suatu daerah wisata, maka kegiatan kepariwisataan kurang lancar. Demikian pula sebaliknya seperti dialami sekarang dengan adanya tragedi bom Bali, mengakibatkan berkurangnya jumlah wisatawan yang berkunjung ke Indonesia. Hal tersebut mengakibatkan jumlah kunjungan wisata menurun drastis, karena kehidupan industri perhotelan sangat tergantung pada kuantitas kunjungan para wisatawan.

Pengelolaan kegiatan industri perhotelan pada umumnya dilakukan oleh pengusaha swasta. Menurut UU Pariwisata No.9, tahun 1990 kelompok usaha sarana pariwisata seperti hotel, restoran, jasa angkutan wisata dan lain-lain termasuk salah satu kategori dalam jenis usaha pariwisata. Dengan demikian tenaga kerja yang terlibat dalam usaha pariwisata tersebut dikelola oleh manajemen masing-masing perusahaan. Dari tahun ke tahun jumlah tenaga kerja yang terserap dalam usaha pariwisata ini cenderung meningkat. Untuk meningkatkan kualitas tenaganya, pihak hotel biasanya memberikan pelatihan, baik yang diselenggarakan di dalam hotel maupun di luar hotel. Sehubungan dengan kualitas tenaga kerja, di samping memberikan

Jaringan kerja dengan sarana dan prasarana

Sarana dan prasarana pelayanan untuk wisatawan merupakan salah satu komponen penting yang menentukan kelancaran wisata, karena menyangkut kebutuhan yang diperlukan wisatawan. Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah jaringan jalan, terminal bis, stasiun, bandar udara, angkutan komunikasi, toko souvenir, money changer dan lainnya. Keberadaan dan ketersediaan sarana dan prasarana untuk daerah wisata terus dijaga kondisinya agar tidak mengganggu perjalanan wisatawan. Sebagai contoh ketersediaan bandar udara adalah sangat penting bagi wisatawan, karena untuk menjangkau daerah satu dengan daerah lain yang berjarak cukup jauh. Apakah jarak tersebut antar kota dalam satu pulau maupun antar pulau. Bahkan dapat dikatakan bahwa perkembangan kepariwisataan untuk menjangkau pasar nasional maupun internasional sangat tergantung dari adanya bandar udara.

Kegiatan sarana dan prasarana wisata ini dilakukan oleh pemerintah dan kerja sama dengan swasta. Untuk mendukung perkembangan kepariwisataan DIY, maka Dinas Pariwisata Daerah sebagai lembaga pemerintah telah melakukan kerja sama dengan berbagai instansi pemerintah yang lain dan juga lembaga-lembaga swasta yang bergerak di bidang pariwisata. Pihak swasta dalam hal ini antara lain adalah biro perjalanan untuk mempersiapkan transportasi bagi wisatawan.

Jaringan kerja antara pemerintah dan masyarakat

Dinas Pariwisata DIY sebagai lembaga pemerintah dalam melaksanakan program-program pariwisata telah menjalin kerja sama baik dengan instansi terkait maupun dengan masyarakat. Salah satu contoh program kerja sama itu terlihat dari program promosi wisata yang dilakukan secara terpadu dengan berbagai kalangan. Kegiatan itu telah dilakukan pada tanggal 25 Nopember sampai 1 Desember 1998 yang lalu dengan menggelar kegiatan promosi bersama dan terpadu di Bali. Promosi bersama tersebut mencakup pameran potensi pariwisata, industri kerajinan dan pertanian penunjang pariwisata, temu wicara dengan masyarakat dan kontak bisnis antara penjual dan pembeli. Kegiatan seperti ini terutama dimaksudkan untuk melakukan sinergi diantara berbagai kalangan yang bergerak dalam menunjang pariwisata untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas produk-produk pariwisata (Dinas Pariwisata DIY dan PUSPAR-UGM, 1999).

Kerja sama antara pemerintah dan swasta ini juga dilakukan dalam kaitannya dengan peningkatan SDM pariwisata. Salah satunya adalah program membakukan standar kualifikasi pelatihan/penataran tenaga kerja pariwisata secara rutin, memacu berbagai asosiasi (ASITA, HPI, PHRI) dan lainnya untuk lebih aktif dalam mempersiapkan tenaga kerja yang profesional. Dalam kerja sama tersebut lembaga pendidikan pariwisata dan perguruan tinggi melakukan persiapan dalam memperoleh tenaga kerja yang terampil.

Jaringan kerja di sektor pendidikan dan industri pariwisata

Dinas Pariwisata DIY sebagai lembaga pemerintah dalam melaksanakan program-program pengembangan pariwisata juga menjalin kerja sama dengan lembaga-lembaga pendidikan dan penelitian. Kerja sama ini terutama yang berkaitan dengan peningkatan kualitas SDM dan rekrutmennya.

Sektor pendidikan di bidang pariwisata memiliki peran yang penting dalam pengembangan pariwisata DIY. Lembaga-lembaga pendidikan pariwisata selama ini telah melakukan kerja sama dengan Dinas Pariwisata. Kerja sama yang telah dilakukan meliputi kegiatan penelitian dan penyelenggaraan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan pariwisata, seperti pelatihan, seminar, simposium konferensi dan lainnya.

Perkembangan yang sangat menarik adalah lembaga-lembaga kursus bahasa asing yang secara langsung maupun tidak langsung telah mendukung kegiatan pariwisata, terutama dalam penyediaan tenaga kerja pariwisata yang profesional khususnya meningkatkan kemampuan SDM dalam bahasa asing. Disamping itu lembaga pendidikan formal juga mendukung kegiatan pariwisata, misal dari Sekolah Kejuruan atau Akademi Pariwisata yang langsung diserap oleh hotel baik berbintang maupun melati.

Kualitas Tenaga Kerja Pariwisata Dalam Perspektif Budaya

Secara umum pariwisata merupakan seluruh kegiatan pemerintah, dunia usaha dan masyarakat untuk mengatur, mengurus dan melayani kebutuhan wisatawan (Karyono, 1997). Daerah Istimewa Yogyakarta yang terdiri dari empat kabupaten dan satu kota, yaitu Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Kulon progo, dan Kota Yogyakarta. Dalam Rencana Tata Ruang

Wilayah Nasional menyebutkan bahwa Yogyakarta termasuk dalam Daerah Tujuan Wisata kedua setelah Propinsi Bali.

Sumber daya manusia merupakan unsur penting dalam pengembangan dan daya saing dunia kepariwisataan. Daya saing yang tinggi dipengaruhi oleh tingginya kualitas ketrampilan dan produktivitas kerja para pekerja di industri pariwisata. Faktor yang mempengaruhi kualitas para pekerja di industri pariwisata adalah pendidikan, ketrampilan, sikap mental, kemampuan menampilkan daya tarik dan keunikan yang dianggap unggulan bagi kepariwisataan setempat. Sedangkan yang mempengaruhi produktivitas para pekerja di industri pariwisata adalah penerapan obyek dan daya tarik wisata yang tepat, SDM yang profesional, infrastruktur yang memadai dan situasi keamanan yang kondusif.

Dalam upaya meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja, berbagai kebijaksanaan ketenagakerjaan telah diupayakan. Pokok-pokok Kebijakan Pariwisata DIY secara operasional adalah termasuk membina dan mengembangkan sumber daya manusia di bidang kepariwisataan. Pembinaan dan pengembangan SDM antara lain pertama diarahkan pada sikap mental para pelaku pariwisata terutama dalam pelayanan sehingga mampu menjaga citra pariwisata DIY. Dari hasil wawancara di beberapa lembaga yang terkait, diperoleh gambaran bahwa SDM pariwisata di Yogyakarta terutama di swasta cukup siap untuk melayani dan menyambut para wisatawan baik dalam maupun luar negeri. Kesiapan mulai dari penyiapan atraksi, pemandu wisata, akomodasi, cenderamata dan sebagainya. Ada anggapan bahwa SDM Yogyakarta memang lebih rendah bila dibanding dengan di Bali, namun bila dibanding dengan propinsi lain selain Bali, Yogyakarta mungkin masih agak lebih unggul.

Kedua, peningkatan mutu SDM melalui lembaga pendidikan formal, non-formal maupun informal sehingga dapat menghasilkan SDM yang mempunyai basis pengetahuan bidang pariwisata yang memadai. Dalam upaya mendukung kegiatan program tersebut, di Yogyakarta telah memiliki 9 perguruan tinggi setingkat akademi yang menghasilkan Diploma III, 8 Sekolah Menengah Kejuruan yang memiliki jurusan yang berhubungan dengan kepariwisataan. Namun kendala ada bahwa masih kurangnya fasilitas laboratorium, selain itu masih kurangnya pendidikan bahasa asing, yang merupakan sarana komunikasi untuk melayani wisatawan asing.

Ketiga, pembinaan dan pengembangan SDM dilaksanakan oleh pemerintah maupun badan usaha swasta yang mendapat pengakuan

pemerintah. Kegiatan kebijakan ini dilakukan oleh lembaga-lembaga yang bergerak di bidang pelatihan dan pengembangan SDM pemerintah di bidang pariwisata pada SDM tingkat menengah keatas, misalnya PUSPAR (Pusat Penelitian Pariwisata - Universitas Gadjah Mada) dan STUPPA (Studio Perencanaan Pariwisata- Yogyakarta). Selain itu pada tingkat pramuwisata juga dilakukan pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh Dinas Pariwisata setempat dengan dana dari Himpunan Pramuwisata Indonesia DIY, salah satu tujuannya adalah untuk melatih mereka agar lebih profesional.

Dalam menyambut era otonomi di bidang pariwisata Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dan beberapa kabupaten di Jawa Tengah melakukan kerja sama antara bupati dan wali kota. Melalui unggulan obyek pariwisata yang ada, pimpinan daerah (Bupati dan Walikota) sepakat membuat agenda promosi bersama di tingkat internasional. Sebelum otonomi daerah semua fungsi penting kebijakan pariwisata dikuasai oleh pemerintah pusat. Sementara pemerintah daerah, hanya sebagai pendukung dengan diberi tanggung jawab pemeliharaan dan manajemen. Dengan kebijakan seperti ini obyek wisata daerah sering ditelantarkan, padahal pemerintah daerah bisa mengembangkan sesuai potensi daerah setempat (Kompas, 2002).

Dengan adanya era otonomi Pemda DIY mulai mengambil peran yang lebih aktif dalam mengambil keputusan di bidang pariwisata. Pemerintah Daerah mencoba memahami kontribusinya di industri pariwisata dengan potensi yang ada dan inisiatif sendiri. Dalam hubungan dengan hal ini Pemerintah Daerah bekerja sama langsung dengan pihak swasta pendukung pariwisata seperti biro perjalanan, pengelola obyek wisata budaya di Borobudur. Kerja sama Pemda Jawa Tengah dan DIY ini karena obyek wisata budaya yang ada di sekitar Yogyakarta sebenarnya statusnya secara geografis adalah terletak di wilayah Jawa Tengah. Namun demikian karena jaraknya relatif dekat dengan Kota Yogyakarta sehingga masuk dalam promosi Dinas Pariwisata DIY.

Kasus di industri kerajinan batik

Daerah Istimewwa Yogyakarta memiliki potensi-potensi wisata yang dikenal secara luas baik di tingkat nasional maupun internasional. Salah satu potensinya adalah wisata budaya keraton yang merupakan karakter potensi obyek daya tarik wisata yang sangat unik, stabil dan mapan serta memiliki keunggulan budaya dan sejarah yang sangat menarik (Zafria, 2001). Seperti telah diungkapkan di atas bahwa batik

merupakan salah satu daya tarik wisata yang awalnya berasal dari dalam Keraton Yogyakarta. Batik mula-mula berfungsi sebagai pakaian resmi dan pakaian upacara keraton. Sejarahnya (pada awal pemerintahan Sri Sultan Hamengku Buwono I), kegiatan pembatikan dikerjakan di dalam keraton. Kemudian hasil pembatikan tersebut disediakan untuk pakaian resmi raja. Para pembatik biasanya adalah para *abdi dalem* yang tinggal dari Desa Imogiri-Kabupaten Bantul dan Brosot-Kabupaten Kulon Progo.

Mengenai tenaga kerja pembatik khusus batik tulis halus/klasik saat ini sudah mulai langka. Kondisi ini juga dirasakan oleh para anggota paguyuban pencinta batik di Yogyakarta. Kemudian untuk memenuhi kebutuhan keraton sebagai pusat pariwisata diciptakan pusat kegiatan pembatikan di Kompleks Tamanan. Namun masalah yang masih mereka hadapi adalah siapa tenaga kerja yang akan melakukan pembatikan tersebut. Karena keraton sudah tidak lagi memiliki *abdi dalem* yang trampil membatik klasik (Pembatikan, 2001).

Sebelum Indonesia merdeka menurut para informan, para pengusaha batik di Yogyakarta sudah melakukan usaha batik dengan modal yang tidak besar dan manajemen yang masih tradisional. Mereka adalah para generasi kakek dan nenek yang cucu dan buyutnya para pengusaha yang sekarang. Para pengusaha batik tersebut biasanya menjadi anggota koperasi sesuai dengan wilayah kecamatan di mana perusahaan tersebut berada. Namun sayangnya akhir-akhir ini koperasi batik tersebut sudah berubah fungsi. Artinya bahwa sebelumnya koperasi tersebut bergerak dalam bidang penyediaan sarana produksi (kain mori, malam, pewarna dsb) dan pemasaran batik, sekarang berubah menjadi simpan-pinjam uang bagi para anggotanya. Hal itu disebabkan karena para anggotanya telah banyak yang beralih profesi dari usaha kerajinan batik ke usaha perhotelan, perdagangan dan lainnya.

Dari beberapa perusahaan batik yang masih berjalan sampai saat ini, biasanya kepemilikan mereka adalah turun-temurun dari nenek kakek ke anak atau buyutnya. Penerus biasanya hanya satu-satunya yang mau melanjutkan usaha kerajinan batik dari beberapa saudara mereka. Alasan kenapa saudara yang lain tidak meneruskan usaha batik. Alasan mereka memilih profesi lain sesuai dengan pendidikan yang telah dimiliki. Mereka lebih memilih profesi lain karena menurut mereka usaha batik proses pembuatannya rumit, dan memerlukan waktu dan tenaga yang relatif banyak. Saudara-saudara yang lain umumnya bekerja di kota-kota lain sebagai pegawai pemerintah atau swasta di Jakarta atau Denpasar.

Namun ada pula keluarga pengusaha batik yang memilih disiplin ilmu seperti tehnik kimia dengan tujuan untuk memperdalam cara pewarnaan batik. Pengembangan pewarnaan ini dilakukan baik dengan teknologi baru maupun cara pewarnaan dengan tradisional. Dalam proses pembuatan batik saat ini pada umumnya masih sama seperti masanya nenek moyang dulu. Kalaupun ada perubahan, hanya sedikit misal penggunaan bahan bakar untuk memasak air panas dari dulu hingga saat ini masih menggunakan kayu bakar. Alasan masih menggunakan kayu bakar karena untuk proses pembuatan batik, salah satunya menggunakan air panas yang cukup banyak untuk perendaman. Di antara pengusaha sudah ada yang berencana akan menggantikan bahan bakar kayu dengan briket batu bara. Tujuan penggunaan batu bara ini adalah untuk mengurangi polusi udara karena asap. Kemudian cerobong asap yang saat ini sudah dipertinggi dibanding dengan sebelumnya. Tujuan mempertinggi ini juga untuk mengurangi polusi asap yang terlalu rendah yang dapat langsung mengganggu lingkungan sekitar.

Menurut pengamatan peneliti di beberapa perusahaan batik yang pernah dikunjungi umumnya memiliki jumlah tenaga kerja sekitar 10 hingga 50 orang. Para pembatik ini umumnya berasal dari luar kota, namun masih masuk wilayah Yogyakarta misal dari Kabupaten Bantul meliputi daerah Imogiri, Srandakan, Pandak dan Madukismo dan dari Kulon Progo meliputi daerah Sentolo dan Brosot. Umumnya mereka berasal dari keluarga kurang mampu, sebagai buruh tani di daerah tandus. Mereka datang ke tempat kerja ada yang masih menggunakan sepeda pancal, seperti halnya yang dilakukan oleh orang tua mereka. Para pembatik ini umumnya memperoleh ketrampilan secara turun-temurun yang diwarisi dari orang tua mereka.

Sistim penggajian para pembatik di Yogyakarta adalah mingguan artinya digaji setiap hari Sabtu. Gaji pembatik rata-rata per hari masih di bawah 10 ribu kebawah atau rata-rata sebulan masih di bawah UMR Yogyakarta, dengan makan satu kali pada siang hari. Khusus untuk pembatik cap biasanya memperoleh gaji hampir dua kali lipat dari yang lain. Hal ini karena pembatik cap memerlukan keahlian tersendiri dan tenaga lebih banyak dari pembatik lainnya. Kalau tidak masuk sehari berarti pembatik dipotong sehari, berarti penggajian sesuai dengan jumlah hari kerja. Sistim penggajian semacam ini sudah biasa dilakukan di perusahaan batik di Yogyakarta dan sama dengan sistim orang tua dulu.

Mengapa para pembatik yang sudah trampil dan banyak yang sudah tua-tua tersebut masih mampu bertahan menggeluti pekerjaan

membatik dengan upah yang rendah. Bagi para pembatik pekerjaan membatik bukan semata-mata mencari upah, namun pada awalnya merupakan suatu pengabdian abdi dalem terhadap keraton dan dilakukan di lingkungan keraton. Apabila mereka melakukan dengan penuh keikhlasan dalam pengabdian akan mendapatkan kebahagiaan batin. Dalam proses waktu selanjutnya ketika keraton tidak memanfaatkan tenaga pembatik dari luar, mereka tetap mengabdikan dalam kegiatan pembatikan dalam rangka melestarikan budaya. Bagi masyarakat Yogyakarta dan bagi para pembatik karya batik merupakan kreasi adiluhung atau hasil budaya yang luhur dan memiliki makna yang tinggi baik bagi para pembatiknya, desainernya maupun pemakainya. Oleh karena itu, bagi masyarakat Yogyakarta yang mengetahui tentang makna batik, tidak sembarangan mereka mau memakai motif batik. Pemakaian motif batik tertentu harus sesuai dengan status sosialnya di masyarakat dan peran sertanya dalam acara adat yang sedang diselenggarakan dalam masyarakat. Seperti motif batik *Parang Rusak* mengandung perlambang yang dalam dan luhur. Pada zaman dahulu yang diperkenankan memakai motif tersebut hanya para bangsawan tinggi. Motif batik ini ciptaan Sultan Agung-raja Mataram yang sampai sekarang namanya tetap harum dan terkenal. Pada zaman Mataram tersebut, meskipun bangsawan tinggi tidak diperkenankan memakai motif parang rusak untuk harian, tapi hanya untuk upacara kenegaraan (Kuswadji, 1984). Contoh lain adalah motif batik untuk penganten yang dikenal dengan motif '*Sidomukti*' atau '*Sidoluhur*'. Dengan memakai motif ini diharapkan akan membawa '*kamukten*' atau kesejahteraan/ kebahagiaan bagi penganten berdua. Pada waktu mengerjakan kain batik tersebut untuk upacara penganten kerabat keraton, para pembatik biasanya harus berpuasa dan dikerjakan pada waktu tengah malam sampai subuh.

Di samping itu, penerimaan upah buruh batik yang rendah tersebut disebabkan antara lain masih adanya anggapan orang hidup hanya *sadremo* atau pengakuan hanya sebagai buruh atau orang yang disuruh, sehingga harus *narimo* (menerima apa adanya) dikasih berapapun oleh juragan. Menurut mereka protes sebagai tanda orang hidup yang *ngangah-angah* (rakus), dan apabila hidup *ngangah-angah* akan terasa susah dan malah tidak berkah.

Dalam proses perkembangannya motif batik yang diproduksi di Yogyakarta juga sudah mengalami perubahan. Motif batik pada awalnya hanya berbentuk kain *jarik* (Jawa) untuk pakaian bawahan. Perkembangan berikutnya telah mengikuti selera konsumen atau pasar. Oleh karena itu, motif-motif yang diciptakan sudah dapat digunakan

untuk bahan baju, seprei, sarung bantal, taplak, gordena dsb. Kemudian pasaran batik berkembang ke arah pasar internasional dan berkembang ke motif-motif lukisan dan dekorasi. Dalam batik lukisan dan dekorasi ini kemudian dikenal dengan istilah batik modern. Orientasinya usahanya sudah betul-betul bisnis dan mengikuti pasar global. Oleh karena itu, sejak mulai dengan produksi batik yang motif-motifnya mengikuti selera pasar untuk pelestarian nilai-nilai tradisional batik sudah mulai pudar. Nilai-nilai kekhasan batik yang memiliki nilai luhur telah berubah menjadi nilai-nilai seni yang lebih kontemporer. Akibatnya nilai keanggunan dan keagungan batik menjadi hilang. Namun demikian masih ada di antara kalangan pengusaha batik yang konsisten mempertahankan batik tulis dengan motif-motif tradisionalnya. Menurut informan yang mengatakan ingin terus mempertahankan dan merasa *'eman-eman nek ilang'* (sayang kalau batik tulis/tradisional hilang). Selain itu, motif-motif tertentu kalau dilakukan dengan cara *cap-capan* atau *printing* tidak akan bagus dan hanya bisa dilakukan dengan baik dengan cara tulis (*serat*) halus. Di samping itu, seperti telah dikemukakan di atas masing-masing motif batik memiliki makna arti tersendiri.

Kasus di industri perhotelan

Kampung Parawirokatan telah mengalami banyak perubahan, dulunya merupakan perkampungan “juragan batik”, tetapi sekarang daerah ini sudah berubah menjadi kampung wisata. Menurut informasi di daerah Prawirokatan saat ini terdapat sekitar 35 buah hotel kelas melati. Hotel-hotel ini pada umumnya merupakan peralihan profesi dari perusahaan batik ke perhotelan kelas melati (sekitar 75 persen). Pada umumnya hotel-hotel tersebut sebelumnya merupakan perusahaan batik. Pada awal tahun 1970-an usaha batik menurut informan masih cukup menjanjikan, meskipun jenis batik yang diproduksi batik cap. Pemasaran pada saat itu cukup mudah baik di sekitar Kota Yogyakarta maupun ke Jakarta. Selanjutnya pada akhir tahun 1970-an pemasaran batik mengalami kelesuan, menyusul adanya batik *printing* dari Solo sebagai pesaing. Bersamaan dengan lesunya pemasaran batik, di antara mereka ada yang memulai merubah usaha, menjadi penginapan/hotel. Seperti diketahui bahwa lahan tempat usaha para pengusaha batik memang cukup luas, karena untuk proses pembuatan batik memerlukan lahan yang cukup luas tersebut. Para pengusaha batik lain yang masih meneruskan usahanya menganggap keberanian ini merupakan “*pioneer*”.

Dengan munculnya hotel-hotel seperti di Kampung Prawirotaman di tengah kelesuan pemasaran batik saat itu dianggap sebagai contoh yang baik. Kemudian para pengusaha batik lainnya ikut-kutan beralih usaha ke hotel/penginapan, keadaan ini dimulai awal tahun 1975. Hingga saat ini dengan makin banyaknya wisatawan asing masuk ke Yogyakarta, maka makin banyak pula bermunculan hotel di perkampungan yang lain. Meskipun demikian bukan hanya wisatawan asing saja yang senang tinggal di hotel kelas melati di daerah tersebut, tetapi pada saat liburan anak sekolah juga banyak dikunjungi para wisatawan nusantara.

Keadaan tentang beralihnya suasana usaha di daerah Prawirotaman ini menunjukkan adanya perubahan sosial dan budaya masyarakat setempat. Kampung yang sebelumnya disibukkan dengan situasi kerja para pekerja /pembatik yang pada umumnya datang dari luar kampung tersebut, berubah menjadi situasi kerja perhotelan yang secara langsung para pekerjanya berlainan sama sekali. Ketika kampung Prawirotaman masih banyak terdapat pengusaha batik, suasana kampung sehari-harinya sepi. Para pekerja yang datang dari luar kampung meramaikan suasana pada pagi dan sore, pada saat datang dan pulang dengan menggunakan sepeda. Namun setelah perkampungan ini berubah menjadi kampung perhotelan, sepanjang hari suasana diramaikan oleh para wisatawan yang keluar masuk berdatangan. Dengan keluar masuknya wisatawan dari berbagai daerah termasuk dari luar negeri tersebut, secara tidak langsung akan mempengaruhi sosial budaya masyarakat setempat. Para wisatawan mempunyai kebiasaan hidup yang sama sekali berlainan dengan orang setempat, mulai dari cara berpakaian, cara makan dan makanan yang biasa dimakan dan sebagainya. Namun dari hasil wawancara dengan beberapa informan bahwa masyarakat setempat khususnya di Prawirotaman merasa tidak terpengaruh oleh kebiasaan yang sifatnya negatif bagi masyarakat setempat.

Dengan lesunya batik yang berubah menjadi perhotelan ini juga menggeser para pekerja batik, mereka kehilangan tempat kerja . Meskipun mereka umumnya juga sebagai petani di rumahnya, tetapi sudah mengurangi kesempatan kerjanya. Sebelumnya kebiasaan pada saat nunggu panen bisa bekerja di batik, sekarang tidak bisa lagi, yang mereka lakukan hanya bertani saja dan pada saat nunggu panen nganggur. Kalaupun masih ada beberapa perusahaan batik yang bisa menampung itupun terbatas. Sedangkan kampung perhotelan sudah ditempati oleh tenaga kerja yang setingkat akademi atau sekolah menengah kejuruan pariwisata. Para tenaga kerja perhotelan ini

terhadap usaha hotel berbintang dan melati merupakan salah satu kebijakan yang mengarah pada terciptanya daya saing kepariwisataan daerah. Dengan terciptanya daya saing maka akan mempengaruhi tingkat lama tinggal, dengan demikian akan mempengaruhi kegiatan belanja dan akhirnya juga meningkatkan pembangunan perekonomian daerah.

Bagaimana kualitas tenaga kerja di perhotelan dilihat dari sosial budaya masyarakat Jawa ? Yogyakarta dikenal sebagai pusat budaya Jawa banyak nilai-nilai budaya yang dapat mendukung terhadap pengembangan kualitas sumber daya manusia di industri perhotelan. Menurut Mulder (1983) ada kecenderungan masyarakat Jawa memiliki kesadaran yang tinggi terhadap keberadaan orang lain. Orang Jawa sangat menghargai dan menjunjung tinggi *sopan santun* atau *tata-krama (toto kromo - bhs. Jawa)* . Oleh karena itu, bagi orang Jawa menghormati kehadiran orang lain merupakan suatu keharusan. Sebagai manifestasi penghormatan tersebut ditunjukkan dengan memberi salam dengan *menganggukan kepala* atau *membungkukkan badan*, apabila bertemu orang lain atau melewati di depan orang lain. Bahkan apabila berpampasan dengan orang lain dan sedikit menyenggol badan orang lain tanpa pelit-pelit mengatakan *nyuwun sewu* (minta maaf), meskipun mereka yang tersenggol merasa sama sekali tidak terganggu. Juga apabila bertemu dengan orang lain mudah untuk menunjukkan muka *mesem* (senyum) sebagai rasa simpati dan hormat dan tidak pelit untuk mengatakan *monggo* (silahkan) untuk tamu yang datang atau yang hanya lewat di dekat rumahnya. Kadang apabila orang yang lewat tersebut adalah orang Jawa yang masih memiliki nilai-nilai sopan santun Jawa juga mengatakan atau menjawab hal yang sama *monggo*.

Sopan santun tersebut dapat dikatakan sebagai ritual wajib yang menunjukkan adanya pengakuan keberadaan orang lain. Seandainya orang saling kenal tidak begitu akrab, namun tinggal di kawasan atau lingkungan yang sama, menyapa untuk penghormatan ketika bertemu atau berpampasan dianggap suatu keharusan. Mereka tidak dianggap sopan apabila tidak saling menegur dan dapat disebut dengan *nengnengan* (tidak saling menegur). *Nengnengan* merupakan tingkah laku yang tidak baik atau tidak disenangi atau harus dihindari bagi masyarakat Jawa. Oleh karena itu, kebanyakan orang sadar arti pentingnya tegur sapa terhadap orang lain, meskipun belum kenal betul.

Dari beberapa kasus dijumpai di hotel yang diteliti terutama di hotel-hotel tingkat melati sopan santun para tenaga kerja tersebut masih kurang. Hal tersebut memang berbeda dengan di hotel-hotel

(permisi terima kasih) sambil membukukan badan. Kata-kata *matur nuwun* dan membungkukan badan tersebut terasa sangat sopan dan indah, apabila dapat diterapkan pada para petugas pelayanan di perhotelan. Sehingga para tamu akan menganggap bahwa kunjungan mereka dilayani dengan baik dan dihormati. Di samping itu, sekaligus ikut menjunjung nilai-nilai luhur budaya Jawa, yaitu sopan santun. Bagi petugas front office dalam pelayanan, di samping kemampuannya dalam bahasa (lokal dan asing), juga perlu menunjukkan tingkah laku yang *andap asor* (rendah hati) dan murah senyum serta komunikatif. Sehingga para tamu akan senang dan merasa dihargai dan tertarik untuk kembali. Sopan santun dan tata krama tersebut yang selama ini kurang dan kurang diperhatikan oleh pihak manajer atau pemilik hotel, terutama bagi para tenaga kerja yang berhubungan langsung ke para tamu atau wisata

Penutup

Dalam pengembangan usaha dan peningkatan kualitas tenaga kerja industri pariwisata di Kota Yogyakarta terutama industri perhotelan, telah lama terjalin jaringan sosial antar lembaga-lembaga yang ada di Yogyakarta. Jaringan kerjasama tersebut baik antar lembaga swasta maupun antara lembaga swasta dan lembaga pemerintah (dinas-dinas pemerintah daerah). Adanya jaringan kerjasama tersebut yang menyebabkan pengembangan usaha dan tenaga kerja di industri perhotelan lebih baik daripada di industri kerajinan batik. Di industri kerajinan batik lembaga-lembaga swasta (seperti koperasi batik) dan lembaga pemerintah (seperti Balai Penelitian Batik, Dinas Perindustrian) yang mestinya menjadi pelopor dalam membina usaha dan meningkatkan kualitas tenaga kerja batik, termasuk teknologi dan desainnya justru akhir-akhir ini makin menurun peranannya.

Dalam perspektif budaya dalam pengembangan kualitas tenaga kerja di industri pariwisata, sebetulnya di dalam masyarakat Yogyakarta kaya akan nilai-nilai budaya yang dapat dikembangkan untuk menunjang peningkatan kualitas tenaga kerja baik di industri perhotelan maupun kerajinan batik. Namun sayang banyak nilai-nilai budaya tersebut yang telah ditinggalkan oleh para generasi mudanya termasuk oleh mereka yang berkecimpung di bidang pelayanan seperti di industri perhotelan. Hal ini terutama sangat nampak di hotel-hotel non-bintang, banyak perilaku pelayanan yang dilakukan oleh tenaga kerja/karyawannya yang kurang memuaskan para wisatawan. Kemudian di industri kerajinan batik menurunnya peminat tenaga kerja yang mau bekerja di

- Kuswadji, K (1984)
 'Motif Batik dalam Pandangan Hidup Masyarakat Jawa'.
 Yogyakarta : Lembaga Javanologi Yayasan Ilmu Pengetahuan dan
 Kebudayaan Panunggalan.
- Mulder, Niels (1985)
*Pribadi dan Masyarakat di Jawa: Penjelajahan Mengenai
 Hubungannya Yogyakarta, 1970-1980.* Seri Budi No.3. Jakarta :
 Penerbit Sinar Harapan.
- Sekar Jagad. (2001).
 'Pembatikan di Keraton', dalam *Majalah Batik Indonesia*. Nomor 4/
 Tahun I - Mei 2001. Yogyakarta. 2001.
- Soedjito S. (1986).
Transformasi Sosial Menuju Masyarakat Industri. Yogyakarta : PT
 Tiara Wacana.
- Soekanto, Soerjono. (1982).
Sosiologi : Suatu Pengantar. Edisi Baru Kesatu 1982, Jakarta : CV
 Rajawali.
- Sumardiyono. (2001).
 'Desa Wisata Batik Perlama Masa Tinggal Touris', dalam *Majalah
 Batik Indonesia* . Nomor 5 / Tahun II - Nopember 2001. Yogyakarta.
 2001.
- Supandjar, Damardjati (1985)
 'Sandang, Pangan, Papan Dalam Pandangan Hidup Masyarakat Jawa'.
 Yogyakarta : Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional-Depdikbud.
- Susilantini, Endah. (1986).
Peranan Abdi Dalem Keparak Di Keraton Kasultanan Yogyakarta.
 Yogyakarta : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Direktorat
 Jenderal Kebudayaan. Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional.
- Zafria (2001).
 'Pengetahuan Obyek Dan Daya Tarik Wisata'. Makalah disampaikan
 dalam *Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pramuwisata Madya*.
 Propinsi DIY. Kerja Sama Dinas Pariwisata Propinsi DIY, Himpunan
 Pramuwisata Indonesia (HPI) Propinsi DIY. 2001.

LAMPIRAN

Daftar istilah dan pengertiannya :

Angklo	:	tungku dari tanah liat dengan bahan bakar arang kayu
ASITA	:	Association of the Indonesian Tours and Travel Agencies
Batik	:	dalam bahasa Jawa, batik berasal dari dua suku kata ' <i>ba-thik</i> ', yang berarti konotatif artinya <i>kecil</i> .
Bell boy	:	pekerja hotel yang tugasnya mengangkat koper dan melayani keperluan tamu
Canting	:	alat untuk menulis/menggambar dalam pembatikan dengan tinta cairan malam
Depari	:	Dewan Pariwisata Indonesia
Dilorot	:	menghilangkan lilin malam dalam kain pembatikan
DTW	:	Daerah Tujuan Wisata
Food & baverage	:	bidang yang menyiapkan dan menyajikan minuman & makanan bagi tamu hotel
Front office	:	bagian penerima tamu hotel (untuk <i>check in & check out</i> serta informasi lainnya)
Gawangan	:	alat untuk <i>sampiran</i> kain <i>mori</i> yang akan dibatik
Gethok tular	:	penyampaian informasi/ pesan dari mulut ke mulut
House keeper	:	pekerja hotel yang tugasnya mengurus kamar tidur tamu (membersihkan, mengganti spreï, handuk dsb).
HPI	:	Himpunan Pramuwisata Indonesia
Industri pariwisata	:	adalah berbagai macam usaha, yang menghasilkan produk-produk maupun jasa/pelayanan yang baik langsung ataupun tidak langsung akan dibutuhkan oleh para wisatawan selama perlawatannya (Damardjati, 1992)
JTTC	:	Jogja Tourism Training Centre
Juragan batik	:	Pengusaha/ pemilik perusahaan kerajinan batik
Kerok	:	menghilangkan lilin malam dengan benda tajam, bukan dilarutkan dalam cairan seperti <i>dilorot</i> .
KPPD	:	Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah

LPN	:	Lembaga Pariwisata Nasional
Malam	:	Lilin yang digunakan sebagai bahan perintang (<i>resist agent</i>) dalam pewarnaan
MICE	:	Meeting, Incentive, Conference and Exhibition
Mori	:	kain katun putih sebagai bahan kain batik
Nglajo	:	mobilitas ulang alik dalam hari yang sama
Nyerat	:	melakukan pekerjaan membatik (<i>bhs. Jawa</i>)
Objek wisata budaya	:	objek yang daya tariknya bersumber pada kebudayaan, seperti candi, keraton, musium, atraksi kesenian (kesenian tari ramayana, wayang), perayaan sekaten dan objek lain yang terkait dengan budaya.
OTDA	:	Otonomi Daerah
Pariwisata	:	adalah seluruh kegiatan (pemerintah, dunia usaha dan masyarakat) untuk mengatur, mengurus dan melayani kebutuhan wisatawan (Karyono, 1997).
Pencelupan/babaran	:	pewarnaan pada kain batik (dalam batik tradisional ada 3 jenis warna - biru/ hitam, coklat/soga dan putih - semua warna alam)
PHRI	:	Perhimpunan Hotel & Restoran Indonesia
PUSPAR	:	Pusat Penelitian & Pengembangan Pariwisata
Rujakan	:	proses pembatikan tanpa membuat pola lebih dahulu
SMK Kel. Pariwisata	:	Sekolah Menengah Kejuruan yang memiliki program yang terkait dengan pariwisata
STUPPA	:	Studio Perencanaan Pariwisata
UMR	:	Upah Minimum Regional di DI. Yogyakarta tahun 2002 Sebesar Rp 320 000,-
Wajan kecil	:	wajan untuk tempat cairan <i>malam</i> waktu membatik
Wisata budaya	:	prjalanan wisata dengan tujuan melihat/ mempelajari adat-istiadat, budaya (termasuk candi, keraton, musium dsb), tata cara kehidupan dan kebiasaan yang terdapat di daerah/ negara yang dikunjungi.
WTO	:	World Trade Organization